



**UNIVERSITAS PGRI
MAHADEWA INDONESIA**

ROADMAP PENDIDIKAN

**UNIVERSITAS PGRI
MAHADEWA
INDONESIA**

TAHUN 2020–2035

(Edisi Revisi 2023)





UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA

Jalan Seroja, Tonja, Denpasar. Telp. 081 138 88814 Laman

www.mahadewa.ac.id

Surel info@mahadewa.ac.id

**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA
1610/UPMI/X/2023**

**TENTANG
PENETAPAN ROADMAP PENGEMBANGAN BIDANG PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA TAHUN 2020–2035**

MENIMBANG:

1. bahwa untuk menjamin terselenggaranya pendidikan tinggi yang bermutu, relevan, dan berdaya saing dalam menghadapi tantangan Revolusi Industri 4.0, *society* 5.0, digitalisasi, dan tuntutan pembangunan berkelanjutan, Universitas PGRI Mahadewa Indonesia perlu memiliki arah pengembangan bidang pendidikan yang jelas, sistematis, dan berjangka panjang;
2. bahwa Universitas PGRI Mahadewa Indonesia sebagai perguruan tinggi berbasis kependidikan dan sains-teknologi di Bali, dengan visi “*Unggul dan kompetitif berlandaskan Tri Hita Karana*”, memerlukan dokumen roadmap bidang pendidikan yang selaras dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi, kebijakan Merdeka Belajar–Kampus Merdeka, dan Sistem Penjaminan Mutu Internal;
3. bahwa telah disusun *Roadmap Pengembangan Bidang Pendidikan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia Tahun 2020–2035* yang memuat visi, misi, tujuan, arah pengembangan berdasarkan 8 standar pendidikan, serta tahapan pengembangan (Horizon I, II, dan III) sebagai pedoman penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan di lingkungan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia;
4. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, dipandang perlu untuk menetapkan *Roadmap Pengembangan Bidang Pendidikan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia Tahun 2020–2035* dengan Keputusan Rektor.

MENGINGAT:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

4. Peraturan-peraturan Menteri yang mengatur tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, serta kebijakan Merdeka Belajar–Kampus Merdeka dan penjaminan mutu pendidikan tinggi;
5. Ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang relevan di bidang pendidikan tinggi;
6. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan yang menaungi Universitas PGRI Mahadewa Indonesia;
7. Statuta Universitas PGRI Mahadewa Indonesia;
8. Peraturan Rektor tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas PGRI Mahadewa Indonesia;
9. Hasil pembahasan dan/atau rekomendasi Senat Universitas PGRI Mahadewa Indonesia terkait *Roadmap Pengembangan Bidang Pendidikan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia Tahun 2020–2035*.

MEMPERHATIKAN:

1. Draft *Roadmap Pengembangan Bidang Pendidikan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia Tahun 2020–2035* yang telah disusun oleh tim;
2. Masukan dan saran dari pimpinan universitas, fakultas, program studi, Lembaga Penjaminan Mutu, dan unit terkait lainnya.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN:

KESATU

Menetapkan *Roadmap Pengembangan Bidang Pendidikan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia Tahun 2020–2035* sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini, sebagai pedoman resmi penyelenggaraan dan pengembangan bidang pendidikan di lingkungan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia.

KEDUA

Roadmap sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memuat, antara lain:

1. Latar belakang, profil universitas, dan nilai dasar *Tri Hita Karana* dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi;
2. Visi, misi, tujuan strategis, dan indikator kinerja utama bidang pendidikan;
3. Prinsip dan kerangka pengembangan pendidikan berbasis Outcome-Based Education (OBE), Merdeka Belajar–Kampus Merdeka (MBKM), integrasi *Tri Hita Karana*, Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), serta integrasi sains-teknologi dan kearifan lokal;
4. Arah pengembangan pendidikan berdasarkan 8 standar pendidikan;
5. Roadmap pengembangan bidang pendidikan dalam tiga horizon (Horizon I: 2020–2025, Horizon II: 2026–2030, Horizon III: 2031–2035) beserta skala prioritas dan fokus program;
6. Tata kelola, mekanisme implementasi, sistem monitoring dan evaluasi, serta manajemen risiko dan rekomendasi tindak lanjut.

KETIGA

Roadmap Pengembangan Bidang Pendidikan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia Tahun 2020–2035 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU menjadi acuan utama bagi:

1. Penyusunan dan/atau penyesuaian Rencana Strategis (Renstra) Universitas, fakultas, dan program studi di bidang pendidikan;
2. Penyusunan Rencana Operasional (Renop) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT) di lingkungan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia;
3. Pengembangan dan peninjauan kurikulum berbasis OBE–MBKM di seluruh program studi;
4. Penguatan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) khususnya di bidang pendidikan;
5. Penyusunan regulasi internal, pedoman, dan prosedur operasional standar yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan.

KEEMPAT

Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Ketua BPM, Ketua Program Studi, Kepala unit MBKM, dan pimpinan unit terkait lainnya wajib menjadikan *Roadmap Pengembangan Bidang Pendidikan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia Tahun 2020–2035* sebagai rujukan dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring–evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang pendidikan.

KELIMA

Lembaga Penjaminan Mutu, bekerja sama dengan Wakil Rektor Bidang Akademik, fakultas, program studi, dan unit MBKM, melaksanakan monitoring dan evaluasi berkala terhadap implementasi roadmap ini, serta menyusun rekomendasi perbaikan yang diperlukan untuk disampaikan kepada Rektor.

KEENAM

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan *Roadmap Pengembangan Bidang Pendidikan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia Tahun 2020–2035*, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor dan/atau keputusan lainnya yang relevan.

KETUJUH

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada Tanggal : 31 Oktober 2023

Rektor,



A handwritten signature in black ink, appearing to read "I Made Suarta", is written over the right side of the official stamp.

Prof. Dr. Drs. I Made Suarta, S.H., M.Hum.

NIP 196210251991021001

Tembusan:

1. Ketua Yayasan YPLP IKIP PGRI Bali
2. Wakil Rektor di lingkungan UPMI
3. Para Dekan di lingkungan UPMI
4. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
5. Ketua Lembaga Pengembangan Akademik
6. Para Ketua Program Studi di lingkungan UPMI

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, *Roadmap Pengembangan Bidang Pendidikan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia 2020–2035* ini dapat disusun dan diselesaikan. Dokumen ini lahir dari kesadaran kolektif bahwa dinamika pendidikan tinggi di era Revolusi Industri 4.0, *society* 5.0, digitalisasi, dan tuntutan keberlanjutan menuntut UPMI untuk melakukan penguatan dan transformasi yang lebih terencana, terukur, dan berkesinambungan.

Roadmap ini disusun sebagai panduan strategis pengembangan pendidikan yang berlandaskan visi Universitas PGRI Mahadewa Indonesia: **“Unggul dan kompetitif berlandaskan Tri Hita Karana Tahun 2030.”** Seluruh rumusan di dalamnya diarahkan agar penyelenggaraan pendidikan tinggi di UPMI tidak hanya memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti), Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), kebijakan Merdeka Belajar–Kampus Merdeka (MBKM), dan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), tetapi sekaligus menampilkan kekhasan nilai **Tri Hita Karana** Parhyangan, Pawongan, dan Palemahan sebagai dasar etika, budaya, dan spiritual dalam setiap aktivitas akademik.

Secara substantif, dokumen ini memuat arah pengembangan delapan standar pendidikan, mulai dari Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi dan Proses Pembelajaran, Standar Penilaian, Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, hingga Standar Sarana Prasarana, Pengelolaan, dan Pembiayaan Pembelajaran. Seluruhnya dirancang dalam kerangka *Outcome-Based Education* (OBE) dan implementasi MBKM, dengan penekanan pada integrasi sains-teknologi, kearifan lokal Bali, serta penguatan karakter dan literasi digital lulusan.

Roadmap pendidikan ini disusun dalam tiga tahapan strategis yang selaras dengan jalur pencapaian keunggulan UPMI, yaitu berdaya saing nasional melalui tata kelola universitas yang baik, penguatan sebagai *Excellent Teaching University*, dan pencapaian keunggulan inovasi pendidikan di tingkat Asia Tenggara.

Akhirnya, besar harapan kami agar *Roadmap Pengembangan Bidang Pendidikan 2020–2035* ini dapat digunakan secara aktif sebagai rujukan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan di Universitas PGRI Mahadewa Indonesia. Semoga dokumen ini menjadi pijakan kokoh bagi upaya bersama mewujudkan UPMI sebagai perguruan tinggi yang benar-benar unggul, kompetitif, dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat, bangsa, dan lingkungan.

Denpasar, 31 Oktober 2023

Rektor Universitas PGRI Mahadewa
Indonesia,

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan tinggi di abad ke-21 menghadapi dinamika perubahan yang sangat cepat seiring dengan menguatnya Revolusi Industri 4.0, konsep *Society 5.0*, percepatan digitalisasi, dan tuntutan pembangunan berkelanjutan (*sustainability*). Revolusi Industri 4.0 ditandai oleh integrasi dunia fisik dan digital melalui kecerdasan buatan, *big data*, *internet of things* (IoT), dan otomatisasi di berbagai sektor. *Society 5.0* menempatkan teknologi tersebut bukan sekadar sebagai penggerak ekonomi, tetapi sebagai instrumen untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Dalam konteks ini, perguruan tinggi dituntut untuk tidak hanya menghasilkan lulusan yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga memiliki kepekaan sosial, kemampuan beradaptasi, serta komitmen terhadap kelestarian lingkungan dan nilai-nilai kemanusiaan.

Di Indonesia, tuntutan global tersebut hadir bersamaan dengan agenda nasional untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Digitalisasi proses pembelajaran, tata kelola, dan layanan akademik menjadi keharusan, bukan lagi pilihan. Perguruan tinggi harus mampu menyelenggarakan pembelajaran yang fleksibel, berbasis teknologi, kolaboratif, serta relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan masyarakat. Isu keberlanjutan (*sustainability*) menuntut perguruan tinggi untuk mengintegrasikan dimensi ekologis, sosial, dan ekonomi dalam kurikulum, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, sehingga lulusan mampu berperan aktif dalam penyelesaian persoalan-persoalan nyata di tingkat lokal maupun nasional.

Universitas PGRI Mahadewa Indonesia (UPMI) sebagai perguruan tinggi swasta yang berbasis pada bidang kependidikan dan sains-teknologi di Bali memiliki posisi strategis dalam menghadapi tantangan tersebut. Warisan keilmuan keguruan memberikan kekuatan dalam pengembangan pendidikan dan pembentukan karakter, sementara rumpun sains-teknologi membuka peluang besar dalam pengembangan inovasi berbasis TIK dan teknologi terapan. Lokasi UPMI di Bali juga memberikan konteks keunggulan tersendiri, yakni keterkaitan erat dengan budaya, pariwisata, ekonomi kreatif, dan kearifan lokal. Hal ini menjadikan UPMI memiliki modal sosial dan kultural yang kuat untuk mengembangkan model pendidikan tinggi yang relevan, berakar pada konteks lokal, namun tetap responsif terhadap perkembangan nasional.

Dalam konteks tersebut, diperlukan sebuah roadmap pengembangan pendidikan yang dirancang secara sistematis, terukur, dan berkesinambungan. Roadmap ini harus selaras dengan kerangka regulasi nasional, khususnya Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti), Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), kebijakan Merdeka Belajar–Kampus Merdeka (MBKM), serta Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Keselarasan ini penting agar seluruh penyelenggaraan pendidikan di UPMI memenuhi standar mutu nasional, mampu dipertanggungjawabkan secara akademik dan administratif, serta mendukung pencapaian akreditasi yang unggul.

Di saat yang sama, roadmap pendidikan UPMI tidak boleh kehilangan jati diri lokalnya. Visi “unggul dan kompetitif berlandaskan *Tri Hita Karana*” menegaskan bahwa pengembangan pendidikan di UPMI harus berkarakter pada nilai-nilai harmoni hubungan manusia dengan Tuhan (*Parhyangan*), sesama manusia (*Pawongan*), dan alam lingkungan (*Palemahan*). Dengan demikian, roadmap pendidikan yang disusun tidak hanya berfungsi sebagai panduan teknis pemenuhan standar, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk mengintegrasikan kearifan lokal *Tri Hita Karana* ke dalam kurikulum, proses pembelajaran, dan budaya akademik. Sinergi antara tuntutan global, kerangka regulasi nasional, dan nilai-nilai lokal inilah yang menjadi fondasi utama penyusunan roadmap pengembangan bidang pendidikan di Universitas PGRI Mahadewa Indonesia.

1.2 Profil Singkat Universitas PGRI Mahadewa Indonesia

Universitas PGRI Mahadewa Indonesia (UPMI) merupakan kelanjutan dan pengembangan dari lembaga pendidikan tinggi keguruan yang telah berpengalaman panjang di Bali. Pada awalnya, institusi ini bernama IKIP PGRI Bali yang berdiri pada tanggal 25 Agustus 1983 sebagai perguruan tinggi yang berfokus pada bidang kependidikan dan pengembangan tenaga pendidik. Selama beberapa dekade, IKIP PGRI Bali berkontribusi dalam mencetak guru-guru profesional yang tersebar di berbagai satuan pendidikan, khususnya di wilayah Bali dan sekitarnya. Dinamika perkembangan pendidikan tinggi, tuntutan peningkatan relevansi keilmuan, serta kebutuhan penguatan bidang sains dan teknologi mendorong transformasi kelembagaan menuju bentuk universitas.

Sebagai respons terhadap perkembangan tersebut, pada tahun 2020 IKIP PGRI Bali bertransformasi menjadi Universitas PGRI Mahadewa Indonesia dengan menggabungkan diri bersama STMIK Denpasar. Penggabungan ini menandai babak baru dalam sejarah institusi, dari yang semula berfokus pada kependidikan menjadi universitas yang mengelola rumpun ilmu kependidikan dan sains-teknologi secara terpadu. Perubahan bentuk ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga substantif, karena memperluas mandat akademik UPMI dalam penyelenggaraan program studi yang lebih beragam dan relevan dengan kebutuhan masyarakat serta dunia kerja.

Pada kurun waktu 2020 sampai 2023 UPMI mengelola dua fakultas utama. Pertama, **Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP)** yang menyelenggarakan berbagai program studi Sarjana (S1), yaitu: Bimbingan dan Konseling (BK), Pendidikan Bahasa Indonesia dan Daerah, Pendidikan Seni Rupa, Pendidikan Seni Tari, Drama, dan Musik, Pendidikan Sejarah, Pendidikan Ekonomi, Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi (PJKR), Pendidikan Biologi, dan Pendidikan Matematika dan S2 Pendidikan Bahasa Indonesia. Program-program studi tersebut merepresentasikan komitmen UPMI dalam memperkuat bidang kependidikan, pengembangan karakter, literasi, seni, serta sains dasar yang menjadi fondasi penting bagi pembangunan sumber daya manusia.

Kedua, **Fakultas Teknik Informatika** yang menaungi dua program studi Sarjana, yaitu S1 Teknik Informatika dan S1 Sistem Informatika. Kehadiran fakultas ini merupakan wujud penguatan UPMI di bidang sains dan teknologi, khususnya teknologi informasi dan komunikasi. Melalui kedua program studi tersebut, UPMI berupaya menyiapkan lulusan yang kompeten dalam pengembangan perangkat lunak, pengelolaan sistem informasi, serta pemanfaatan teknologi digital untuk berbagai sektor, termasuk pendidikan, pariwisata, dan

ekonomi kreatif. Sinergi antara rumpun kependidikan dan teknik informatika menjadi salah satu kekhasan UPMI dalam merespons era digital dan Revolusi Industri 4.0.

Dalam perkembangannya sesuai dengan tuntutan organisasi, UPMI melakukan penyesuaian dengan mengubah menjadi tiga fakultas yakni Fakultas Bahasa dan Seni yang menaungi prodi S1 Pendidikan Bahasa Indonesia dan Daerah, S1 Pendidikan Seni Rupa, S1 pendidikan Seni tari Drama dan Musik (Sendratasik), S1 Pendidikan Bahasa daerah dan S2 Pendidikan Bahasa Indonesia. Fakultas Ilmu Sosial yang mengampu S1 Bimbingan dan Konseling, S1 Pendidikan Sejarah, Si pendidikan Ekonomi dan S1 Kewirausahaan. Fakultas sains dan teknologi mengampu Si Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, S1 Pendidikan Biologi, S1 pendidikan Matematika, S1 Teknik Informatika dan Si Sistem Informatika.

Secara geografis dan kultural, UPMI memiliki keunggulan kontekstual yang kuat. Berlokasi di Bali, UPMI beroperasi dalam lingkungan yang kaya akan budaya, tradisi, dan nilai-nilai kearifan lokal, sekaligus berada di pusat perkembangan pariwisata dan ekonomi kreatif. Kondisi ini memberikan peluang bagi UPMI untuk mengembangkan model pendidikan tinggi yang mengintegrasikan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dengan budaya Bali serta nilai-nilai lokal, termasuk *Tri Hita Karana*. Keunggulan kontekstual ini menjadi modal penting bagi UPMI untuk merancang kurikulum, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang relevan, berakar pada kebutuhan lokal dan regional, namun tetap sejalan dengan agenda pembangunan nasional dan tantangan global.

1.3 Nilai Dasar *Tri Hita Karana*

Tri Hita Karana merupakan falsafah hidup masyarakat Bali yang menekankan pentingnya harmoni dalam tiga dimensi utama: hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan sesama, dan hubungan manusia dengan alam lingkungan. Ketiga dimensi ini dikenal sebagai Parhyangan, Pawongan, dan Palemahan. *Parhyangan* merujuk pada hubungan harmonis manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa melalui sikap religius, rasa syukur, dan pengamalan nilai-nilai spiritual dalam kehidupan sehari-hari. *Pawongan* menggambarkan hubungan harmonis antar manusia yang didasari rasa hormat, kepedulian, kerja sama, dan keadilan sosial. Sementara itu, *Palemahan* menekankan hubungan harmonis manusia dengan alam lingkungan, yang tercermin dalam kepedulian terhadap kelestarian sumber daya, penataan ruang yang bijak, serta perilaku yang menjaga keberlanjutan ekosistem.

Bagi Universitas PGRI Mahadewa Indonesia, *Tri Hita Karana* tidak sekadar menjadi identitas kultural, melainkan ditetapkan sebagai nilai dasar (*core values*) yang menjiwai seluruh penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi. Dalam bidang pendidikan dan pengajaran, *Tri Hita Karana* menjadi rujukan etis dan filosofis dalam pembentukan karakter lulusan. Dalam bidang penelitian, nilai-nilai harmoni mendorong pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat, beretika, dan berpihak pada kemaslahatan manusia serta kelestarian lingkungan. Dalam pengabdian kepada masyarakat, *Tri Hita Karana* menjadi landasan bagi kegiatan yang memperkuat kohesi sosial, memberdayakan komunitas, dan menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian alam. Dengan demikian, tridharma di UPMI diposisikan tidak hanya sebagai kewajiban formal, tetapi sebagai wujud aktualisasi nilai-nilai *Tri Hita Karana* dalam konteks pendidikan tinggi.

Implikasi *Tri Hita Karana* terhadap desain pembelajaran tampak dalam integrasi nilai spiritualitas, etika, kepedulian sosial, dan kepedulian lingkungan ke dalam capaian

pembelajaran lulusan, struktur kurikulum, dan rancangan pembelajaran (RPS). Pembelajaran tidak hanya berorientasi pada penguasaan konsep dan keterampilan teknis, tetapi juga pada pembentukan sikap beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, mampu bekerja sama, toleran, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan. Proyek pembelajaran, tugas lapangan, maupun program Merdeka Belajar–Kampus Merdeka diarahkan agar mahasiswa berinteraksi dengan masyarakat dan lingkungan nyata, sehingga nilai Parhyangan, Pawongan, dan Palemahan terinternalisasi melalui pengalaman langsung.

Dalam bidang kemahasiswaan, *Tri Hita Karana* tercermin dalam pengembangan kegiatan organisasi dan unit kegiatan mahasiswa yang mendorong pembinaan spiritual, karakter, kepemimpinan, kepedulian sosial, dan kepedulian lingkungan. Kegiatan keagamaan, seni budaya, bakti sosial, serta program pelestarian lingkungan bukan hanya dipandang sebagai aktivitas tambahan, melainkan bagian integral dari pembentukan kepribadian mahasiswa UPMI. Budaya kampus yang inklusif, menghargai keberagaman, dan menjunjung tinggi musyawarah menjadi manifestasi langsung dari nilai Pawongan dalam kehidupan sehari-hari sivitas akademika.

Pada tataran tata kelola, *Tri Hita Karana* menjadi acuan dalam membangun sistem pengelolaan universitas yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan berorientasi pada keberlanjutan. Aspek Parhyangan tercermin dalam integritas, kejujuran, dan tanggung jawab moral pimpinan serta seluruh unsur pengelola. Aspek Pawongan tampak dalam pola komunikasi yang dialogis, penghargaan terhadap peran setiap pemangku kepentingan, serta pengambilan keputusan yang mempertimbangkan kemaslahatan bersama. Aspek Palemahan diimplementasikan melalui kebijakan kampus hijau, pengelolaan sarana prasarana yang ramah lingkungan, serta pemanfaatan sumber daya secara efisien dan berkelanjutan. Dengan demikian, *Tri Hita Karana* tidak hanya hadir dalam ranah ide, tetapi diwujudkan secara konkret dalam kebijakan, program, dan praktik sehari-hari di Universitas PGRI Mahadewa Indonesia.

1.4 Landasan Hukum dan Kebijakan

Penyusunan *Roadmap Pengembangan Bidang Pendidikan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia (UPMI)* berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, khususnya di bidang pendidikan tinggi, penjaminan mutu, dan standar nasional pendidikan tinggi di bawah koordinasi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek). Landasan hukum ini memastikan bahwa seluruh arah kebijakan dan program pengembangan tridharma UPMI selaras dengan kerangka regulasi nasional, sekaligus memberi ruang penguatan kekhasan UPMI yang berkarakter *Tri Hita Karana* dan berbasis kependidikan–saintek. Untuk keperluan operasional roadmap, landasan hukum diklasifikasikan sebagai berikut.

1. Landasan Konstitusional dan Ideologis

1. Pancasila

Sebagai dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum, Pancasila menjadi rujukan utama dalam perumusan tujuan pendidikan nasional dan pengembangan kepribadian peserta didik yang beriman, berakhlak mulia, berilmu, dan bertanggung jawab.

2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Khususnya Pasal 31 yang mengatur hak warga negara atas pendidikan dan kewajiban

pemerintah dalam menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia, serta memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi.

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas)
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia ini menggantikan Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 74/P/2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester Pembelajaran Program Kampus Merdeka;
10. Surat Keputusan Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi IKIP PGRI Bali Nomor 062/YPLP-PT/IKIP PGRI Bali/X/2023 tentang Statuta Universitas PGRI Mahadewa Indonesias;
11. Keputusan Rektor Universitas PGRI Mahadewa Indonesia Nomor 1566/UPMI/X/2023 tentang Rencana Induk Pengembangan (RIP) UPMI Tahun 2020—2035;
12. Keputusan Rektor Universitas PGRI Mahadewa Indonesia Nomor 471/UPMI/XI/2020 tentang Pedoman Implementasi Tri Hita Karana dalam Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi Universitas PGRI Mahadewa Indonesia
13. Peraturan Rektor Universitas PGRI Mahadewa Indonesia Nomor 1190/UPMI/VII/2024 tentang Pedoman Akademik Universitas PGRI Mahadewa Indonesia
14. Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UPMI;

1.5 Ruang Lingkup Roadmap

Roadmap Pengembangan Bidang Pendidikan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia disusun sebagai dokumen strategis yang memberikan arah pengembangan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran di seluruh program studi yang dikelola UPMI. Meskipun universitas menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi secara terpadu (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat), roadmap ini secara khusus memfokuskan diri pada pilar **pendidikan/pembelajaran**, dengan tetap menjaga keterkaitannya dengan kegiatan penelitian dan pengabdian. Ruang lingkupnya mencakup pengaturan dan pengembangan berbagai aspek yang berkaitan langsung dengan mutu layanan akademik kepada mahasiswa, relevansi kurikulum, serta kapasitas kelembagaan dalam menghasilkan lulusan yang unggul dan kompetitif berlandaskan *Tri Hita Karana*.

Untuk memastikan keterpaduan dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi serta sistem penjaminan mutu internal universitas, roadmap ini dibangun berdasarkan delapan standar pendidikan yang menjadi kerangka utama pengembangan bidang pendidikan UPMI, yaitu sebagai berikut.

1. Standar Kompetensi Lulusan

Mengatur profil dan capaian pembelajaran lulusan yang harus dimiliki mahasiswa pada setiap program studi. Standar ini menjadi rujukan utama bagi pengembangan kurikulum, proses pembelajaran, dan penilaian, sehingga lulusan UPMI tidak hanya kompeten secara akademik dan profesional, tetapi juga berkarakter *Tri Hita Karana*.

2. Standar Isi Pembelajaran (Kurikulum)

Mengatur struktur, kedalaman, dan keluasan bahan kajian serta mata kuliah yang ditawarkan di setiap program studi. Standar ini mencakup pengembangan kurikulum berbasis *Outcome-Based Education* (OBE) dan Merdeka Belajar–Kampus Merdeka (MBKM), dengan integrasi nilai-nilai kearifan lokal dan konteks Bali.

3. Standar Proses Pembelajaran

Mengatur prinsip, bentuk, dan metode pembelajaran yang digunakan dalam mencapai capaian pembelajaran lulusan. Standar ini menekankan penerapan pembelajaran berpusat pada mahasiswa, penggunaan teknologi pembelajaran, pembelajaran berbasis proyek dan pengalaman lapangan, serta internalisasi nilai Parhyangan, Pawongan, dan Palemahan dalam kegiatan belajar.

4. Standar Penilaian Pembelajaran

Mengatur mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar mahasiswa. Standar ini menekankan penilaian yang adil, objektif, transparan, dan akuntabel, serta mendorong penggunaan penilaian otentik (proyek, portofolio, kinerja) yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan dan karakter *Tri Hita Karana*.

5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Mengatur kualifikasi, kompetensi, beban kerja, dan pengembangan profesional dosen serta tenaga kependidikan yang mendukung proses pendidikan. Standar ini memastikan bahwa sumber daya manusia UPMI memiliki kemampuan pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian yang memadai, serta mampu menjadi teladan dalam penerapan nilai-nilai *Tri Hita Karana*.

6. Standar Sarana dan Prasarana

Mengatur ketersediaan, kelayakan, dan pemanfaatan sarana prasarana yang mendukung pembelajaran, seperti ruang kuliah, laboratorium, perpustakaan, teknologi informasi, dan lingkungan kampus. Standar ini juga mencakup upaya mewujudkan lingkungan kampus yang aman, nyaman, inklusif, dan berwawasan lingkungan sesuai semangat Palemahan.

7. Standar Pengelolaan Pembelajaran

Mengatur perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi kegiatan pendidikan dan pembelajaran di tingkat universitas, fakultas, dan program studi. Standar ini mencakup tata kelola akademik, sistem informasi akademik, pelaporan data, serta mekanisme penjaminan mutu internal yang menjamin konsistensi dan keberlanjutan peningkatan mutu.

8. Standar Pembiayaan Pembelajaran

Mengatur perencanaan, pengalokasian, pemanfaatan, dan pertanggungjawaban anggaran yang digunakan untuk mendukung kegiatan pendidikan dan pembelajaran. Standar ini memastikan bahwa pembiayaan pendidikan dikelola secara efisien, transparan, dan berkeadilan, serta mampu menjamin kelangsungan dan peningkatan mutu layanan akademik.

1.6 Horizon Waktu Pengembangan

Roadmap Pengembangan Bidang Pendidikan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia disusun dengan pendekatan bertahap (*staged development*) agar perubahan yang direncanakan dapat dilaksanakan secara realistis, terukur, dan berkesinambungan. Pendekatan bertahap ini penting mengingat adanya dinamika regulasi nasional, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kebutuhan waktu untuk melakukan penyesuaian kurikulum, penguatan sumber daya manusia, dan pembudayaan nilai *Tri Hita Karana* di seluruh lini kelembagaan. Atas dasar pertimbangan tersebut, horizon waktu pengembangan dibagi menjadi tiga fase utama yang saling terkait dan saling menguatkan.

Horizon I: Berdaya Saing Nasional dengan Fokus Keunggulan Tata Kelola Universitas yang Baik (*Good University Governance*) (2020-2025)

Horizon I (2020–2025) merupakan fase pondasi bagi seluruh pengembangan bidang pendidikan di Universitas PGRI Mahadewa Indonesia (UPMI). Pada tahap ini, fokus utama diarahkan pada konsolidasi internal dan pemenuhan menyeluruh terhadap Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) beserta regulasi terkait, dengan tetap mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), kebijakan Merdeka Belajar–Kampus Merdeka (MBKM), serta Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Fase ini menjadi titik tolak untuk menata kembali seluruh komponen pendidikan mulai dari perumusan capaian pembelajaran, kurikulum, proses pembelajaran, penilaian, hingga sarana prasarana dan tata kelola agar selaras dengan tuntutan regulasi nasional dan visi UPMI “Unggul dan Kompetitif Berlandaskan Tri Hita Karana Tahun 2030”.

Langkah strategis pada Horizon I diawali dengan penyelarasan profil lulusan dan capaian pembelajaran lulusan (CPL) di setiap program studi berdasarkan KKNI dan SN Dikti. Seluruh CPL ditinjau dan diperbarui agar secara eksplisit memuat dimensi penguasaan ilmu (kependidikan maupun sains-teknologi), keterampilan abad ke-21 (berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, kolaborasi), karakter *Tri Hita Karana*, serta relevansi dengan kebutuhan dunia kerja nasional. Penyelarasan CPL ini kemudian menjadi dasar bagi penataan kurikulum berbasis *Outcome Based Education (OBE)* dan integrasi kebijakan MBKM, termasuk

penyiapan mata kuliah dan mekanisme pengakuan kredit untuk kegiatan belajar di luar program studi dan di luar kampus.

Pada sisi proses pembelajaran dan penilaian, Horizon I difokuskan pada penegasan prinsip pembelajaran berpusat pada mahasiswa (*student centered learning*) dan penerapan metode pembelajaran aktif yang mendorong partisipasi, refleksi, serta keterkaitan dengan konteks nyata. UPMI mulai memperkenalkan dan memperluas penggunaan pembelajaran berbasis proyek, studi kasus, praktikum, dan tugas lapangan yang relevan dengan lingkungan Bali dan kebutuhan nasional. Sistem penilaian ditata agar selaras dengan CPL dan prinsip OBE, melalui pengembangan rubrik penilaian yang jelas, transparan, dan akuntabel, serta penggunaan penilaian otentik seperti portofolio, produk karya, dan kinerja. Pada fase ini juga dilakukan penguatan infrastruktur teknologi pembelajaran, termasuk optimalisasi penggunaan Learning Management System (LMS) dan sistem informasi akademik.

Dari sisi penjaminan mutu dan tata kelola, Horizon I diarahkan pada penataan dan penguatan SPMI di tingkat universitas, fakultas, dan program studi. Dokumen-dokumen mutu—meliputi Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, dan Formulir Mutu—disusun atau disesuaikan dengan regulasi terkini. Penerapan siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan) mulai dibudayakan dalam pengelolaan pembelajaran, sehingga setiap kegiatan akademik memiliki indikator, mekanisme pemantauan, serta langkah perbaikan yang sistematis. Di samping itu, dilakukan pemetaan dan pengembangan kapasitas dosen serta tenaga kependidikan agar memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang disyaratkan, termasuk kemampuan mengintegrasikan *Tri Hita Karana* dalam pembelajaran dan aktivitas kemahasiswaan.

Secara substansial, Horizon I juga menjadi tahap awal institusionalisasi *Tri Hita Karana* dalam dokumen dan praktik akademik. Nilai Parhyangan, Pawongan, dan Palemahan mulai diurusutamakan dalam visi-misi, CPL, kurikulum, rancangan pembelajaran (RPS), serta kegiatan kemahasiswaan dan tata kelola. Dengan demikian, pada akhir fase 2020–2025, UPMI diharapkan telah memiliki pijakan mutu yang kuat, sistem penjaminan mutu yang berjalan, serta kerangka pendidikan yang patuh terhadap standar nasional dan mulai menunjukkan karakter khas *Tri Hita Karana*, yang akan menjadi landasan bagi penguatan dan diferensiasi pada Horizon II.

Horizon II: Berdaya Saing Nasional dengan Fokus Unggul dalam Kualitas dan Produktivitas (*Excellent Teaching University*) (2026—2030)

Horizon II (2026–2030) merupakan fase ketika Universitas PGRI Mahadewa Indonesia (UPMI) bergerak dari sekadar patuh terhadap standar nasional menuju tahap penguatan mutu dan diferensiasi keunggulan. Jika pada Horizon I fokus utama diarahkan pada penataan dasar-dasar kurikulum OBE–MBKM, sistem penjaminan mutu, serta integrasi awal nilai *Tri Hita Karana* dalam dokumen dan praktik akademik, maka pada Horizon II seluruh fondasi tersebut mulai dimantapkan dan diperdalam. Pada fase ini, UPMI tidak hanya memastikan bahwa standar minimal telah terpenuhi, tetapi juga mengembangkan kekhasan model pendidikan yang relevan, kontekstual, dan memiliki daya saing di tingkat nasional.

Penguatan pada Horizon II terutama diwujudkan melalui pendalaman implementasi kurikulum OBE–MBKM di seluruh program studi. Proses pembelajaran diarahkan semakin kuat pada pendekatan *student-centered learning* dan pembelajaran berbasis pengalaman

(*experiential learning*), seperti proyek lapangan, tugas berbasis kasus nyata, magang, KKN tematik, dan bentuk-bentuk kegiatan MBKM lainnya. Kegiatan-kegiatan tersebut dirancang agar selaras dengan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang telah mengintegrasikan kompetensi akademik, keterampilan abad ke-21, dan karakter *Tri Hita Karana*. Pada tahap ini, proporsi mata kuliah yang menerapkan *project-based learning* dan berkolaborasi dengan mitra eksternal ditingkatkan secara signifikan, sehingga mahasiswa memperoleh pengalaman belajar yang relevan dengan dunia kerja dan kebutuhan masyarakat.

Diferensiasi UPMI sebagai perguruan tinggi berbasis kependidikan dan sains-teknologi di Bali juga dipertegas pada Horizon II. Pengembangan program studi dan pembelajaran diarahkan untuk menonjolkan kekhasan UPMI dalam mengintegrasikan kependidikan, teknologi informasi, budaya Bali, pariwisata, ekonomi kreatif, dan kearifan lokal *Tri Hita Karana*. Hal ini tercermin dalam pengembangan konsentrasi, mata kuliah pilihan, dan proyek lintas disiplin yang menggarap isu-isu seperti pendidikan berbasis teknologi, *smart tourism*, ekonomi kreatif digital, serta pendidikan dan pengelolaan lingkungan berkelanjutan. Dengan demikian, lulusan UPMI diharapkan memiliki profil yang berbeda dan bernilai tambah dibandingkan lulusan perguruan tinggi lain yang sejenis.

Dari sisi sumber daya manusia dan tata kelola, Horizon II ditandai dengan penguatan kapasitas dosen dan tenaga kependidikan. Dosen didorong untuk meningkatkan kualifikasi akademik, kompetensi pedagogik, serta kemampuan dalam memanfaatkan teknologi digital dan mengintegrasikan *Tri Hita Karana* dalam pembelajaran. Kegiatan pelatihan, lokakarya, *benchmarking*, dan kolaborasi nasional dengan perguruan tinggi maupun lembaga profesi lain menjadi bagian dari strategi penguatan kapasitas ini. Sistem penjaminan mutu internal juga diperkuat melalui pemanfaatan data akademik, audit mutu berkala, dan penggunaan *dashboard* mutu untuk memantau capaian standar secara berkelanjutan.

Secara keseluruhan, Horizon II dimaksudkan sebagai fase ketika UPMI mulai dikenal secara lebih luas di tingkat nasional melalui kualitas pelaksanaan OBE–MBKM yang matang dan kekhasan model pendidikan berbasis *Tri Hita Karana*. Fase ini menjadi jembatan penting antara tahap konsolidasi dan tahap pengakuan nasional pada Horizon III, karena di sinilah UPMI membuktikan bahwa ia tidak hanya memenuhi standar, tetapi juga mampu menawarkan praktik baik dan keunggulan yang membedakannya dalam lanskap pendidikan tinggi Indonesia.

Horizon III: Berdaya Saing di Asia Tenggara dengan Fokus Keunggulan Inovasi Pendidikan (*Innovation-Based University*) (2031—2035)

Horizon III (2031–2035) merupakan fase pemantapan dan ekspansi strategis ketika Universitas PGRI Mahadewa Indonesia (UPMI) diarahkan untuk mencapai daya saing di tingkat Asia Tenggara melalui keunggulan inovasi pendidikan yang berlandaskan nilai-nilai *Tri Hita Karana*. Pada fase ini, UPMI tidak lagi berfokus pada pemenuhan standar maupun penguatan implementasi semata, melainkan pada penciptaan, pengembangan, dan diseminasi inovasi pendidikan yang diakui dan relevan di tingkat regional.

Jika pada Horizon I UPMI menitikberatkan konsolidasi kelembagaan dan kepatuhan terhadap standar nasional, serta pada Horizon II memperkuat kualitas dan diferensiasi sebagai *Excellent Teaching University*, maka pada Horizon III UPMI diharapkan telah memiliki fondasi mutu akademik yang mapan, praktik pembelajaran inovatif yang teruji, serta rekam

jejak kinerja tridharma yang memungkinkan universitas berperan sebagai rujukan dan mitra strategis dalam pengembangan pendidikan tinggi di kawasan Asia Tenggara.

Pada fase ini, program-program pendidikan diarahkan pada pengarusutamaan inovasi pembelajaran dan teknologi instruksional, baik dalam desain kurikulum, strategi pembelajaran, asesmen, maupun ekosistem akademik. Kurikulum OBE–MBKM yang terintegrasi dengan nilai Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan tidak hanya menghasilkan lulusan yang kompeten dan berkarakter, tetapi juga adaptif terhadap perkembangan sains, teknologi, dan kebutuhan masyarakat regional ASEAN. Profil lulusan UPMI diharapkan memperoleh pengakuan luas dari satuan pendidikan, dunia usaha dan dunia industri, serta lembaga pemerintah dan mitra internasional.

Keunggulan inovasi pendidikan UPMI pada Horizon III ditunjukkan melalui pengembangan dan implementasi model pembelajaran mutakhir, pemanfaatan teknologi digital dan kecerdasan buatan dalam pembelajaran, serta penguatan pendidikan kontekstual berbasis budaya Bali, pariwisata berkelanjutan, ekonomi kreatif, dan pelestarian lingkungan. Inovasi-inovasi tersebut tidak hanya diterapkan secara internal, tetapi juga didiseminasikan melalui jejaring kerja sama regional Asia Tenggara sebagai kontribusi nyata UPMI dalam transformasi pendidikan.

Penguatan daya saing regional juga tercermin dari kapasitas dan peran dosen serta tenaga kependidikan. Pada Horizon III, dosen UPMI tidak hanya produktif dalam pelaksanaan tridharma di tingkat institusi, tetapi juga berperan aktif sebagai pengembang model, inovator pembelajaran, mitra riset, serta rujukan kebijakan pendidikan di tingkat nasional dan regional. Berbagai produk inovasi pendidikan—meliputi model pembelajaran, perangkat kurikulum, panduan penjaminan mutu, serta integrasi *Tri Hita Karana* dalam pembelajaran dan kemahasiswaan—diharapkan dapat diadaptasi dan direplikasi oleh perguruan tinggi lain di Indonesia dan Asia Tenggara.

Dari sisi tata kelola dan penjaminan mutu, Horizon III ditandai oleh kematangan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang tidak hanya selaras dengan kebijakan nasional, tetapi juga memenuhi praktik baik internasional. Sistem informasi akademik, mekanisme evaluasi, serta budaya mutu telah terinternalisasi secara kuat sehingga mendukung pencapaian dan keberlanjutan akreditasi Unggul serta kesiapan menuju pengakuan dan akreditasi internasional. Pembiayaan pendidikan diarahkan semakin mandiri dan berkelanjutan melalui optimalisasi hibah kompetitif, kerja sama regional ASEAN, serta pengembangan unit usaha berbasis inovasi pendidikan dan layanan profesional.

Dengan demikian, Horizon III memposisikan UPMI sebagai universitas berdaya saing Asia Tenggara yang unggul dalam inovasi pendidikan—bukan hanya sebagai institusi yang memenuhi standar, tetapi sebagai penghasil gagasan, model, dan praktik pendidikan inovatif yang mengintegrasikan mutu akademik, penguasaan sains dan teknologi, relevansi sosial, serta kekuatan nilai *Tri Hita Karana*. Fase ini menjadi puncak roadmap pengembangan UPMI sekaligus pijakan strategis menuju visi jangka panjang berikutnya dalam konteks pendidikan tinggi regional dan global.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN INDIKATOR KINERJA PENDIDIKAN

2.1 Visi Universitas

“Unggul dan Kompetitif Berlandaskan *Tri Hita Karana* Tahun 2030”

2.2 Visi Bidang Pendidikan

“Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang unggul dan kompetitif berlandaskan Tri Hita Karana, melalui pembelajaran berbasis Outcome-Based Education (OBE), Merdeka Belajar–Kampus Merdeka, dan integrasi sains-teknologi dengan kearifan lokal Bali.”

2.3 Misi Bidang Pendidikan

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi berbasis OBE yang menghasilkan lulusan berkarakter *Tri Hita Karana*, kompeten, dan adaptif.
2. Mengimplementasikan MBKM secara bertahap dan terstruktur, untuk memperluas pengalaman belajar mahasiswa di luar prodi dan kampus.
3. Mengintegrasikan nilai *Tri Hita Karana* (*Parhyangan, Pawongan, Palemahan*) dalam kurikulum, proses pembelajaran, dan kegiatan kemahasiswaan.
4. Mengembangkan pembelajaran berbasis sains dan teknologi yang relevan dengan kebutuhan daerah, nasional, dan global.
5. Membangun sistem penjaminan mutu pendidikan yang berkelanjutan dan berbasis data.

2.4 Tujuan Strategis Bidang Pendidikan

1. Menghasilkan lulusan yang unggul, berkarakter *Tri Hita Karana*, dan kompetitif di dunia kerja dan masyarakat.
2. Mewujudkan kurikulum OBE–MBKM di seluruh program studi.
3. Meningkatkan kapasitas dosen dan tenaga kependidikan dalam pembelajaran inovatif berbasis teknologi dan kearifan lokal.
4. Menghadirkan ekosistem pembelajaran yang relevan dengan dunia kerja dan kebutuhan masyarakat Bali, Indonesia.
5. Mencapai dan mempertahankan status akreditasi prodi dan institusi minimal “Baik Sekali” dan menuju “Unggul”.

2.5 Indikator Kinerja Utama (IKU) Bidang Pendidikan

1. Persentase prodi yang menerapkan kurikulum OBE–MBKM.
2. Persentase lulusan yang bekerja/melanjutkan studi ≤ 6 bulan setelah lulus.
3. Persentase mahasiswa yang mengikuti aktivitas MBKM.
4. Persentase mata kuliah yang menggunakan *project-based learning* dan konteks *Tri Hita Karana*.
5. Tingkat kepuasan mahasiswa, lulusan, dan pengguna lulusan.
6. Tingkat kepatuhan pelaporan akademik dan PDDikti.
7. Persentase program studi yang CPL-nya telah dipetakan secara eksplisit terhadap KKNI, SN Dikti, dan visi *Tri Hita Karana* (*Parhyangan, Pawongan, Palemahan*).
8. Persentase lulusan dengan IPK $\geq 3,00$ dan masa studi tepat waktu (≤ 4 tahun untuk S1).

9. Persentase pengguna lulusan yang memberikan penilaian minimal “baik” terhadap kompetensi lulusan (hasil *tracer study* dan survei pengguna).
10. Persentase program studi yang melakukan review kurikulum secara berkala (minimal setiap 4–5 tahun) sesuai siklus SPMI.
11. Persentase program studi yang melibatkan pemangku kepentingan eksternal (dunia kerja, asosiasi profesi, pemerintah daerah, komunitas) dalam penyusunan dan peninjauan kurikulum.
12. Persentase mata kuliah yang memuat secara eksplisit integrasi nilai Tri Hita Karana dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS).
13. Persentase mata kuliah yang menerapkan pendekatan *student-centered learning* (diskusi, studi kasus, *problem-based learning*, *project-based learning*).
14. Rasio dosen: mahasiswa yang memenuhi atau lebih baik dari standar nasional untuk masing-masing program studi.
15. Persentase pertemuan tatap muka/praktikum yang terlaksana $\geq 80\%$ dari rencana per semester (kepatuhan terhadap kontrak kuliah).
16. Persentase mahasiswa yang lulus tepat waktu dibandingkan dengan jumlah mahasiswa pada angkatan yang sama.
17. Persentase mata kuliah yang memiliki RPS lengkap dengan rencana penilaian, bobot, kriteria, dan rubrik penilaian yang terukur.
18. Persentase nilai mata kuliah yang diunggah dosen tepat waktu sesuai kalender akademik.
19. Persentase mata kuliah yang menggunakan bentuk penilaian otentik (proyek, portofolio, produk karya, kinerja praktikum) selaras dengan CPL.
20. Persentase dosen tetap yang memenuhi kualifikasi akademik minimal S2 untuk S1 dan S3 untuk prodi tertentu sesuai ketentuan.
21. Persentase dosen yang memiliki jabatan akademik minimal Lektor.
22. Persentase dosen yang mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi (pelatihan OBE–MBKM, media pembelajaran, penelitian, *Tri Hita Karana*, dsb.) minimal satu kali per tahun.
23. Persentase tenaga kependidikan yang memiliki sertifikat/kompetensi teknis sesuai bidang tugas (laboratorium, administrasi akademik, keuangan, IT, dan lain-lain).
24. Rasio luas ruang kuliah yang layak terhadap jumlah mahasiswa (m^2 /mahasiswa) sesuai standar yang ditetapkan universitas.
25. Rasio jumlah komputer dan perangkat TIK yang berfungsi baik terhadap jumlah mahasiswa pada program studi yang memerlukan.
26. Persentase ruang kuliah yang telah dilengkapi sarana pembelajaran modern (LCD/layar, akses internet, perangkat audio) dan mendukung pembelajaran hybrid/daring.
27. Rasio koleksi referensi (buku, *e-book*, jurnal, database elektronik) per mahasiswa dan per program studi.
28. Persentase standar akademik (8 standar pendidikan) yang telah memiliki dokumen SPMI lengkap (Kebijakan, Manual, Standar, Formulir) dan diimplementasikan.
29. Persentase program studi yang melaksanakan siklus PPEPP secara penuh setiap tahun untuk bidang pendidikan/pembelajaran.

30. Persentase program studi dengan hasil audit mutu internal kategori “baik” atau “sangat baik” pada aspek pembelajaran.
31. Persentase realisasi anggaran bidang pendidikan/pembelajaran dibandingkan dengan rencana anggaran yang ditetapkan.
32. Persentase alokasi anggaran untuk kegiatan peningkatan mutu pembelajaran (pelatihan dosen, pengembangan kurikulum, pengadaan sarpras pembelajaran) terhadap total anggaran universitas.
33. Persentase dana non-SPP (hibah, kerja sama, jasa layanan keahlian) yang dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan pembelajaran dan MBKM.

2.6 Indikator Kinerja Tambahan

1. Persentase kegiatan kemahasiswaan yang secara eksplisit mengangkat tema *Tri Hita Karana*, budaya Bali, dan keberlanjutan lingkungan.
2. Jumlah atau persentase mata kuliah/proyek yang berkolaborasi dengan desa adat, sekolah, atau komunitas lokal per tahun.
3. Persentase RPS yang memuat topik atau studi kasus terkait isu-isu lokal (pariwisata, ekonomi kreatif, lingkungan Bali) yang relevan dengan prodi.
4. Indeks budaya mutu akademik (diukur melalui survei internal tentang pemahaman dan komitmen sivitas akademika terhadap mutu dan SPMI).
5. Persentase dosen dan mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan pengabdian masyarakat yang berkontribusi langsung pada peningkatan kualitas pendidikan dan/atau kesejahteraan masyarakat sekitar kampus.

BAB III

PRINSIP DAN KERANGKA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN

3.1 Outcome-Based Education (OBE)

Penyelenggaraan pendidikan di Universitas PGRI Mahadewa Indonesia dirancang dengan pendekatan *Outcome Based Education* (OBE), yaitu paradigma pendidikan yang menempatkan capaian pembelajaran lulusan (CPL) sebagai titik tolak seluruh perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran. Dalam kerangka ini, mutu pembelajaran tidak hanya diukur dari proses, tetapi terutama dari sejauh mana lulusan benar-benar memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dirumuskan dalam CPL. Pendekatan OBE di UPMI dilaksanakan dengan mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti), sekaligus mengintegrasikan nilai-nilai Tri Hita Karana sebagai karakter khas lulusan.

Pertama, perumusan CPL setiap program studi dilakukan secara sistematis dengan mengacu pada jenjang kualifikasi KKNI yang sesuai (misalnya level 6 untuk program Sarjana) dan standar kompetensi yang diamanatkan SN Dikti. CPL mencakup empat ranah utama, yaitu sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Pada ranah sikap, CPL dirancang untuk mencerminkan internalisasi nilai Parhyangan, Pawongan, dan Palemahan; pada ranah pengetahuan dan keterampilan, CPL diorientasikan pada penguasaan ilmu kependidikan dan sains-teknologi sesuai karakter prodi; sementara pada ranah keterampilan umum dan khusus, CPL dirancang untuk menjawab kebutuhan dunia kerja, perkembangan teknologi, serta tuntutan masyarakat Bali–Indonesia.

Kedua, CPL yang telah dirumuskan selanjutnya diturunkan secara berjenjang menjadi capaian pembelajaran mata kuliah. Proses ini dilakukan melalui penjabaran CPL → Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) → Sub-CPMK → bahan kajian → mata kuliah. CPL program studi dipetakan ke dalam sejumlah CPMK yang menjadi sasaran pembelajaran pada kelompok mata kuliah tertentu. Setiap CPMK kemudian dipecah menjadi Sub-CPMK yang lebih operasional, yang menjelaskan kompetensi spesifik apa yang harus dikuasai mahasiswa setelah menyelesaikan topik-topik tertentu. Sub-CPMK inilah yang menjadi dasar penyusunan bahan kajian, metode pembelajaran, serta bentuk tugas dan pengalaman belajar yang difasilitasi dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS). Dengan demikian, setiap mata kuliah memiliki kontribusi yang jelas dan terukur terhadap pencapaian CPL program studi.

Ketiga, dalam kerangka OBE, penilaian dan aktivitas belajar dirancang secara konsisten untuk mendukung pencapaian CPL. Penilaian tidak hanya berupa ujian tertulis, tetapi juga mencakup berbagai bentuk *assessment* otentik seperti proyek, portofolio, praktik lapangan, presentasi, produk teknologi atau media pembelajaran, dan bentuk kinerja lainnya yang relevan dengan profil lulusan. Setiap instrumen penilaian disusun berdasarkan rubrik yang mengacu pada Sub-CPMK dan CPMK, sehingga ketercapaian CPL dapat diukur secara lebih objektif dan transparan. Aktivitas belajar baik di kelas, laboratorium, lapangan, maupun dalam skema MBKM diarahkan untuk memberikan pengalaman nyata yang memungkinkan mahasiswa mengembangkan kompetensi yang dirumuskan dalam CPL, termasuk penghayatan nilai Tri Hita Karana dalam konteks akademik dan profesional.

Dengan penerapan OBE yang konsisten dari perumusan CPL hingga penilaian dan pengalaman belajar, UPMI menegaskan komitmennya untuk menghasilkan lulusan yang tidak hanya memenuhi standar nasional, tetapi juga memiliki identitas kuat sebagai insan akademik yang unggul, kompetitif, dan berkarakter Tri Hita Karana.

3.2 Merdeka Belajar–Kampus Merdeka (MBKM)

Kebijakan Merdeka Belajar–Kampus Merdeka (MBKM) menjadi salah satu pilar penting dalam pengembangan pendidikan di Universitas PGRI Mahadewa Indonesia. Kebijakan ini memberikan keleluasaan kepada mahasiswa untuk memperluas pengalaman belajar di luar batas konvensional ruang kelas dan program studi, sehingga lulusan memiliki kompetensi yang lebih relevan, adaptif, dan siap menghadapi dinamika dunia kerja maupun perubahan sosial. Di UPMI, implementasi MBKM dirancang selaras dengan regulasi nasional, pendekatan *Outcome-Based Education* (OBE), serta visi “unggul dan kompetitif berlandaskan Tri Hita Karana”.

Pertama, UPMI menegaskan hak belajar mahasiswa selama maksimal tiga semester di luar program studi asal. Dari total tiga semester tersebut, satu semester dapat ditempuh di program studi lain di lingkungan UPMI, sedangkan dua semester berikutnya dapat ditempuh di luar UPMI melalui berbagai bentuk kerja sama akademik dan nonakademik. Skema ini memungkinkan mahasiswa untuk mengembangkan perspektif lintas disiplin, memperkaya jaringan profesional, dan memperoleh pengalaman belajar yang lebih luas. Mahasiswa program kependidikan, misalnya, dapat mengambil mata kuliah atau kegiatan di bidang teknologi informasi, pariwisata, atau ekonomi kreatif; sebaliknya, mahasiswa teknik informatika dapat memperkuat kompetensi pedagogik, komunikasi, dan pemahaman budaya lokal.

Kedua, implementasi MBKM di UPMI diwujudkan melalui beragam bentuk kegiatan pembelajaran di luar program studi dan/atau di luar kampus. Kegiatan-kegiatan tersebut mencakup, antara lain:

1. Magang atau praktik kerja di sekolah, instansi pemerintah, perusahaan, lembaga nirlaba, maupun unit usaha berbasis teknologi dan ekonomi kreatif;
2. Proyek di desa atau komunitas, termasuk proyek pengembangan pendidikan, teknologi tepat guna, dan penguatan kapasitas masyarakat;
3. Kegiatan riset yang melibatkan mahasiswa dalam kelompok penelitian dosen atau mitra eksternal;
4. Asistensi mengajar di satuan pendidikan (sekolah) sebagai bagian dari penguatan kompetensi kependidikan dan karakter Tri Hita Karana;
5. Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik, khususnya yang mengusung tema budaya Bali, pariwisata, lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat berbasis Tri Hita Karana;
6. Kegiatan kewirausahaan yang mendorong lahirnya usaha rintisan di bidang pendidikan, teknologi, pariwisata, ataupun ekonomi kreatif;
7. Bentuk kegiatan lain yang diakui secara nasional dan ditetapkan melalui perjanjian kerja sama atau pedoman akademik UPMI.

Ketiga, untuk menjamin bahwa kegiatan MBKM benar-benar berkontribusi pada pencapaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), UPMI menetapkan mekanisme pengakuan kredit, pembimbingan, dan penjaminan mutu yang jelas dan terdokumentasi. Sebelum melaksanakan aktivitas MBKM, mahasiswa wajib menyusun rencana studi yang disetujui oleh

dosen pembimbing akademik dan koordinator program studi, termasuk pemetaan hubungan antara kegiatan yang diikuti dengan CPL dan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) yang akan dikonversi. Setiap kegiatan MBKM didampingi oleh dosen pembimbing dari UPMI dan, bila diperlukan, pembimbing lapangan dari institusi mitra.

Pengakuan kredit dilakukan melalui proses konversi SKS berdasarkan bukti capaian (laporan, produk, portofolio, sertifikat, logbook, dan instrumen penilaian lain) yang dinilai dengan rubrik yang telah disusun sebelumnya. Proses ini memastikan bahwa aktivitas di luar kampus tetap memiliki kedalaman akademik yang terukur dan sejalan dengan kurikulum OBE. Di sisi lain, penjaminan mutu aktivitas MBKM dilaksanakan melalui standar dan prosedur yang menjadi bagian dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), mulai dari tahap perencanaan program, seleksi mitra, pelaksanaan di lapangan, hingga evaluasi dan perbaikan berkelanjutan.

3.3 Integrasi *Tri Hita Karana* dalam Pendidikan

Integrasi *Tri Hita Karana* dalam penyelenggaraan pendidikan di Universitas PGRI Mahadewa Indonesia merupakan ciri sekaligus kekuatan utama yang membedakan UPMI dari perguruan tinggi lain. Nilai-nilai Parhyangan, Pawongan, dan Palemahan tidak ditempatkan sekadar sebagai muatan tambahan, tetapi diarusutamakan dalam Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), kurikulum, proses pembelajaran, kegiatan kemahasiswaan, serta tata kelola akademik. Dengan demikian, *Tri Hita Karana* menjadi landasan etik, filosofis, dan praktis dalam membentuk profil lulusan yang utuh: menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, berkarakter, serta bertanggung jawab terhadap sesama dan lingkungan.

Pertama, pada dimensi Parhyangan, integrasi *Tri Hita Karana* diwujudkan melalui penguatan spiritualitas, etika, dan integritas dalam CPL dan matakuliah. CPL ranah sikap dirumuskan sedemikian rupa sehingga lulusan diharapkan memiliki keimanan dan ketakwaan sesuai agama masing-masing, berakhlak mulia, jujur, dan bertanggung jawab dengan menjadikan nilai-nilai Parhyangan sebagai rujukan. Nilai ini kemudian dijabarkan dalam sejumlah mata kuliah, baik dalam bentuk mata kuliah umum (misalnya Pendidikan Agama, Etika Profesi, Pendidikan Karakter) maupun mata kuliah khas UPMI yang secara eksplisit mengangkat *Tri Hita Karana* sebagai tema pembelajaran. Di tingkat Rencana Pembelajaran Semester (RPS), dimensi Parhyangan tercermin dalam tujuan pembelajaran, materi terkait etika dan integritas profesional, serta tugas reflektif yang mendorong mahasiswa untuk mengaitkan pengambilan keputusan akademik dan profesional dengan nilai-nilai spiritual dan moral.

Kedua, dimensi Pawongan diintegrasikan melalui pembelajaran berbasis kolaborasi, pelayanan masyarakat, dan pengembangan empati. CPL ranah keterampilan umum dan sikap dirancang untuk menumbuhkan kemampuan bekerja sama, komunikasi efektif, kepemimpinan, toleransi, dan kepedulian sosial. Dalam praktik pembelajaran, dosen mengembangkan model *collaborative learning*, diskusi kelompok, proyek tim lintas program studi, serta penugasan yang menuntut mahasiswa untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat. Kegiatan seperti Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik, asistensi mengajar di sekolah, proyek pemberdayaan desa, dan program pengabdian dosen-mahasiswa dirancang untuk menjadi wahana internalisasi nilai Pawongan, yaitu menghargai martabat sesama, membangun jejaring sosial yang sehat, dan mengembangkan empati terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat. Melalui proses ini, mahasiswa tidak hanya belajar “tentang” masyarakat, tetapi belajar bersama dan untuk masyarakat.

Ketiga, dimensi Palemahan diintegrasikan melalui kurikulum dan proyek mahasiswa yang mengangkat isu lingkungan, konsep green campus, dan prinsip sustainability. CPL, terutama pada ranah pengetahuan dan keterampilan khusus, memasukkan pemahaman tentang pentingnya kelestarian lingkungan dan keberlanjutan sebagai bagian dari kompetensi profesional lulusan, baik di bidang kependidikan maupun sains-teknologi. UPMI mendorong pengembangan mata kuliah dan topik-topik yang berkaitan dengan pendidikan lingkungan, teknologi ramah lingkungan, pengelolaan sampah, energi terbarukan, mitigasi bencana, maupun pemanfaatan sumber daya alam secara bijak.

Dalam konteks proses pembelajaran, mahasiswa difasilitasi untuk mengerjakan proyek-proyek yang berfokus pada isu lingkungan dan green campus, misalnya audit lingkungan kampus, pengembangan media pembelajaran bertema lingkungan, perancangan aplikasi pendukung pengelolaan sampah, atau program penghijauan dan konservasi di sekitar kampus dan desa mitra. Kebijakan tata ruang, pengelolaan sarana prasarana, dan perilaku sehari-hari sivitas akademika juga diarahkan untuk mencerminkan komitmen Palemahan, sehingga kampus menjadi *living laboratory* bagi pendidikan lingkungan dan keberlanjutan.

Melalui integrasi yang sistematis pada ketiga dimensi tersebut, *Tri Hita Karana* tidak hanya hadir sebagai identitas budaya, tetapi menjadi kerangka nilai yang hidup dalam setiap aspek pendidikan di UPMI. Parhyangan membentuk dasar spiritualitas dan integritas, Pawongan membentuk kepekaan sosial dan kemampuan bekerja sama, sementara Palemahan membentuk kesadaran ekologis dan tanggung jawab terhadap keberlanjutan. Ketiganya bersinergi untuk menghasilkan lulusan yang unggul, kompetitif, dan mampu berkontribusi bagi masyarakat dan lingkungan dalam semangat harmoni.

3.4 Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas PGRI Mahadewa Indonesia merupakan kerangka utama untuk memastikan bahwa seluruh penyelenggaraan pendidikan, khususnya bidang pembelajaran, berjalan secara konsisten, terukur, dan berorientasi pada perbaikan berkelanjutan. SPMI diimplementasikan dengan menggunakan siklus PPEPP (Penetapan–Pelaksanaan–Evaluasi–Pengendalian–Peningkatan) pada seluruh standar pendidikan yang berlaku di UPMI, termasuk delapan standar pendidikan yang menjadi fokus roadmap ini. Melalui siklus PPEPP, setiap standar tidak hanya ditetapkan secara normatif, tetapi benar-benar dioperasionalkan, dipantau, dan ditingkatkan kualitasnya dari waktu ke waktu.

Pada tahap Penetapan, universitas menetapkan standar mutu akademik dan nonakademik yang mencakup Standar Kompetensi Lulusan, Isi, Proses, Penilaian, Dosen dan Tenaga Kependidikan, Sarana dan Prasarana, Pengelolaan, serta Pembiayaan Pembelajaran. Standar ini dirumuskan dengan mengacu pada peraturan nasional, visi-misi UPMI, karakter *Tri Hita Karana*, serta kebutuhan pemangku kepentingan. Tahap Pelaksanaan dilakukan oleh unit-unit pelaksana (fakultas, program studi, dan unit terkait) melalui kegiatan pembelajaran, pengelolaan kurikulum, pengelolaan dosen dan tendik, serta pengelolaan sarana prasarana sesuai standar yang telah ditetapkan. Tahap Evaluasi dilaksanakan secara berkala melalui mekanisme audit mutu internal, monitoring, dan survei kepuasan untuk menilai kesenjangan antara standar dan pelaksanaan.

Hasil evaluasi menjadi dasar tahap Pengendalian, yaitu upaya untuk mengoreksi penyimpangan dan memastikan kepatuhan terhadap standar, melalui tindakan korektif dan preventif yang terencana. Selanjutnya, pada tahap Peningkatan, universitas dan program studi melakukan revisi standar, penyempurnaan prosedur, serta inovasi dalam praktik pembelajaran berdasarkan temuan evaluasi dan dinamika kebutuhan internal maupun eksternal. Dengan demikian, siklus PPEPP tidak berhenti pada pemenuhan administratif, tetapi menjadi mekanisme nyata untuk membangun budaya mutu dan perbaikan berkelanjutan di lingkungan UPMI.

Pelaksanaan SPMI di UPMI didukung oleh perangkat dokumen mutu yang lengkap, meliputi Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, dan Formulir Mutu. *Kebijakan Mutu* memuat komitmen universitas terhadap mutu dan arah strategis penjaminan mutu. *Manual Mutu* menjelaskan struktur organisasi, mekanisme kerja, dan prosedur utama SPMI. *Standar Mutu* merinci indikator dan kriteria yang harus dicapai pada masing-masing standar pendidikan, sedangkan *Formulir Mutu* digunakan untuk mendokumentasikan pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut kegiatan mutu. Keempat jenis dokumen ini menjadi rujukan bagi seluruh sivitas akademika dalam merencanakan, melaksanakan, memonitor, dan melaporkan kegiatan pembelajaran.

Dalam implementasinya, SPMI tidak hanya menjadi tanggung jawab pimpinan universitas, tetapi melibatkan berbagai unit penjaminan mutu di semua tingkat. Badan Penjaminan Mutu (BPM) berperan sebagai koordinator utama yang merumuskan kebijakan, menyusun dan memutakhirkan dokumen SPMI, serta melaksanakan audit dan monev mutu di tingkat institusi. Di tingkat fakultas dan program studi, peran penjaminan mutu dilaksanakan oleh Gugus Kendali Mutu (GKM) atau Gugus Penjaminan Mutu (GPM) dan unit prodi. GKM/GPM bertugas mengawal implementasi standar dan prosedur mutu di lingkungannya, mengumpulkan data dan bukti capaian, serta mengkoordinasikan tindak lanjut hasil audit. Sementara itu, unit program studi menjadi pelaksana utama penjaminan mutu pembelajaran, karena berada paling dekat dengan proses akademik sehari-hari. Prodi bertanggung jawab menyusun dan meninjau CPL, kurikulum, RPS, mengatur beban dan kinerja dosen, memonitor pelaksanaan pembelajaran, serta melakukan refleksi dan perbaikan berdasarkan masukan mahasiswa, dosen, dan pemangku kepentingan lainnya. Sinergi antara BPM, GKM/GPM, dan prodi inilah yang menjamin bahwa kualitas pembelajaran di UPMI tidak hanya memenuhi standar nasional, tetapi juga mencerminkan karakter khas UPMI yang berlandaskan Tri Hita Karana.

3.5 Integrasi Sains-Teknologi dan Kearifan Lokal

Pengembangan pendidikan di Universitas PGRI Mahadewa Indonesia menempatkan sains dan teknologi (khususnya Teknologi Informasi dan Komunikasi/TIK, kecerdasan buatan/AI, analitik data, dan *green technology*) dalam dialog yang erat dengan kearifan lokal Bali. Integrasi ini bukan hanya dimaksudkan untuk mengikuti arus perkembangan global, tetapi untuk memastikan bahwa kemajuan teknologi yang diajarkan dan dikembangkan di kampus selalu berpijak pada realitas dan kebutuhan lokal, seperti pariwisata, budaya, desa adat, dan UMKM. Dengan demikian, lulusan UPMI diharapkan mampu menjadi agen perubahan yang tidak hanya menguasai teknologi, tetapi juga memahami konteks sosial-budaya tempat teknologi tersebut diterapkan.

Dalam kerangka kurikulum, UPMI mendorong pengembangan mata kuliah dan proyek pembelajaran yang secara eksplisit menggabungkan TIK, AI, data, dan *green technology* dengan konteks Bali. Pada program-program kependidikan, misalnya, dikembangkan mata kuliah dan tugas proyek yang berfokus pada desain media pembelajaran digital berbasis budaya Bali, penggunaan data untuk peningkatan mutu pembelajaran di sekolah, atau pengembangan model pendidikan lingkungan di desa adat. Pada program studi teknik informatika, proyek mahasiswa dapat diarahkan pada pengembangan aplikasi pendukung *smart tourism*, sistem informasi desa adat, platform pemasaran digital bagi UMKM lokal, atau sistem monitoring lingkungan berbasis IoT yang berkontribusi pada *green tourism* dan keberlanjutan. Proyek-proyek tersebut dapat dilaksanakan dalam kerangka tugas mata kuliah, skripsi, maupun aktivitas MBKM bekerja sama dengan pemerintah daerah, sekolah, desa adat, dan pelaku industri pariwisata.

Lebih jauh, UPMI memposisikan kampus sebagai *living laboratory* tempat nilai Tri Hita Karana dan teknologi terapan dipraktikkan secara nyata. Konsep *living laboratory* ini diwujudkan melalui kebijakan dan praktik sehari-hari di lingkungan kampus: pengelolaan ruang terbuka hijau, sistem pengelolaan sampah dan energi yang berorientasi *green campus*, serta digitalisasi layanan akademik dan administrasi. Mahasiswa dan dosen dilibatkan dalam perancangan, pengujian, dan evaluasi berbagai inovasi teknologi yang diterapkan di kampus, sehingga kampus tidak hanya menjadi tempat belajar tentang teknologi dan kearifan lokal, tetapi juga tempat mencoba dan memperbaiki berbagai solusi nyata.

Dalam perspektif *Tri Hita Karana*, kampus sebagai *living laboratory* berarti menjaga harmoni Parhyangan melalui praktik akademik yang menjunjung tinggi etika dan integritas dalam penggunaan teknologi; memperkuat *Pawongan* melalui kolaborasi antara sivitas akademika, masyarakat sekitar, desa adat, dan pelaku usaha; serta mewujudkan *Palemahan* melalui pengelolaan lingkungan kampus yang berkelanjutan dan berwawasan ekologis. Integrasi sains-teknologi dan kearifan lokal dengan cara demikian diharapkan akan membentuk lulusan UPMI yang cakap teknologi, peka konteks, dan mampu mengembangkan solusi inovatif yang relevan bagi Bali dan Indonesia.

3.6 Keterkaitan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian

Penyelenggaraan tridharma di Universitas PGRI Mahadewa Indonesia dirancang agar pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat tidak berjalan secara terpisah, tetapi saling terkait dan saling menguatkan. Dalam konteks ini, proses pembelajaran tidak hanya dipahami sebagai alih pengetahuan dari dosen kepada mahasiswa, tetapi juga sebagai wahana untuk mengintegrasikan hasil penelitian dan pengalaman pengabdian ke dalam kelas. Dengan demikian, mahasiswa tidak hanya mempelajari konsep secara teoretis, tetapi juga berinteraksi dengan temuan-temuan aktual dan persoalan riil yang dihadapi masyarakat, sesuai dengan karakter UPMI sebagai perguruan tinggi berbasis kependidikan dan sains-teknologi yang berlandaskan *Tri Hita Karana*.

Salah satu bentuk utama integrasi tersebut adalah pengembangan pembelajaran berbasis riset (*research-based teaching*). Dosen didorong untuk membawa hasil penelitian dan aktivitas ilmiahnya ke dalam proses pembelajaran, baik melalui penyusunan materi kuliah, studi kasus, maupun penugasan proyek. Mata kuliah dirancang sedemikian rupa sehingga mahasiswa terbiasa membaca artikel ilmiah, menganalisis data, merumuskan masalah

penelitian sederhana, dan menarik kesimpulan berdasarkan bukti. Dalam konteks kependidikan, misalnya, mahasiswa dilibatkan dalam kajian tindakan kelas, pengembangan model pembelajaran, atau studi tentang perilaku belajar peserta didik. Pada bidang teknik informatika, mahasiswa dapat terlibat dalam pengujian aplikasi, analisis kebutuhan pengguna, maupun evaluasi sistem yang dikembangkan dosen. Dengan pendekatan ini, kemampuan berpikir kritis, literasi sains dan teknologi, serta sikap ilmiah mahasiswa dikembangkan secara sistematis.

Selain itu, UPMI menempatkan tugas akhir/skripsi sebagai salah satu instrumen penting untuk menguatkan keterkaitan antara pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Topik tugas akhir diarahkan untuk terhubung dengan kebutuhan nyata masyarakat serta selaras dengan fokus riset dosen dan agenda pengembangan institusi. Mahasiswa didorong memilih tema yang relevan dengan masalah pendidikan di sekolah, dinamika desa adat, pengembangan pariwisata berbasis budaya, penguatan UMKM, atau isu-isu lingkungan dan keberlanjutan di Bali. Di bidang sains-teknologi, skripsi dapat berfokus pada pengembangan aplikasi, sistem informasi, media pembelajaran, atau teknologi tepat guna yang langsung dapat dimanfaatkan oleh mitra eksternal.

Keterhubungan antara skripsi mahasiswa dan fokus riset dosen juga bertujuan untuk membangun ekosistem penelitian yang produktif dan berkelanjutan. Dosen tidak hanya berperan sebagai pembimbing administratif, tetapi sebagai peneliti yang mengajak mahasiswa bergabung dalam kelompok riset, laboratorium mini, atau proyek pengabdian. Hasil tugas akhir yang berkualitas diupayakan untuk dipublikasikan dalam bentuk artikel ilmiah, prosiding seminar, atau dijadikan dasar pengembangan program pengabdian masyarakat berikutnya. Dengan demikian, satu rangkaian kegiatan mulai dari pembelajaran di kelas, penelitian dosen-mahasiswa, hingga pengabdian kepada masyarakat membentuk siklus yang utuh dan saling memperkaya.

Melalui penguatan pembelajaran berbasis riset dan pengelolaan tugas akhir yang terhubung dengan kebutuhan masyarakat serta fokus riset dosen, UPMI menegaskan komitmennya untuk menghadirkan pendidikan tinggi yang tidak hanya menghasilkan lulusan berpengetahuan, tetapi juga mampu mendiagnosis masalah, merancang solusi berbasis bukti, dan berkontribusi nyata bagi komunitas lokal maupun nasional dalam semangat *Tri Hita Karana*.

BAB IV

ARAH PENGEMBANGAN BERDASARKAN 8 STANDAR PENDIDIKAN

4.1 Standar Kompetensi Lulusan (SKL)

Standar Kompetensi Lulusan (SKL) merupakan titik awal dan sekaligus arah utama pengembangan pendidikan di Universitas PGRI Mahadewa Indonesia. SKL menjadi rujukan bagi seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran, karena di dalamnya dirumuskan kualitas lulusan yang ingin dihasilkan oleh setiap program studi. Dalam konteks UPMI sebagai perguruan tinggi berbasis kependidikan dan sains-teknologi yang berlandaskan *Tri Hita Karana*, penetapan SKL dilakukan dengan menegaskan profil lulusan yang memiliki tiga ciri utama, yaitu: unggul dalam bidang ilmu, berkarakter *Tri Hita Karana*, serta memiliki literasi digital dan kemampuan adaptif.

Pertama, setiap program studi menetapkan profil lulusan yang unggul dalam bidang ilmu sesuai karakter keilmuan masing-masing. Program studi kependidikan diarahkan untuk menghasilkan guru, konselor, dan tenaga kependidikan yang menguasai substansi bidang studi, teori dan praktik pendidikan, serta metodologi pembelajaran yang mutakhir. Program studi sains-teknologi, khususnya di rumpun teknik informatika, menetapkan profil lulusan yang kompeten dalam analisis sistem, pengembangan perangkat lunak, pengelolaan sistem informasi, serta penerapan teknologi digital dalam berbagai sektor. Keunggulan dalam bidang ilmu ini tidak hanya dimaknai sebagai penguasaan teori, tetapi juga kemampuan mengaplikasikan pengetahuan dalam konteks nyata, termasuk di lingkungan Bali dan Indonesia secara umum.

Kedua, profil lulusan UPMI secara eksplisit menegaskan bahwa lulusan harus berkarakter *Tri Hita Karana*, yang tercermin dalam dimensi spiritual, sosial, dan ekologis. Pada dimensi spiritual (*Parhyangan*), lulusan diharapkan memiliki integritas, etika, dan komitmen moral yang kuat, serta menjunjung tinggi nilai-nilai keimanan dan ketakwaan sesuai agama masing-masing. Pada dimensi sosial (*Pawongan*), lulusan diharapkan mampu bekerja sama, berkomunikasi secara efektif, menghargai keberagaman, dan memiliki kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat. Pada dimensi ekologis (*Palemahan*), lulusan diharapkan memiliki kesadaran dan tanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan serta keberlanjutan pembangunan. Ketiga dimensi ini tidak diposisikan sebagai tambahan, tetapi sebagai identitas karakter lulusan UPMI yang terintegrasi dengan kompetensi akademik dan profesional.

Ketiga, UPMI menempatkan literasi digital dan kemampuan adaptif sebagai bagian penting dari profil lulusan di semua program studi. Lulusan diharapkan tidak hanya mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk menunjang pekerjaan, tetapi juga memahami prinsip-prinsip dasar pemanfaatan data, keamanan informasi, dan etika digital. Kemampuan adaptif meliputi kesiapan menghadapi perubahan, kemampuan belajar sepanjang hayat, serta kecakapan memecahkan masalah dalam situasi yang dinamis dan tidak pasti. Hal ini penting mengingat derasnya arus perubahan pada era Revolusi Industri 4.0 dan masyarakat 5.0, di mana lulusan dituntut untuk mampu menyesuaikan diri dengan cepat dan kompetitif.

Untuk mewujudkan profil lulusan tersebut, UPMI menyusun Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) setiap program studi secara sistematis dan terukur. CPL dirumuskan dengan mengacu pada jenjang yang relevan dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), yang mencakup ranah sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus.

Proses penyusunan CPL melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk dosen, mahasiswa, alumni, pengguna lulusan (sekolah, instansi pemerintah, dunia usaha dan dunia industri, desa adat, dan UMKM), serta asosiasi profesi. Melalui proses ini, CPL tidak hanya sesuai dengan standar nasional, tetapi juga relevan dengan kebutuhan nyata di lapangan.

Keterpaduan antara profil lulusan, karakter *Tri Hita Karana*, literasi digital, dan acuan KKNI menjadikan SKL UPMI sebagai landasan strategis bagi pengembangan kurikulum dan pembelajaran. SKL yang dirumuskan dengan cara demikian memastikan bahwa setiap mata kuliah, aktivitas pembelajaran, dan pengalaman mahasiswa di kampus berkontribusi secara nyata terhadap terbentuknya lulusan yang unggul dalam ilmu, berkarakter, dan siap berkiprah di masyarakat maupun dunia kerja.

4.2 Standar Isi Pembelajaran (Kurikulum)

Standar Isi Pembelajaran di Universitas PGRI Mahadewa Indonesia merupakan penjabaran operasional dari Standar Kompetensi Lulusan (SKL) ke dalam struktur kurikulum, bahan kajian, dan mata kuliah yang harus ditempuh mahasiswa. Kurikulum tidak hanya dipahami sebagai daftar mata kuliah, tetapi sebagai rancangan pembelajaran menyeluruh yang mengatur pengalaman belajar mahasiswa agar selaras dengan profil lulusan yang unggul dalam ilmu, berkarakter *Tri Hita Karana*, melek saintek, dan adaptif terhadap perubahan.

Dalam kerangka tersebut, UPMI menyusun kurikulum berbasis *Outcome-Based Education* (OBE) dan Merdeka Belajar–Kampus Merdeka (MBKM). Pendekatan OBE memastikan bahwa setiap komponen kurikulum – mulai dari bahan kajian, metode pembelajaran, hingga penilaian – dirancang untuk mendukung pencapaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL). Sementara itu, kebijakan MBKM memberi ruang bagi mahasiswa untuk memperoleh pengalaman belajar di luar program studi dan di luar kampus, sehingga kurikulum menjadi lebih terbuka, fleksibel, dan relevan dengan kebutuhan industri, dunia kerja, dan masyarakat. Dengan kombinasi OBE–MBKM ini, kurikulum UPMI diarahkan untuk responsif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan dinamika sosial, baik di tingkat lokal Bali maupun nasional.

Relevansi kurikulum dengan kebutuhan industri dan masyarakat diwujudkan melalui keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses perancangan dan peninjauan kurikulum, serta melalui integrasi kasus-kasus nyata dan proyek kolaboratif dalam mata kuliah. Program studi kependidikan, misalnya, merancang kurikulum yang menjawab tantangan mutu pembelajaran di sekolah, penguatan karakter peserta didik, dan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Program studi teknik informatika merancang kurikulum yang mendukung kebutuhan sektor pariwisata, ekonomi kreatif, layanan publik, dan UMKM yang semakin mengandalkan teknologi digital. Dengan demikian, kurikulum tidak hanya memenuhi standar nasional, tetapi juga memiliki keterhubungan langsung dengan konteks kerja dan kebutuhan masyarakat di Bali dan Indonesia.

Sebagai bagian dari penguatan identitas UPMI, kurikulum memuat mata kuliah yang secara khusus dirancang untuk mengintegrasikan *Tri Hita Karana* dan kearifan lokal Bali. Pertama, disediakan mata kuliah Etika dan Profesi berbasis *Tri Hita Karana*, yang mengkaji etika akademik dan profesional, integritas, tanggung jawab sosial, serta penerapan nilai Parhyangan, Pawongan, dan Palemahan dalam praktik keilmuan dan dunia kerja. Mata kuliah

ini diharapkan membentuk landasan moral dan spiritual lulusan, sehingga penguasaan ilmu dan teknologi selalu diiringi dengan komitmen etis.

Kedua, kurikulum juga memuat mata kuliah tentang kearifan lokal dan budaya Bali, baik dalam bentuk mata kuliah umum universitas maupun mata kuliah pilihan/prodi yang menyesuaikan dengan bidang ilmu masing-masing. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diajak memahami struktur sosial, adat istiadat, kesenian, bahasa, serta filosofi hidup masyarakat Bali, termasuk *Tri Hita Karana* sebagai kerangka nilai. Pemahaman ini penting agar lulusan, baik yang bergerak di bidang pendidikan maupun sains-teknologi, mampu merancang solusi dan inovasi yang peka terhadap konteks budaya dan sosial.

Ketiga, sejalan dengan tuntutan era Revolusi Industri 4.0 dan masyarakat 5.0, kurikulum UPMI secara bertahap memperkuat komponen saintek, terutama pada aspek kecerdasan buatan (AI), analitik data, teknologi informasi dan komunikasi (TIK), serta *green technology*. Pada program studi teknik informatika, hal ini tercermin dalam mata kuliah seperti pemrograman lanjut, basis data, kecerdasan buatan, analisis data, jaringan komputer, keamanan informasi, dan pengembangan aplikasi berbasis web/mobile. Pada program studi kependidikan, penguatan saintek dapat berupa mata kuliah media dan teknologi pembelajaran, literasi digital, analisis data pendidikan, maupun pendidikan lingkungan yang memanfaatkan teknologi. Fokus *green technology* diarahkan pada pengembangan teknologi yang mendukung keberlanjutan lingkungan, seperti sistem informasi lingkungan, pengelolaan energi, dan inovasi ramah lingkungan di sektor pariwisata dan pendidikan.

Dengan desain kurikulum yang berbasis OBE–MBKM, relevan dengan industri dan masyarakat, serta mengintegrasikan *Tri Hita Karana*, kearifan lokal Bali, dan penguatan saintek, Standar Isi Pembelajaran di UPMI diharapkan menjadi penghubung yang kokoh antara standar kompetensi lulusan yang ditetapkan dan realitas tantangan yang dihadapi lulusan di lapangan. Kurikulum bukan hanya menjadi instrumen pemenuhan regulasi, tetapi juga menjadi sarana strategis untuk membentuk lulusan yang bermutu, berakar lokal, dan siap bersaing di tingkat nasional.

4.3 Standar Proses Pembelajaran

Standar Proses Pembelajaran di Universitas PGRI Mahadewa Indonesia diarahkan untuk menjamin bahwa kegiatan belajar mengajar berlangsung secara aktif, bermakna, dan berorientasi pada capaian pembelajaran lulusan (CPL). Dalam kerangka ini, UPMI menempatkan *student-centered learning* sebagai pendekatan utama, sehingga mahasiswa tidak lagi diposisikan hanya sebagai penerima pengetahuan, tetapi sebagai subjek yang aktif membangun pemahaman melalui interaksi, eksplorasi, dan refleksi. Berbagai metode pembelajaran aktif, seperti *Problem-Based Learning* (PBL), *project-based learning*, dan *case method*, digunakan secara terencana di dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS). PBL mendorong mahasiswa memecahkan masalah nyata secara sistematis; *project-based learning* mengarahkan mahasiswa menghasilkan produk atau karya yang terukur; sedangkan *case method* membantu mahasiswa menganalisis situasi konkret dan menyusun alternatif solusi. Dengan penerapan metode-metode tersebut, proses pembelajaran diharapkan mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif pada diri mahasiswa.

Sejalan dengan profil lulusan yang berkarakter *Tri Hita Karana* dan peka terhadap konteks lokal, UPMI mendorong integrasi proyek lintas program studi dengan tema-tema yang berakar pada nilai *Tri Hita Karana* dan isu-isu lokal Bali. Proyek lintas prodi ini dapat mengambil bentuk kerja kolaboratif antara mahasiswa kependidikan dan teknik informatika, atau antara berbagai program studi di dalam FKIP. Tema yang diangkat mencakup, misalnya, pengembangan media pembelajaran berbasis budaya Bali, sistem informasi desa adat, program pendidikan lingkungan di kawasan pariwisata, atau pemberdayaan UMKM melalui platform digital. Dalam proyek-proyek tersebut, nilai Parhyangan tercermin dalam etika dan integritas selama proses kerja, Pawongan tampak dalam kerja sama dan pelayanan kepada masyarakat, sementara Palemahan hadir melalui perhatian terhadap dampak lingkungan dan keberlanjutan. Dengan cara ini, proses pembelajaran tidak hanya menghasilkan produk akademik, tetapi juga mendorong mahasiswa mengalami secara langsung makna *Tri Hita Karana* dalam praktik.

Untuk mendukung fleksibilitas dan perluasan akses belajar, UPMI juga mengembangkan dan menerapkan pembelajaran hybrid dan daring melalui pemanfaatan *Learning Management System* (LMS) kampus. LMS digunakan sebagai media untuk mengunggah bahan ajar, mengelola tugas, menyelenggarakan diskusi daring, memberikan umpan balik, serta melakukan penilaian secara transparan dan terdokumentasi. Model pembelajaran hybrid menggabungkan keunggulan tatap muka langsung—yang memungkinkan interaksi emosional dan sosial—dengan keunggulan pembelajaran daring yang lebih fleksibel dalam hal waktu, tempat, dan akses sumber belajar. Dengan pemanfaatan LMS yang optimal, proses pembelajaran dapat berlangsung lebih adaptif terhadap kebutuhan mahasiswa, sekaligus mendukung penguatan literasi digital sebagai salah satu kompetensi utama lulusan.

Secara keseluruhan, Standar Proses Pembelajaran di UPMI dirancang untuk memastikan bahwa setiap pertemuan, tugas, dan pengalaman belajar mahasiswa bukan sekadar pemenuhan jam kuliah, tetapi bagian dari rangkaian pembentukan kompetensi ilmiah, karakter *Tri Hita Karana*, dan kesiapan berperan di masyarakat serta dunia kerja. Implementasi *student-centered learning*, proyek lintas prodi berbasis isu lokal, dan pembelajaran hybrid/daring melalui LMS membentuk satu kesatuan strategis untuk mencapai mutu pembelajaran yang unggul dan relevan.

4.4 Standar Penilaian Pembelajaran

Standar Penilaian Pembelajaran di Universitas PGRI Mahadewa Indonesia dirancang untuk memastikan bahwa hasil belajar mahasiswa diukur secara adil, transparan, dan selaras dengan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL). Dalam kerangka *Outcome-Based Education* (OBE), penilaian tidak lagi hanya mengandalkan ujian tertulis konvensional, tetapi dikembangkan ke arah penilaian otentik yang mampu menangkap kemampuan mahasiswa secara lebih utuh. Penilaian otentik tersebut mencakup penggunaan rubrik yang jelas dan terukur, penyusunan portofolio karya, penilaian terhadap produk (misalnya media pembelajaran, aplikasi, modul, atau karya seni), serta proyek individu maupun kelompok yang terkait dengan konteks nyata. Setiap instrumen penilaian disusun untuk mengukur ketercapaian CPL, CPMK, dan Sub-CPMK, sehingga ada keterkaitan langsung antara tujuan pembelajaran dan bentuk penilaian yang digunakan.

Untuk memperkuat rekam jejak capaian mahasiswa, UPMI mengembangkan dokumentasi capaian belajar dalam bentuk e-portofolio. E-portofolio merupakan kumpulan

bukti capaian mahasiswa yang tersimpan secara sistematis dan digital, meliputi tugas-tugas penting, laporan proyek, produk kreatif, sertifikat kegiatan MBKM, dokumentasi pengabdian masyarakat, hingga refleksi diri. Melalui e-portofolio, perkembangan kompetensi mahasiswa dapat ditelusuri dari waktu ke waktu, baik oleh mahasiswa sendiri, dosen pembimbing akademik, maupun pihak eksternal seperti pengguna lulusan. Selain menjadi alat evaluasi, e-portofolio juga berfungsi sebagai sarana pengembangan diri dan *showcase* profesional yang dapat digunakan mahasiswa ketika memasuki dunia kerja atau melanjutkan studi.

Pelaksanaan penilaian yang berkualitas juga ditopang oleh integrasi sistem penilaian dengan Sistem Informasi Akademik (SIKAD) dan *Learning Management System* (LMS) kampus. Dosen didorong untuk menginput nilai secara langsung melalui SIKAD/LMS, sehingga proses penilaian terdokumentasi dengan baik, mudah dimonitor, dan meminimalkan kesalahan administratif. LMS digunakan untuk mengelola tugas, kuis daring, pengumpulan berkas, serta pemberian umpan balik yang terstruktur kepada mahasiswa. Integrasi ini memungkinkan UPMI untuk memanfaatkan data penilaian sebagai dasar analisis mutu pembelajaran, pemantauan ketercapaian CPL pada tingkat mata kuliah maupun program studi, serta sebagai bahan evaluasi dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).

Dengan penerapan penilaian otentik berbasis CPL, penguatan e-portofolio, dan integrasi dengan SIKAD/LMS, Standar Penilaian Pembelajaran di UPMI diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif dan akurat mengenai kemampuan mahasiswa. Penilaian tidak lagi dipahami semata-mata sebagai akhir dari proses belajar, tetapi sebagai bagian integral dari pembelajaran itu sendiri, yang mendorong mahasiswa untuk terus meningkatkan kualitas diri sesuai dengan profil lulusan yang unggul, kompetitif, dan berkarakter *Tri Hita Karana*.

4.5 Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan di Universitas PGRI Mahadewa Indonesia menempati posisi yang sangat strategis, karena mutu pembelajaran pada akhirnya sangat ditentukan oleh kualitas pendidik dan tenaga pendukungnya. Oleh sebab itu, UPMI menaruh perhatian serius pada peningkatan kualifikasi akademik serta penguatan kompetensi pedagogik dan digital dosen, disertai pengembangan kapasitas tenaga kependidikan yang profesional di bidang layanan akademik, administrasi, dan teknologi informasi. Dosen didorong untuk memenuhi dan melampaui kualifikasi minimal yang ditetapkan peraturan nasional, dengan target peningkatan proporsi dosen bergelar magister dan doktor, serta kepemilikan jabatan akademik yang memadai. Di sisi lain, penguasaan metode pembelajaran aktif, penggunaan teknologi pembelajaran, dan kemampuan merancang penilaian otentik menjadi fokus penguatan kompetensi pedagogik yang terus dibina.

Dalam rangka memastikan bahwa proses pembelajaran benar-benar mencerminkan karakter UPMI, universitas menyelenggarakan berbagai program pelatihan dan pengembangan profesional yang secara khusus menekankan integrasi *Tri Hita Karana* dan pendekatan OBE–MBKM dalam pembelajaran. Pelatihan ini meliputi penyusunan CPL, CPMK, dan RPS berbasis OBE; perancangan tugas dan proyek yang menginternalisasikan nilai Parhyangan, Pawongan, dan Palemahan; serta strategi pembelajaran dan penilaian yang relevan dengan konteks lokal dan kebutuhan nasional. Kegiatan tersebut dapat berbentuk workshop, lokakarya, klinik kurikulum, *peer coaching*, hingga forum berbagi praktik baik antar dosen. Dengan

demikian, dosen tidak hanya cakap secara substansial, tetapi juga mampu menerjemahkan nilai-nilai Tri Hita Karana dan kebijakan MBKM ke dalam praktik pembelajaran sehari-hari. Selain mengandalkan kekuatan internal, UPMI juga mendorong keterlibatan praktisi dan mitra eksternal dalam proses pembelajaran, baik sebagai dosen tamu, mentor, pembimbing lapangan, maupun kolaborator proyek. Praktisi dari sekolah, dinas pendidikan, industri pariwisata, pelaku UMKM, lembaga teknologi, serta organisasi masyarakat diundang untuk berbagi pengalaman dan perspektif praktis yang melengkapi pemahaman teoretis yang diperoleh mahasiswa di kelas. Keterlibatan mitra eksternal ini penting untuk menjaga relevansi kurikulum dengan dunia kerja dan dinamika masyarakat, sekaligus membuka jejaring dan peluang kolaborasi yang lebih luas bagi mahasiswa dan dosen.

Tenaga kependidikan juga menjadi bagian tak terpisahkan dari standar ini. Mereka dibekali dengan kompetensi administrasi akademik, pengelolaan SIAKAD dan LMS, serta layanan kemahasiswaan yang responsif dan ramah. Secara keseluruhan, Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan di UPMI diarahkan untuk membangun ekosistem pembelajaran yang profesional, humanis, dan berkarakter, di mana setiap unsur sivitas akademika berkontribusi nyata dalam mewujudkan lulusan yang unggul, kompetitif, dan berlandaskan *Tri Hita Karana*.

4.6 Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran di Universitas PGRI Mahadewa Indonesia disusun untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan pendidikan didukung oleh lingkungan fisik dan teknologi yang layak, relevan, dan sejalan dengan visi “unggul dan kompetitif berlandaskan *Tri Hita Karana*”. Sarana dan prasarana tidak dipandang sekadar sebagai fasilitas pendukung, tetapi sebagai bagian integral dari proses pembelajaran, internalisasi nilai, dan pembentukan budaya akademik yang sehat. Oleh karena itu, pengembangan infrastruktur pembelajaran di UPMI diarahkan pada pemenuhan standar nasional, sekaligus mengakomodasi kebutuhan pembelajaran modern yang memanfaatkan teknologi dan mengedepankan keberlanjutan lingkungan.

Pertama, UPMI menaruh perhatian pada pengembangan sarana pembelajaran berbasis teknologi, yang mencakup *Learning Management System (LMS)*, *smart classroom*, laboratorium komputer, laboratorium *microteaching*, dan studio multimedia. LMS dikembangkan sebagai platform utama untuk mengelola pembelajaran daring dan hybrid, menyediakan materi ajar, mengumpulkan tugas, memfasilitasi diskusi, dan melakukan penilaian secara terstruktur. *Smart classroom* dilengkapi dengan perangkat TIK seperti proyektor, layar, sistem audio, koneksi internet yang memadai, dan perangkat interaktif lain yang memungkinkan penerapan metode pembelajaran aktif serta pemanfaatan sumber belajar digital. Laboratorium komputer menjadi pusat kegiatan praktikum dan eksplorasi teknologi, terutama bagi program studi teknik informatika dan prodi yang membutuhkan aplikasi TIK dalam pembelajaran.

Laboratorium *microteaching* berfungsi sebagai ruang latihan bagi mahasiswa kependidikan untuk mengembangkan keterampilan mengajar melalui simulasi dan rekaman pembelajaran, sehingga mereka dapat melakukan refleksi diri dan mendapatkan umpan balik yang konstruktif. Studio multimedia disiapkan untuk mendukung produksi bahan ajar digital, media pembelajaran audio-visual, konten kreatif, serta dokumentasi kegiatan akademik dan

kemahasiswaan. Dengan kelengkapan sarana ini, UPMI diharapkan mampu menghadirkan pengalaman belajar yang lebih kaya, interaktif, dan relevan dengan tuntutan literasi digital.

Kedua, sejalan dengan karakter UPMI yang berlandaskan *Tri Hita Karana*, pengembangan sarana dan prasarana juga mencakup fasilitas refleksi spiritual, ruang kolaborasi, dan ruang terbuka hijau. Fasilitas refleksi spiritual diwujudkan dalam bentuk ruang ibadah dan ruang hening yang nyaman dan inklusif, yang dapat digunakan sivitas akademika untuk berdoa, bermeditasi, atau melakukan refleksi nilai. Hal ini merefleksikan dimensi Parhyangan dalam penataan lingkungan kampus. Ruang kolaborasi disediakan sebagai area khusus bagi mahasiswa dan dosen untuk berdiskusi, bekerja kelompok, dan mengembangkan proyek lintas prodi, sehingga memperkuat dimensi Pawongan melalui interaksi sosial yang konstruktif.

Ruang terbuka hijau dirancang sebagai bagian penting dari lingkungan kampus, tidak hanya untuk fungsi estetika, tetapi juga sebagai wahana pembelajaran luar ruang dan ruang rehat yang menyehatkan. Penataan taman, pepohonan, dan area teduh yang nyaman mencerminkan perhatian UPMI terhadap dimensi Palemahan, yakni harmoni dengan lingkungan. Ruang terbuka hijau ini dapat dimanfaatkan untuk kegiatan akademik tertentu, kegiatan kemahasiswaan, maupun program-program kampus hijau.

Ketiga, UPMI mendorong pembangunan infrastruktur pendukung konsep *green campus* dan *smart campus*. *Green campus* diwujudkan melalui pengelolaan energi yang efisien, pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, penggunaan air yang bijak, serta kebijakan pengurangan penggunaan material yang tidak ramah lingkungan. Sementara itu, *smart campus* dikembangkan melalui pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung layanan akademik dan non-akademik, seperti sistem informasi akademik terintegrasi, manajemen aset berbasis TIK, sistem keamanan kampus yang cerdas, dan akses informasi yang mudah bagi sivitas akademika.

Sinergi antara *green campus* dan *smart campus* menjadikan lingkungan UPMI tidak hanya modern dan fungsional, tetapi juga berkelanjutan dan selaras dengan nilai *Tri Hita Karana*. Dengan demikian, Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran di UPMI tidak hanya menjawab kebutuhan teknis penyelenggaraan pendidikan, tetapi juga menjadi media konkret untuk membentuk pengalaman belajar yang holistik yang menggabungkan teknologi, kenyamanan, spiritualitas, sosialitas, dan kepedulian lingkungan dalam satu kesatuan ekosistem kampus.

4.7 Standar Pengelolaan Pembelajaran

Standar Pengelolaan Pembelajaran di Universitas PGRI Mahadewa Indonesia bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh proses pendidikan berjalan secara tertib, terarah, dan akuntabel melalui tata kelola akademik yang jelas, terstruktur, dan berbasis data. Pengelolaan pembelajaran tidak hanya menyangkut aktivitas di ruang kelas, tetapi juga mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pelaporan seluruh kegiatan akademik di tingkat universitas, fakultas, dan program studi. Dalam kerangka ini, hubungan antarlembaga dan pejabat struktural diatur dengan prinsip koordinasi, sinergi, dan tanggung jawab yang jelas.

Secara struktural, pengelolaan pembelajaran dipimpin oleh Rektor sebagai penanggung jawab tertinggi penyelenggaraan pendidikan di tingkat universitas. Rektor menetapkan kebijakan akademik umum, arah pengembangan pendidikan, serta penguatan budaya mutu

yang berlandaskan *Tri Hita Karana*. Wakil Rektor (WR) Bidang Akademik berperan sebagai koordinator utama pelaksanaan kebijakan akademik, termasuk perencanaan kurikulum, kalender akademik, pengembangan pembelajaran, serta pembinaan mutu di seluruh fakultas dan program studi. Di tingkat fakultas, Dekan bertanggung jawab mengimplementasikan kebijakan akademik universitas dalam lingkup fakultas, mengoordinasikan ketua program studi, serta memastikan bahwa proses pembelajaran berjalan sesuai standar.

Program studi (Prodi) menjadi ujung tombak pengelolaan pembelajaran, karena berada paling dekat dengan dosen dan mahasiswa. Ketua program studi mengatur penyusunan dan peninjauan kurikulum, pembagian tugas mengajar, pelaksanaan evaluasi pembelajaran, serta tindak lanjut hasil penjaminan mutu. Di sisi lain, Badan Penjaminan Mutu (BPM) berperan sebagai pengawal mutu pada tingkat institusi, yang menyusun kebijakan dan instrumen SPMI, melakukan monitoring dan evaluasi, serta memberikan rekomendasi perbaikan. BPM bekerja sama dengan Gugus Kendali Mutu atau Gugus Penjaminan Mutu di tingkat fakultas/prodi untuk memastikan bahwa standar pengelolaan pembelajaran benar-benar diimplementasikan dan dievaluasi secara berkala.

Untuk menjaga konsistensi dan kualitas proses akademik, UPMI menetapkan dan mengimplementasikan berbagai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berkaitan langsung dengan pengelolaan pembelajaran. SOP tersebut meliputi, antara lain: SOP penyusunan dan peninjauan kurikulum, yang mengatur tahapan, pihak yang terlibat, dan mekanisme validasi kurikulum berbasis OBE–MBKM; SOP penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS), yang mengarahkan dosen agar merumuskan tujuan pembelajaran, metode, materi, dan penilaian secara selaras dengan CPL dan karakter *Tri Hita Karana*; SOP pelaksanaan MBKM, yang menjelaskan prosedur pengajuan kegiatan, seleksi peserta, penetapan pembimbing, pengakuan kredit, serta pelaporan aktivitas MBKM; dan SOP pelaporan akademik ke PDDikti, yang menjamin bahwa seluruh data akademik—mulai dari registrasi mahasiswa, KRS, KHS, hingga kelulusan—terlapor dengan benar, tepat waktu, dan sesuai ketentuan.

Pengelolaan pembelajaran di UPMI juga mengedepankan integrasi data akademik untuk pengambilan keputusan berbasis bukti (*evidence-based decision making*). Data yang terkumpul dalam Sistem Informasi Akademik (SIKAD), Learning Management System (LMS), hasil tracer study, survei kepuasan, dan audit mutu internal dianalisis untuk mengidentifikasi capaian, kelemahan, dan kebutuhan perbaikan. Informasi ini digunakan oleh Rektor, WR Akademik, Dekan, dan Ketua Prodi untuk mengambil keputusan yang lebih tepat, misalnya dalam penyesuaian kurikulum, perencanaan beban dosen, pengembangan sarana prasarana, atau desain program pelatihan dosen.

4.8 Standar Pembiayaan Pembelajaran

Standar Pembiayaan Pembelajaran di Universitas PGRI Mahadewa Indonesia disusun untuk menjamin bahwa seluruh kegiatan pendidikan, baik teoritis maupun praktis, didukung oleh pendanaan yang memadai, berkelanjutan, dan dikelola secara efisien, transparan, serta akuntabel. Pembiayaan dipahami bukan sekadar aspek administratif, tetapi sebagai prasyarat penting bagi terselenggaranya proses pembelajaran yang bermutu, relevan, dan selaras dengan visi “unggul dan kompetitif berlandaskan *Tri Hita Karana*”. Oleh karena itu, UPMI mengembangkan kerangka pembiayaan yang terencana, terukur, dan berorientasi pada peningkatan kualitas layanan akademik.

Pertama, UPMI menetapkan unit cost per mahasiswa per program studi sebagai dasar perencanaan dan pengelolaan anggaran pendidikan. Perhitungan unit cost mempertimbangkan berbagai komponen, antara lain kebutuhan dosen dan tenaga kependidikan, pengembangan kurikulum dan bahan ajar, penggunaan sarana dan prasarana (ruang kuliah, lab, perpustakaan), biaya operasional pembelajaran, serta kegiatan penjaminan mutu. Dengan mengetahui unit cost yang realistis, universitas dapat menyusun kebijakan pembiayaan yang lebih rasional, menilai kecukupan pendapatan yang bersumber dari SPP dan sumber lain, serta merancang strategi efisiensi tanpa mengorbankan kualitas pembelajaran. Di tingkat program studi, informasi unit cost juga membantu dalam menyusun prioritas program pengembangan yang sejalan dengan kemampuan dan proyeksi pembiayaan.

Kedua, UPMI merancang skema pembiayaan khusus untuk mendukung kegiatan-kegiatan pembelajaran yang memiliki karakteristik dan kebutuhan sumber daya berbeda, seperti praktikum, laboratorium, program MBKM, dan proyek-proyek pembelajaran berbasis *Tri Hita Karana*. Praktikum di laboratorium komputer, *microteaching*, dan studio multimedia memerlukan alokasi biaya untuk pemeliharaan peralatan, lisensi perangkat lunak, bahan habis pakai, serta peningkatan kapasitas teknis. Program MBKM seperti magang, KKN tematik, asistensi mengajar, atau proyek di desa adat memerlukan dukungan pembiayaan untuk transportasi, koordinasi dengan mitra, monitoring, dan dokumentasi.

Demikian pula, proyek-proyek pembelajaran yang secara khusus mengangkat tema Tri Hita Karana, budaya Bali, lingkungan, pariwisata, dan pemberdayaan masyarakat membutuhkan skema pembiayaan yang memungkinkan mahasiswa dan dosen bergerak secara optimal di lapangan. Dengan adanya skema pembiayaan yang jelas dan proporsional, kegiatan-kegiatan tersebut tidak hanya dapat terlaksana, tetapi juga dapat dirancang secara serius sebagai bagian integral dari proses pembelajaran.

Ketiga, untuk menjamin keberlanjutan pembiayaan, UPMI mendorong diversifikasi sumber dana di luar SPP mahasiswa. Selain mengelola SPP secara bijak, universitas aktif mengupayakan hibah dari kementerian, lembaga donor, dan program kompetitif lainnya yang mendukung pengembangan kurikulum, pembelajaran, riset, dan pengabdian kepada masyarakat. UPMI juga membangun kerja sama dengan pemerintah daerah, sekolah, desa adat, industri pariwisata, dan pelaku UMKM untuk menyelenggarakan program-program pelatihan, pendampingan, dan proyek kolaboratif yang sekaligus menjadi sumber pemasukan institusi. Selain itu, universitas mengembangkan unit usaha berbasis keahlian, seperti pusat pelatihan guru, pengembangan sistem informasi, konsultasi pendidikan dan teknologi, serta produksi media pembelajaran. Pendapatan dari unit usaha ini dapat dialokasikan kembali untuk mendukung pembiayaan pembelajaran, terutama untuk inovasi pembelajaran, penguatan fasilitas, serta program beasiswa bagi mahasiswa.

Dengan penetapan unit cost yang jelas, skema pembiayaan khusus untuk kegiatan pembelajaran strategis, dan diversifikasi sumber pendanaan, Standar Pembiayaan Pembelajaran di UPMI diharapkan mampu mendukung terciptanya ekosistem pendidikan yang bermutu, adil, dan berkelanjutan, serta memungkinkan universitas untuk terus mengembangkan program-program pembelajaran yang unggul dan berkarakter *Tri Hita Karana*.

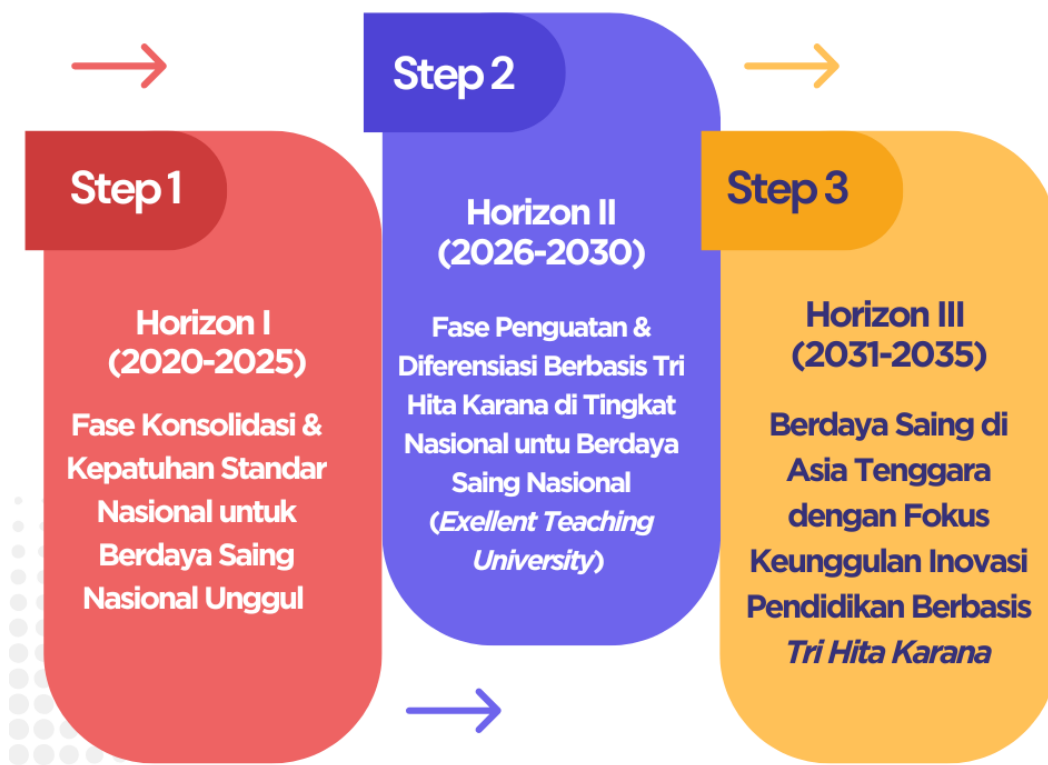
BAB V

ROADMAP PENGEMBANGAN BIDANG PENDIDIKAN 2020–2035

Roadmap Pengembangan Bidang Pendidikan UPMI Bali dibagi menjadi 3 horizon, yakni horizon I, horizon II, dan horizon III.

Roadmap Pendidikan

Universitas PGRI Mahadewa Indonesia



5.1 Horizon I: Fase Konsolidasi & Kepatuhan Standar Nasional untuk Berdaya Saing Nasional Unggul (2020-2025)

Sasaran Umum:

5.1.1 Sasaran Umum 1

“Seluruh program studi merancang dan menjalankan kurikulum yang selaras dengan SN Dikti, MBKM, dan berorientasi capaian pembelajaran.”

a) Tahap Fondasi Kurikulum Berbasis SN Dikti & MBKM (2021–2022)

1. Audit kurikulum seluruh program studi terhadap:
 - a. SN Dikti;
 - b. KKNi;
 - c. kebijakan MBKM (Permendikbud No. 3 Tahun 2020).

2. Penyusunan dan/atau penyempurnaan CPL Prodi sesuai SN Dikti dan KKNI, mencakup:
 - a. sikap;
 - b. pengetahuan;
 - c. keterampilan umum;
 - d. keterampilan khusus;
3. Pemetaan CPL → CPMK → Mata Kuliah untuk menjamin ketercapaian capaian pembelajaran lulusan.
4. Penyesuaian struktur kurikulum prodi agar:
 - a. mendukung implementasi MBKM;
 - b. memungkinkan konversi SKS kegiatan di luar prodi.

b) Tahap Transisi menuju Kurikulum OBE–MBKM (2023–2024)

1. Penyesuaian kurikulum prodi menjadi **kurikulum OBE–MBKM**, selaras dengan:
 - a. kebijakan MBKM;
 - b. tuntutan akreditasi;
 - c. praktik penjaminan mutu internal.
2. Pengesahan kurikulum hasil penyesuaian di tingkat fakultas dan universitas.
3. Penyusunan dan penyesuaian RPS berbasis CPMK dan asesmen capaian pembelajaran.
4. Pelatihan dosen tentang:
 - a. konsep OBE;
 - b. asesmen berbasis capaian pembelajaran;
 - c. metode student-centered learning.
5. Implementasi MBKM terbatas (pilot) pada beberapa program studi.

c) Tahap Konsolidasi Implementasi OBE–MBKM (2025)

1. Evaluasi implementasi kurikulum OBE–MBKM berdasarkan data pembelajaran dan umpan balik pemangku kepentingan.
2. Penyempurnaan minor struktur kurikulum dan RPS berbasis hasil evaluasi.
3. Perluasan implementasi MBKM ke seluruh program studi.
4. Penyusunan laporan capaian kurikulum OBE–MBKM sebagai:
 - a. dokumen SPMI;
 - b. eviden akreditasi;
 - c. dasar perencanaan lanjutan.

5.1.2 Sasaran Umum II

“Nilai Tri Hita Karana sudah tertuang eksplisit dalam visi misi, CPL, kurikulum, dan beberapa mata kuliah kunci.”

a) Pengarusutamaan Kebijakan & Dokumen (2021-2022)

Review dan penyesuaian Visi–Misi Universitas/Fakultas/Prodi agar eksplisit memuat Tri Hita Karana.

1. Integrasi nilai Parhyangan, Pawongan, Palemahan dalam CPL (terutama ranah sikap & keterampilan umum).

2. Identifikasi dan penetapan **mata kuliah kunci universitas** yang akan memuat *Tri Hita Karana* secara eksplisit (mis. Etika Profesi, Kearifan Lokal, Pendidikan Karakter).

b) Implementasi dalam Kurikulum & RPS (2023-2024)

1. Pengembangan/penyesuaian konten mata kuliah yang mengangkat *Tri Hita Karana* dan budaya Bali (tujuan, materi, tugas).
2. Revisi RPS untuk memasukkan CPL/CPMK terkait *Tri Hita Karana* dan indikator penilaiannya.
3. Pelatihan dosen: “Integrasi *Tri Hita Karana* dalam Pembelajaran & Penilaian” (workshop tematik lintas prodi).

c) Pembudayaan & Penguatan Praktik (2025)

1. Pengembangan proyek lintas prodi bertema *Tri Hita Karana* (mis. proyek desa adat, ekowisata, penguatan sekolah berbasis budaya lokal).
2. Dokumentasi dan publikasi praktik baik (*best practices*) integrasi *Tri Hita Karana* dalam pembelajaran, untuk dijadikan model di Horizon II.
3. Survei awal “Indeks Internalisasi *Tri Hita Karana*” di kalangan mahasiswa dan dosen (sebagai baseline untuk penguatan berikutnya).

5.1.3 Sasaran Umum III

“Sistem SPMI bidang pendidikan berjalan di semua prodi dengan siklus PPEPP yang terdokumentasi.”

a) Penataan Sistem Mutu Pendidikan (2021-2022)

1. Penyusunan/penyempurnaan dokumen SPMI UPMI: Kebijakan, Manual Mutu, Standar, dan Formulir khusus bidang pendidikan/pembelajaran.
2. Penetapan standar minimal untuk: CPL, kurikulum, proses pembelajaran, penilaian, sarpras, dosen, dan pembiayaan pembelajaran.
3. Penguatan BPM dan GKM/GPM prodi (SK, uraian tugas, struktur tim mutu).

b) Implementasi Siklus PPEPP (2022-2023)

1. Penerapan siklus PPEPP pada minimal 1–2 standar pendidikan sebagai *pilot* (mis. standar CPL dan proses pembelajaran).
2. Penyusunan dan pelaksanaan instrumen monitoring dan audit internal pada tingkat prodi (form monev perkuliahan, evaluasi RPS, dsb.).
3. Pelatihan bagi ketua prodi, GKM/GPM, dan dosen terkait SPMI & PPEPP.

c) Konsistensi & Pemantapan Budaya Mutu (2025)

1. Perluasan penerapan PPEPP ke seluruh 8 standar pendidikan di semua prodi.
2. Penyusunan laporan mutu tahunan bidang pendidikan berbasis data (SIKAD, LMS, survei, *tracer study*).
3. Penetapan beberapa Indikator Kinerja Utama (IKU) pendidikan sebagai target mutu yang dipantau rutin, misalnya:
 - a) Persentase prodi yang sudah menerapkan kurikulum OBE–MBKM.

- b) Persentase MK yang menggunakan metode *student-centered learning*.
 - c) Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pembelajaran.
4. Integrasi hasil SPMI ke dalam perencanaan anggaran dan renop (mutu → perencanaan → anggaran).

5.1.4 Fokus Program Setiap Standar

Pada Horizon I (2020–2025), fokus program pengembangan bidang pendidikan diarahkan pada pemenuhan dan penguatan delapan standar pendidikan. Program-program ini bersifat dasar (*foundational*), namun strategis untuk memastikan konsolidasi dan kepatuhan terhadap standar nasional.

1) Standar Kompetensi Lulusan (SKL)

Fokus utama pada standar ini **adalah** review dan penataan ulang Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) di seluruh program studi. Setiap prodi melakukan kajian menyeluruh terhadap CPL yang telah ada agar:

- a) Selaras dengan KKNi dan SN Dikti, baik dari sisi level kualifikasi maupun struktur ranah sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus;
- b) Memuat karakter *Tri Hita Karana*, khususnya pada ranah sikap dan keterampilan umum, sehingga lulusan tidak hanya cakap secara ilmiah, tetapi juga berlandaskan harmoni spiritual, sosial, dan ekologis;
- c) Mengacu pada kebutuhan pasar kerja nasional, terutama profil lulusan sebagai guru dan tenaga kependidikan, profesional teknologi informasi, serta wirausaha di bidang pendidikan, teknologi, dan ekonomi kreatif.

2) Standar Isi Pembelajaran (Kurikulum)

Pada standar ini, program prioritas difokuskan pada re-desain kurikulum seluruh program studi agar selaras dengan kebijakan Merdeka Belajar–Kampus Merdeka (MBKM) dan berorientasi pada capaian pembelajaran lulusan. Re-desain kurikulum dilakukan melalui peninjauan menyeluruh terhadap struktur mata kuliah, sebaran SKS, serta relevansi dan kebaruan bahan kajian sesuai kebutuhan lulusan dan perkembangan keilmuan.

Seiring dengan penguatan implementasi MBKM dan perkembangan kebijakan penjaminan mutu pendidikan tinggi, kurikulum berbasis MBKM tersebut selanjutnya ditransformasikan secara bertahap menjadi kurikulum OBE–MBKM, dengan penekanan pada keterukuran capaian pembelajaran, keselarasan CPL–CPMK–mata kuliah, serta sistem asesmen yang berbasis hasil belajar. Dengan demikian, penerapan OBE diposisikan sebagai penguatan dan penyempurnaan dari kurikulum MBKM yang telah berjalan, bukan sebagai perubahan yang bersifat abrupt.

Dalam proses re-desain tersebut, universitas menetapkan Mata Kuliah Wajib Universitas (MKWU) yang secara eksplisit mengangkat tema *Tri Hita Karana* dan kearifan lokal Bali, sehingga seluruh mahasiswa, tanpa memandang program studi, memperoleh pemahaman yang seragam mengenai nilai dasar, identitas kelembagaan, dan konteks lokal UPMI.

Selain itu, kurikulum mengalokasikan minimal 20–30 SKS untuk aktivitas MBKM—seperti magang, KKN, riset, asistensi mengajar, proyek di desa adat, kewirausahaan, dan bentuk kegiatan lainnya sebagai perwujudan hak belajar mahasiswa di luar program studi dan di luar kampus, yang dalam kerangka OBE–MBKM juga dikaitkan secara langsung dengan pencapaian CPL dan profil lulusan.

3) Standar Proses Pembelajaran

Fokus pengembangan proses pembelajaran adalah penerapan *student centered learning* secara konsisten. Dosen didorong menggunakan metode diskusi, tugas proyek, dan studi kasus yang relevan dengan konteks lokal dan nasional dalam setiap RPS. Target awal ditetapkan bahwa minimal 30% mata kuliah di setiap program studi menerapkan *project-based learning* dengan tema-tema yang terkait dengan Bali, *Tri Hita Karana*, dan isu nasional, seperti pendidikan, pariwisata, lingkungan, dan pengembangan UMKM. Selain itu, universitas memperkuat penggunaan LMS sebagai platform utama pembelajaran daring dan hybrid, sehingga proses pembelajaran menjadi lebih fleksibel, terdokumentasi, dan mendukung literasi digital mahasiswa.

4) Standar Penilaian Pembelajaran

Dalam standar ini, fokus program diarahkan pada penataan sistem penilaian agar selaras dengan OBE. Setiap dosen menyusun rubrik penilaian berbasis CPL, CPMK, dan Sub-CPMK, sehingga penilaian menjadi lebih terukur, objektif, dan transparan. UPMI mendorong penerapan penilaian otentik melalui penugasan proyek, portofolio, dan produk karya yang dapat mencerminkan kompetensi nyata mahasiswa. Lebih lanjut, nilai dan komponen penilaian diintegrasikan ke dalam SIAKAD/LMS, sehingga proses penginputan nilai, pelaporan, dan analisis hasil belajar dapat dilakukan secara lebih sistematis dan mendukung penjaminan mutu.

5) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Program prioritas pada standar ini diarahkan pada penguatan kapasitas dosen dan tenaga kependidikan dalam mendukung implementasi kebijakan pembelajaran nasional. Pada tahap awal, UPMI memfokuskan pengembangan kompetensi pada pemahaman dan pelaksanaan MBKM, termasuk pengelolaan pembelajaran di luar program studi, konversi SKS, serta pemanfaatan teknologi pembelajaran.

Seiring dengan penguatan praktik MBKM dan meningkatnya tuntutan penjaminan mutu, pengembangan kapasitas tersebut ditingkatkan secara bertahap menuju pendekatan OBE–MBKM. UPMI menyelenggarakan pelatihan tentang OBE–MBKM dan integrasi nilai *Tri Hita Karana* dalam RPS, sehingga dosen memiliki kemampuan merancang pembelajaran yang tidak hanya selaras dengan kebijakan MBKM, tetapi juga berbasis capaian pembelajaran yang terukur serta mencerminkan karakter dan kearifan lokal.

Di samping itu, peningkatan kompetensi teknologi informasi dan komunikasi (TIK), pengembangan media pembelajaran digital, serta asesmen berbasis capaian dan penilaian otentik menjadi fokus utama pelatihan. Upaya ini ditujukan agar dosen dan tenaga kependidikan siap mendukung pembelajaran berbasis teknologi, serta mampu mengoptimalkan pemanfaatan LMS dan SIAKAD dalam kerangka OBE–MBKM secara efektif dan berkelanjutan.

6) Standar Sarana dan Prasarana

Pada Horizon I, prioritas diarahkan pada penguatan sarana prasarana dasar pembelajaran, khususnya LMS, laboratorium komputer, laboratorium microteaching, dan studio multimedia. Penguatan ini bertujuan memastikan bahwa praktikum, latihan mengajar, dan produksi media pembelajaran dapat berlangsung dengan fasilitas yang memadai. Di sisi lain, UPMI juga melakukan penataan ruang terbuka hijau dan menyediakan fasilitas ibadah/ruang refleksi, sebagai pengejawantahan nilai *Tri Hita Karana* dalam lingkungan fisik kampus, sehingga sivitas akademika dapat belajar dan beraktivitas dalam suasana yang mendukung harmoni spiritual, sosial, dan ekologis.

7) Standar Pengelolaan Pembelajaran

Fokus utama standar ini adalah penguatan aspek tata kelola dan penjaminan mutu melalui penyusunan dan pengesahan dokumen SPMI akademik yang lengkap, meliputi kebijakan, manual, standar, dan formulir yang secara khusus mengatur bidang pendidikan dan pembelajaran. Di samping itu, UPMI menetapkan dan mengimplementasikan SOP penyusunan kurikulum, penyusunan RPS, pelaksanaan MBKM, penilaian, dan pelaporan ke PDDikti. SOP ini menjadi pedoman kerja yang baku untuk memastikan bahwa setiap proses akademik berjalan sesuai standar nasional dan kebijakan internal, serta terdokumentasi dengan baik untuk kebutuhan audit dan akreditasi.

8) Standar Pembiayaan Pembelajaran

Pada standar ini, program prioritas adalah penyusunan unit cost per mahasiswa per program studi, sebagai dasar perencanaan anggaran dan evaluasi kecukupan pembiayaan pendidikan. Perhitungan unit cost membantu universitas melihat secara lebih jelas kebutuhan riil dana untuk pembelajaran di masing-masing prodi. Selain itu, UPMI mengembangkan skema pembiayaan khusus untuk mendukung laboratorium, praktikum, dan kegiatan MBKM dasar, sehingga aktivitas-aktivitas ini tidak terkendala oleh keterbatasan dana operasional rutin. Dengan perencanaan pembiayaan yang lebih terstruktur, UPMI dapat menjaga keberlangsungan dan kualitas penyelenggaraan pembelajaran pada Horizon I dan menjadi pondasi yang kuat bagi pengembangan pada Horizon II dan III.

5.2 Horizon II: Fase Penguatan & Diferensiasi Berbasis *Tri Hita Karana* di Tingkat Nasional untu Berdaya Saing Nasional (*Exellent Teaching University*) (2026–2030)

Sasaran Umum:

5.2.1 Sasaran Umum 1

“UPMI diakui sebagai salah satu PT unggulan berbasis kependidikan dan saintek berlandaskan *Tri Hita Karana* di tingkat nasional.”

a) Konsolidasi Mutu & Penguatan Citra Akademik (2026-2027)

1. Pencapaian dan konsolidasi akreditasi

- a) Memastikan sebagian besar prodi meraih atau mempertahankan akreditasi minimal “Baik Sekali”, dan mulai menyiapkan prodi unggulan menuju “Unggul”.

- b) Penyusunan peta jalan akreditasi institusi menuju peringkat lebih tinggi di siklus berikutnya.
2. **Dokumentasi dan standardisasi praktik baik (*best practices*)**
 - a) Memperkuat penerapan kurikulum OBE-MBKM pada seluruh prodi di UPMI.
 - b) Menerapkan praktik baik pembelajaran, kurikulum OBE-MBKM, integrasi *Tri Hita Karana*, dan SPMI di tingkat prodi/fakultas.
 - c) Menyusun panduan internal (buku praktik baik) sebagai rujukan bersama.
 3. **Penguatan kegiatan ilmiah berskala nasional**
 - a) Menyelenggarakan seminar, lokakarya, atau konferensi nasional bertema pendidikan, saintek, dan *Tri Hita Karana*.
 - b) Memperkuat jurnal ilmiah UPMI agar menjadi rujukan nasional di bidang kependidikan dan saintek berbasis kearifan lokal.
- b) Diferensiasi & Posisi UPMI di Tingkat Nasional (2028-2029)**
1. **Branding nasional UPMI**
 - a) Mengembangkan **tagline/brand akademik nasional**, misalnya: “*Kampus Unggul dan Kompetitif Berlandaskan Tri Hita Karana*”.
 - b) Partisipasi aktif dalam forum nasional, seperti APTISI, asosiasi prodi, ataupun organisasi PGRI untuk mempromosikan model UPMI.
 2. **Perluasan jaringan kerja sama nasional**
 - a) Menandatangani dan mengimplementasikan MoU/MoA dengan kampus lain, asosiasi profesi, lembaga riset, dan pemerintah daerah sebagai mitra strategis.
 - b) Menjadi rujukan/mitra pelatihan bagi sekolah, guru, dan lembaga lain dalam bidang pendidikan berbasis teknologi dan *Tri Hita Karana*.
 3. **Penguatan sistem *tracer study* dan survei pengguna lulusan**
 - a) Menyelenggarakan *tracer study* nasional secara rutin dan memanfaatkan hasilnya untuk menunjukkan daya saing lulusan.
 - b) Menggunakan hasil *tracer study* sebagai materi promosi dan sebagai bahan perbaikan kurikulum.
- c) Pengukuhan Status “Unggulan Nasional” (2030)**
1. **Pencapaian prodi unggulan nasional**
 - a) Mendorong beberapa prodi kunci (mis. pendidikan, TI) memiliki pengakuan nasional sebagai prodi bermutu (akreditasi unggul, penghargaan nasional, atau menjadi rujukan kebijakan).
 2. **Model UPMI sebagai referensi nasional**
 - a) Menyusun dan menerbitkan model/kerangka “Pendidikan Berbasis *Tri Hita Karana*” yang dapat diadopsi PT lain.

- b) Dosen UPMI berperan sebagai narasumber nasional dalam topik *Tri Hita Karana*, edutech, smart tourism, green education, dan sejenisnya.

3. Penguatan reputasi melalui penghargaan dan pengakuan

- a) Mengupayakan keikutsertaan dan perolehan penghargaan nasional (bidang pendidikan, inovasi, pengabdian) yang memperkuat status UPMI sebagai PT unggulan berbasis *Tri Hita Karana*.

5.2.2 Sasaran Umum II

“Implementasi MBKM meluas ke mayoritas mahasiswa.”

a) Penguatan Sistem & Skala Implementasi (2026)

1. Penguatan Tata Kelola MBKM

- a. Pembentukan dan/atau penguatan UPT/Pusat MBKM sebagai unit koordinatif lintas program studi.
- b. Penyusunan dan penetapan Pedoman MBKM Universitas yang memuat:
 - alur pelaksanaan;
 - persyaratan peserta;
 - skema konversi SKS;
 - peran dosen pembimbing;
 - mekanisme penjaminan mutu MBKM.

2. Perluasan Program dan Mitra MBKM

Penambahan variasi program MBKM, antara lain:

- magang di instansi nasional dan industry;
- asistensi mengajar di sekolah mitra;
- riset kolaboratif dosen–mahasiswa;
- proyek desa adat dan KKN tematik berbasis *Tri Hita Karana*;
- kewirausahaan dan inovasi sosial;
- Perluasan kerja sama dengan mitra nasional dan regional untuk meningkatkan daya tampung mahasiswa MBKM.

3. Target Awal Cakupan Mahasiswa

Penetapan target kinerja:

minimal 30% mahasiswa aktif per angkatan telah mengikuti sekurang-kurangnya satu bentuk kegiatan MBKM.

b) Pemantapan Kualitas & Mekanisme Konversi (2027-2028)

1. Standarisasi dan Penyempurnaan Konversi SKS

- a. Penyempurnaan prosedur konversi kegiatan MBKM menjadi mata kuliah setara berbasis:
 - CPL dan CPMK,
 - rubrik penilaian,

- eviden capaian pembelajaran.
- a. Integrasi penuh data MBKM ke dalam:
- KRS,
 - KHS,
 - SIAKAD dan LMS universitas.

2. Penguatan Peran dan Kapasitas Dosen Pembimbing

Pelatihan berkelanjutan bagi dosen pembimbing akademik dan pembimbing lapangan terkait:

- supervisi MBKM,
- asesmen berbasis capaian,
- pendampingan mahasiswa di luar kampus.

3. Monitoring, Evaluasi, dan Perbaikan Berkelanjutan

Penyusunan dan penerapan instrumen monev MBKM meliputi:

- kepuasan mahasiswa,
- kepuasan mitra,
- ketercapaian kompetensi,
- dampak sosial dan pengabdian.
- Pemanfaatan hasil monev sebagai dasar perbaikan desain dan kemitraan MBKM.

4. Peningkatan Cakupan Mahasiswa

Target capaian bertahap:

- 2027: $\geq 50\%$ mahasiswa
 - 2028: $\geq 60\text{--}70\%$ mahasiswa
- mengikuti minimal satu program MBKM selama masa studi.

c) Institusionalisasi & Budaya Akademik (2029–2030)

1. MBKM sebagai Arus Utama Kurikulum

- a. Program MBKM menjadi **jalur utama pencapaian CPL** di sebagian besar program studi.
- b. Kurikulum dirancang fleksibel dengan beberapa *pathway* MBKM (akademik, profesional, kewirausahaan, pengabdian).

2. Penguatan Keterhubungan dengan Dunia Kerja & Pembangunan

Peningkatan proporsi MBKM yang terhubung langsung dengan:

- dunia usaha dan industri,
- program prioritas pemerintah,
- proyek pengabdian masyarakat berskala nasional,
- pengembangan desa adat berbasis *Tri Hita Karana*.

3. Cakupan Mahasiswa Mayoritas

Target akhir Horizon II:

≥ 80% mahasiswa telah mengikuti program MBKM selama 1–3 semester sebelum lulus.

4. MBKM sebagai Identitas dan Daya Saing Institusi

MBKM diposisikan sebagai:

- kekuatan diferensiasi UPMI,
- bagian dari budaya akademik,
- indikator utama mutu pembelajaran dan lulusan.

5.2.3 Sasaran Umum III

“Pembelajaran semakin terhubung dengan praktik baik nasional, dunia kerja, dan kebutuhan masyarakat.”

a) Tahap I – Fondasi & Pemetaan Sistematis (2026)

1. Pemetaan praktik baik nasional

- a. Identifikasi dan kajian praktik baik pembelajaran di perguruan tinggi rujukan nasional, khususnya:
 - Implementasi OBE–MBKM,
 - *Project-based learning*, *case method*, dan *experiential learning*,
 - Pemanfaatan edutech dan AI-assisted learning.
- b. Analisis kesesuaian praktik tersebut dengan:
 - Visi UPMI,
 - Karakter lulusan kependidikan dan sains-teknologi,
 - Nilai Tri Hita Karana sebagai diferensiasi.

2. Pemetaan kebutuhan dunia kerja dan masyarakat

- a. Kajian kebutuhan kompetensi pada:
 - Sekolah mitra (SMA/SMK),
 - Desa adat dan komunitas lokal,
 - Industri pariwisata, UMKM, dan ekonomi kreatif,
 - Pemerintah daerah dan lembaga sosial.
- b. Penyusunan peta kebutuhan kompetensi lulusan berbasis masalah nyata dan konteks lokal–nasional.

3. Penguatan jejaring mitra pembelajaran

- a. Penjajakan dan penandatanganan MoU/MoA dengan:
 - Praktisi pendidikan nasional,
 - Industri dan dunia usaha,
 - NGO, komunitas budaya, dan lingkungan.
- b. Penetapan mitra strategis sebagai co-designer pembelajaran (bukan hanya lokasi magang).

b) Tahap II – Integrasi dalam Kurikulum & Pembelajaran (2027)

1. Integrasi praktik baik ke kurikulum dan RPS

- a. Penyesuaian **CPL dan CPMK** agar selaras dengan:
 - Praktik baik nasional,
 - Kebutuhan dunia kerja dan masyarakat.
- b. Revisi RPS untuk memasukkan:
 - Studi kasus nyata,
 - Proyek berbasis mitra,
 - Permasalahan lokal dan nasional.

2. Implementasi pembelajaran berbasis proyek dan kasus nyata

- a. Penerapan **project-based learning** dan *case method* berbasis:
 - Sekolah mitra,
 - Desa adat,
 - UMKM,
 - Instansi pemerintah.
- b. Pelibatan mitra sebagai:
 - Narasumber,
 - Co-teacher,
 - Penilai eksternal proyek mahasiswa.

c) Tahap III – Perluasan & Pemantapan Implementasi (2028–2029)

1. Perluasan pembelajaran kolaboratif lintas prodi

- a. Pengembangan proyek lintas prodi bertema:
 - Pendidikan berbasis budaya,
 - Smart village dan digitalisasi desa adat,
 - Pariwisata berkelanjutan,
 - *Green education* dan lingkungan.
- b. Kolaborasi dosen lintas keilmuan dan mitra eksternal.

2. Penguatan keterhubungan dengan dunia kerja

- a. Penyelarasan proyek pembelajaran dengan:
 - Standar kompetensi profesi,
 - Kebutuhan industri dan sektor publik.
- b. Pengembangan *career-linked learning* dan *work-based learning*.

3. Monitoring dan evaluasi dampak pembelajaran

- a. Evaluasi capaian pembelajaran berbasis:
 - Kepuasan mitra,
 - Dampak sosial dan lingkungan,
 - Kesiapan kerja dan soft skills mahasiswa.
- b. Penggunaan hasil evaluasi untuk penyempurnaan desain pembelajaran.

d) Tahap IV – Institusionalisasi & Praktik Unggul (2030)

1. Pembelajaran terhubung sebagai identitas UPMI

- a. Penetapan pembelajaran berbasis praktik baik nasional dan kebutuhan masyarakat sebagai **ciri khas UPMI**.
- b. Integrasi penuh ke dalam:
 - Sistem kurikulum,
 - SPMI,
 - Kebijakan akademik universitas.

2. Dokumentasi dan diseminasi praktik unggul

- a. Penyusunan *best practices* pembelajaran terhubung:
 - Modul,
 - Panduan implementasi,
 - Model pembelajaran kontekstual.
- b. Publikasi pada:
 - Jurnal nasional,
 - Seminar pendidikan,
 - Forum MBKM nasional.

3. Kontribusi pada kebijakan dan pengembangan pendidikan nasional

Keterlibatan UPMI sebagai:

- Rujukan praktik baik pembelajaran kontekstual,
- Mitra pemerintah daerah dan nasional,
- Pusat pengembangan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan *Tri Hita Karana*.

5.2.4 Fokus Program Setiap Standar Horizon II: Fase Penguatan & Diferensiasi Berbasis *Tri Hita Karana* di Tingkat Nasional untu Berdaya Saing Nasional (*Exellent Teaching University*) (2026–2030)

Pada Horizon II, fokus program per standar bergeser dari sekadar konsolidasi & kepatuhan menjadi pendalaman mutu dan diferensiasi keunggulan UPMI sebagai PT kependidikan–saintek berlandaskan *Tri Hita Karana*.

1) Standar Kompetensi Lulusan (SKL)

Fokus pengembangan pada tahap ini diarahkan pada penguatan profil lulusan sekaligus diferensiasi keunggulan UPMI di tingkat nasional. Upaya tersebut dilakukan melalui penyempurnaan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) seluruh program studi secara berbasis data dan kebutuhan nyata dunia kerja. Review CPL dilaksanakan dengan memanfaatkan hasil tracer study nasional, survei pengguna lulusan, serta analisis perkembangan dan tuntutan kompetensi terkini, sehingga profil lulusan yang dirumuskan benar-benar relevan, adaptif, dan berdaya saing.

Berdasarkan proses tersebut, UPMI menajamkan profil lulusan—baik sebagai guru, konselor, maupun profesional di bidang teknologi informasi—agar memiliki keunggulan kompetitif di tingkat nasional sekaligus berakar kuat pada nilai *Tri Hita Karana*. Nilai tersebut ditegaskan sebagai karakter pembeda lulusan UPMI, yang tercermin dalam dimensi Parhyangan (integritas, etika, dan spiritualitas profesi), Pawongan (kepemimpinan,

kemampuan bekerja sama, dan empati sosial), serta Palemahan (kepedulian terhadap lingkungan dan pembangunan berkelanjutan).

Selanjutnya, diferensiasi keunggulan lulusan diperkuat melalui penambahan kompetensi spesifik yang bersifat khas dan kontekstual, sesuai bidang keilmuan masing-masing program studi. Dalam bidang kependidikan, lulusan diarahkan menjadi guru yang melek teknologi sekaligus peka terhadap budaya dan kearifan lokal. Pada bidang teknologi informasi, lulusan diproyeksikan sebagai profesional TI yang kompeten mendukung pengembangan *smart tourism*, *edutech*, dan *green technology*. Sementara itu, pada ranah kewirausahaan, lulusan dipersiapkan menjadi wirausahawan pendidikan dan pelaku ekonomi kreatif berbasis potensi lokal, yang mampu mengintegrasikan inovasi, nilai budaya, dan keberlanjutan. Dengan strategi ini, profil lulusan UPMI tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki identitas kuat dan relevan dengan kebutuhan nasional.

2) Standar Isi Pembelajaran (Kurikulum)

Fokus pengembangan kurikulum pada tahap ini diarahkan pada pendalaman implementasi OBE–MBKM serta penguatan konsentrasi khas UPMI sebagai diferensiasi institusional. UPMI secara strategis mengembangkan konsentrasi atau peminatan berbasis keunggulan institusi, seperti *Edutech dan Media Pembelajaran Digital*, *Smart Tourism and Hospitality Technology*, serta *Green Education and Environmental Studies*. Peminatan ini dirancang untuk menjawab kebutuhan nyata masyarakat Bali dan nasional, sekaligus memperkuat identitas UPMI sebagai perguruan tinggi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, pariwisata berkelanjutan, dan isu lingkungan.

Selanjutnya, integrasi nilai *Tri Hita Karana* dengan isu-isu strategis nasional diperkuat melalui penyesuaian dan pengembangan mata kuliah. Nilai keharmonisan manusia dengan Tuhan, sesama, dan alam diartikulasikan secara kontekstual dalam isu keberlanjutan, literasi dan karakter, digitalisasi pendidikan, serta pengembangan ekonomi kreatif. Pendekatan ini memastikan bahwa capaian pembelajaran lulusan tidak hanya unggul secara akademik dan profesional, tetapi juga berakar pada nilai kearifan lokal dan tanggung jawab sosial.

Di sisi lain, optimalisasi pelaksanaan MBKM dalam kurikulum menjadi perhatian utama. Desain kurikulum disempurnakan agar alokasi 20–30 SKS MBKM benar-benar terisi oleh program yang bermutu, relevan, dan berdampak, seperti magang nasional, riset terapan, KKN tematik, serta proyek berbasis desa adat. Untuk menjamin konsistensi dan mutu akademik lintas program studi, UPMI mengembangkan mata kuliah konversi atau *mata kuliah pembungkus MBKM* yang dirancang secara rapi, terstandar, dan selaras dengan capaian pembelajaran lulusan. Dengan demikian, implementasi OBE–MBKM tidak bersifat administratif semata, tetapi menjadi instrumen strategis dalam membentuk lulusan yang kompeten, berkarakter, dan siap berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan.

3) Standar Proses Pembelajaran

Fokus pengembangan pembelajaran pada tahap ini diarahkan pada penerapan praktik baik berskala nasional melalui pembelajaran berbasis proyek serta penguatan kolaborasi lintas program studi dan mitra. Strategi ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa proses pembelajaran tidak hanya berorientasi pada penguasaan konsep, tetapi juga pada

pengembangan keterampilan aplikatif, kolaboratif, dan kontekstual yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja.

Salah satu langkah utama adalah peningkatan intensitas penerapan *project-based learning* (PjBL) pada mata kuliah inti. Universitas menargetkan sekurang-kurangnya 50% mata kuliah inti menerapkan PjBL dengan konteks lokal maupun nasional. Proyek pembelajaran dirancang sebagai proyek wajib yang secara langsung menghubungkan mahasiswa dengan lingkungan nyata, seperti masyarakat, sekolah mitra, desa adat, UMKM, serta instansi pemerintah. Melalui pendekatan ini, mahasiswa memperoleh pengalaman belajar autentik sekaligus berkontribusi nyata bagi pemecahan masalah di lapangan.

Selain itu, pembelajaran kolaboratif diperkuat melalui proyek lintas program studi dan kemitraan eksternal. Proyek lintas prodi dilaksanakan secara reguler dengan tema-tema strategis berbasis Tri Hita Karana, seperti *Smart Village*, *Green School*, dan *Digitalisasi Desa Adat*, yang memungkinkan integrasi berbagai disiplin ilmu dalam satu konteks proyek bersama. Untuk meningkatkan relevansi dan kualitas pembelajaran, universitas juga mendorong praktik co-teaching dengan praktisi nasional, termasuk guru berprestasi, pelaku industri teknologi informasi, pelaku pariwisata, serta organisasi nonpemerintah di bidang lingkungan.

Di sisi lain, pemanfaatan teknologi pembelajaran diperkuat melalui pendalaman penggunaan *Learning Management System* (LMS) dan penerapan model pembelajaran hybrid secara sistematis. LMS tidak lagi diposisikan sekadar sebagai repositori materi, melainkan sebagai ruang utama interaksi akademik, yang mencakup diskusi, pengelolaan tugas proyek, kuis, serta proses penilaian. Model pembelajaran hybrid diterapkan secara matang dengan mengombinasikan tatap muka, pembelajaran daring sinkron, dan daring asinkron pada sebagian besar mata kuliah. Pendekatan ini diharapkan mampu meningkatkan fleksibilitas, efektivitas, dan kualitas pembelajaran, sekaligus memperkuat kesiapan mahasiswa menghadapi ekosistem pembelajaran digital di tingkat nasional.

4) Standar Penilaian Pembelajaran

Fokus pengembangan pada tahap ini diarahkan pada pemantapan penilaian otentik dan e-portofolio sebagai ciri pembelajaran berstandar nasional. UPMI menetapkan penilaian otentik sebagai standar baku, khususnya pada mata kuliah inti, dengan mewajibkan penggunaan kombinasi penilaian berbasis proyek, produk, dan portofolio. Seluruh instrumen penilaian diselaraskan dengan profil lulusan unggulan nasional agar capaian pembelajaran mencerminkan kompetensi nyata, kontekstual, dan terukur.

Selanjutnya, e-portofolio dikembangkan sebagai bukti capaian pembelajaran sekaligus sarana branding lulusan. E-portofolio dijadikan persyaratan kelulusan yang memuat karya terbaik mahasiswa, terintegrasi dengan tugas akhir/skripsi dan aktivitas MBKM. Portofolio digital ini berfungsi sebagai *showcase* kompetensi yang dapat diakses oleh dunia kerja dan mitra, sehingga meningkatkan daya saing lulusan UPMI.

Di sisi mutu akademik, data penilaian dimanfaatkan secara sistematis untuk penguatan standar nasional. Hasil belajar yang terekam dalam SIAKAD dan LMS dianalisis untuk memantau ketercapaian CPL, mengevaluasi efektivitas pembelajaran, serta menjadi basis pelaporan mutu dan akreditasi. Dengan pendekatan ini, penilaian tidak hanya berfungsi sebagai evaluasi hasil belajar, tetapi juga sebagai instrumen strategis peningkatan mutu berkelanjutan.

5) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Fokus pengembangan pada tahap ini diarahkan pada penguatan peran dosen sebagai rujukan nasional dan penggerak utama inovasi pembelajaran. UPMI mendorong peningkatan kualifikasi akademik dosen melalui percepatan studi doktoral serta penguatan jenjang jabatan fungsional menuju Lektor Kepala dan Profesor, khususnya pada program studi kunci yang menjadi unggulan institusi.

Selanjutnya, pengembangan profesional dosen dilaksanakan secara berkelanjutan melalui pelatihan lanjutan yang menekankan desain pembelajaran inovatif berbasis riset, pemanfaatan teknologi pendidikan, serta integrasi nilai *Tri Hita Karana*. Untuk memicu inovasi dari bawah, UPMI menginisiasi skema hibah internal, seperti *Hibah Inovasi Pembelajaran Tri Hita Karana*, sebagai ruang eksperimentasi dan pengembangan praktik baik pembelajaran.

UPMI juga memfasilitasi peran dosen sebagai narasumber dan rujukan nasional, dengan mendorong keterlibatan aktif dalam pelatihan dan forum nasional di bidang OBE–MBKM, edutech, dan pengembangan pembelajaran berbasis kearifan lokal. Di sisi pendukung, peran tenaga kependidikan diperkuat dalam kerangka smart campus, melalui pelatihan intensif pengelolaan SIAKAD, LMS, dan sistem digital lainnya agar layanan akademik semakin cepat, akurat, dan responsif terhadap kebutuhan sivitas akademika.

6) Standar Sarana dan Prasarana

Fokus pengembangan diarahkan pada pematangan smart–green learning environment UPMI yang berdaya saing nasional sebagai ekosistem pembelajaran terpadu berbasis teknologi dan keberlanjutan. Peningkatan kapasitas dan kualitas sarana prasarana TIK dilakukan melalui perluasan jaringan *smart classroom* dan laboratorium komputer di seluruh program studi, sehingga pembelajaran digital, hibrida, dan berbasis proyek dapat terlaksana secara optimal. Selain itu, UPMI mengembangkan studio multimedia terintegrasi yang mampu memproduksi konten digital berkualitas nasional, seperti MOOC, video pembelajaran, dan podcast, untuk mendukung pembelajaran terbuka dan perluasan dampak institusi.

Sebagai wujud identitas institusional, kampus diposisikan sebagai etalase implementasi nilai *Tri Hita Karana*, melalui penataan ruang terbuka hijau yang representatif, termasuk taman tematik dan sudut refleksi akademik, serta pengembangan area kolaborasi mahasiswa–dosen–mitra yang nyaman, inklusif, dan fungsional. Pada saat yang sama, penguatan infrastruktur green dan smart campus dilakukan dengan mengembangkan sistem monitoring energi, pengelolaan sampah berbasis teknologi, serta pemanfaatan sistem digital untuk meningkatkan efisiensi operasional dan mendukung keberlanjutan lingkungan kampus secara berkelanjutan.

7) Standar Pengelolaan Pembelajaran

Fokus pengembangan diarahkan pada penguatan tata kelola perguruan tinggi berbasis data dan benchmarking nasional sebagai fondasi peningkatan mutu berkelanjutan. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dimatangkan hingga menjadi budaya institusional, dengan siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan) yang berjalan secara rutin dan terdokumentasi melalui laporan mutu tahunan. Laporan ini tidak

hanya bersifat administratif, tetapi digunakan secara aktif sebagai dasar pengambilan keputusan dalam rapat pimpinan dan rapat program studi.

Sejalan dengan itu, dikembangkan dashboard mutu akademik terintegrasi berskala nasional yang memadukan data dari SIAKAD, LMS, *tracer study*, survei kepuasan pengguna, data MBKM, dan sumber relevan lainnya. Dashboard ini dimanfaatkan secara strategis untuk mendukung penyesuaian kurikulum, pengelolaan beban kerja dosen, serta penetapan prioritas pengembangan sarana dan prasarana. Untuk memperkuat posisi kelembagaan, UPMI juga melaksanakan benchmarking dan kolaborasi mutu dengan perguruan tinggi lain yang telah unggul di tingkat nasional melalui skema dua arah, yaitu belajar dari praktik baik sekaligus berbagi inovasi yang telah dikembangkan UPMI.

8) Standar Pembiayaan Pembelajaran

Fokus pengembangan diarahkan pada penguatan sistem pembiayaan yang kokoh, kreatif, dan mendukung diferensiasi keunggulan UPMI. Pembiayaan program unggulan berbasis nilai *Tri Hita Karana* dan implementasi MBKM diperkuat melalui alokasi anggaran khusus untuk proyek pembelajaran inovatif, kegiatan MBKM skala nasional, serta pengembangan model dan media pembelajaran yang berdampak langsung pada mutu akademik dan relevansi lulusan.

Untuk menjamin keberlanjutan, UPMI melakukan diversifikasi dan peningkatan porsi pendanaan non-SPP dengan mengoptimalkan akses terhadap hibah nasional, seperti hibah pengembangan kurikulum dan pembelajaran, *matching fund*, serta skema pendanaan kompetitif lainnya. Di samping itu, diperluas kerja sama berbayar dengan berbagai mitra melalui layanan pelatihan guru, pengembangan sistem informasi pendidikan, serta pendampingan sekolah dan desa, sehingga keahlian akademik dosen dapat dikonversi menjadi nilai ekonomi institusional. Selanjutnya, profesionalisasi unit usaha berbasis keahlian dikembangkan secara terencana agar menghasilkan pendapatan berkelanjutan yang secara langsung mendukung pembiayaan pembelajaran, inovasi akademik, dan penguatan daya saing institusi.

5.3 Horizon III: Berdaya Saing di Asia Tenggara dengan Fokus Keunggulan Inovasi Pendidikan (Innovation- Based University) (2031–2035)

5.3.1 Sasaran Umum I

“UPMI menjadi rujukan regional Asia Tenggara dalam inovasi pendidikan dan saintek yang berlandaskan *Tri Hita Karana*.”

a) Tahap I – Konsolidasi Nasional & Penyiapan Daya Saing Regional (2031–2032)

1. Penguatan mutu akademik berstandar regional

- a. Memastikan program studi strategis (kependidikan dan TI) mempertahankan akreditasi Unggul nasional serta mulai menyesuaikan diri dengan benchmark akreditasi regional/ASEAN.
- b. Penyelarasan kurikulum OBE–MBKM dengan:
 - *ASEAN Qualifications Reference Framework (AQRF)*,
 - praktik baik inovasi pendidikan di Asia Tenggara.

- c. Finalisasi dokumen unggulan (kurikulum, RPS, SPMI, MBKM, inovasi pembelajaran) dalam format model rujukan yang siap diadaptasi lintas negara.

2. Kurasi praktik unggul UPMI berkelas regional

- a. Inventarisasi dan kurasi praktik unggul UPMI dalam:
 - Inovasi pembelajaran,
 - Integrasi Tri Hita Karana,
 - *Green campus*, *smart campus*, dan *AI-assisted learning*.
- b. Penyusunan “UPMI Education Innovation Model” sebagai *flagship model* yang:
 - Kontekstual Bali–Indonesia,
 - Relevan dengan isu regional Asia Tenggara (keberlanjutan, multikulturalisme, digitalisasi).

3. Penguatan SDM berorientasi regional

- a. Menyiapkan dosen dan pengelola akademik sebagai:
 - *Regional trainers* dan *academic ambassadors*,
 - Fasilitator pelatihan OBE–MBKM, inovasi pembelajaran, dan pendidikan berbasis nilai lokal.
- Peningkatan kompetensi bahasa asing dan literasi internasional SDM akademik.

b) Tahap II – Diseminasi Regional & Jejaring Asia Tenggara (2033–2034)

1. Diseminasi model inovasi pendidikan UPMI di Asia Tenggara

- a. Penyelenggaraan:
 - *Regional workshops*, *short courses*, dan *academic clinics* tentang inovasi pendidikan berbasis Tri Hita Karana.
- b. Program pendampingan (*mentoring*) pengembangan kurikulum dan pembelajaran inovatif bagi PT mitra di Asia Tenggara.

2. Penguatan pusat rujukan regional Tri Hita Karana

- a. Transformasi Pusat Studi *Tri Hita Karana* menjadi:
 - *Regional Center for Local Wisdom–Based Education and Sustainability*.
- b. Pengembangan produk unggulan berbahasa internasional:
 - Buku referensi,
 - Modul digital,
 - MOOC,
 - Open Educational Resources (OER).

3. Penguatan publikasi dan reputasi regional

- a. Peningkatan publikasi internasional bereputasi (ASEAN-indexed, Scopus).
- b. Penyelenggaraan konferensi regional Asia Tenggara secara periodik.
- c. Pemosisian jurnal UPMI sebagai:
 - jurnal nasional terakreditasi kuat,
 - menuju jurnal bereputasi regional.

Tahap III – Pengakuan & Kepemimpinan Regional (2035)

1. Pengakuan formal sebagai rujukan Asia Tenggara

- a. Pengakuan formal dari:
 - asosiasi perguruan tinggi Asia Tenggara,
 - jaringan pendidikan regional.
- b. Penetapan UPMI sebagai:
 - *host institution* kegiatan akademik regional (konferensi, simposium, *summer school*).

2. Kontribusi pada kebijakan dan agenda pendidikan regional

- a. Keterlibatan aktif dosen UPMI dalam:
 - tim ahli,
 - *policy forum*,
 - jaringan riset pendidikan Asia Tenggara.
- b. Kontribusi UPMI dalam penyusunan:
 - panduan pendidikan berbasis kearifan lokal dan keberlanjutan di tingkat regional.

3. Replikasi model UPMI di Asia Tenggara

- a. Pengembangan *ASEAN Network of Local Wisdom–Based Universities* dengan UPMI sebagai inisiator.
- b. Dokumentasi dampak regional UPMI sebagai rujukan inovasi pendidikan.
- c. Penyusunan laporan akhir Horizon III sebagai dasar perencanaan jangka panjang pasca-2035.

5.3.2 Sasaran Umum II

“UPMI aktif dan diakui dalam jejaring Asia Tenggara pengembangan kurikulum, pembelajaran inovatif, serta Tri Hita Karana sebagai model pendidikan karakter dan keberlanjutan.”

a) Tahap I – Konsolidasi Nasional & Penyiapan Jejaring Regional (2031–2032)

1. Penguatan peran UPMI dalam jejaring nasional strategis

- a. Keterlibatan aktif dan berkelanjutan UPMI dalam:
 - asosiasi prodi nasional,
 - forum rektor/dekan,
 - komunitas akademik bidang pendidikan, saintek, dan kebudayaan.
- b. Pengiriman delegasi dosen dan pimpinan UPMI secara sistematis untuk:
 - mempresentasikan inovasi pembelajaran,
 - berbagi praktik integrasi *Tri Hita Karana*,
 - membangun reputasi akademik institusi.

2. Penyiapan jejaring tematik menuju level Asia Tenggara

- a. Penguatan jejaring nasional bertema:
 - pendidikan karakter,

- kearifan lokal,
- keberlanjutan lingkungan.
- b. Penyiapan *concept note* jejaring regional Asia Tenggara berbasis:
 - nilai lokal (*Tri Hita Karana*),
 - isu regional (*sustainability, multicultural education*).
- c. Penawaran UPMI sebagai initiator atau sekretariat awal jejaring tematik.

3. Kolaborasi riset dan pengembangan kurikulum lintas kampus

- a. Pengembangan riset kolaboratif nasional sebagai:
 - dasar publikasi bereputasi,
 - modal masuk ke konsorsium riset Asia Tenggara.
- b. Fokus riset pada:
 - inovasi kurikulum,
 - OBE–MBKM,
 - pendidikan karakter dan keberlanjutan.

Tahap II – Ekspansi Jejaring & Kontribusi Regional (2033–2034)

1. Keterlibatan aktif dalam jejaring Asia Tenggara

- a. Keikutsertaan UPMI dalam:
 - ASEAN university networks,
 - forum pendidikan Asia Tenggara,
 - konsorsium riset dan pembelajaran regional.
- b. Partisipasi dosen UPMI sebagai:
 - pembicara,
 - peneliti kolaboratif,
 - fasilitator pelatihan regional.

2. Diseminasi model *Tri Hita Karana* pada level regional

- a. Penyelenggaraan:
 - *regional short courses*,
 - *summer schools*,
 - *capacity building programs* bertema *Tri Hita Karana*, pendidikan karakter, dan sustainability.
- b. Pengembangan bahan ajar dan modul dwibahasa/berbahasa Inggris untuk audiens Asia Tenggara.

3. Pengembangan bank sumber belajar regional

- a. Penyusunan bank modul, studi kasus, dan perangkat ajar berbasis:
 - *Tri Hita Karana*,
 - isu lokal–regional Asia Tenggara.
- b. Distribusi melalui:
 - platform OER,
 - MOOC regional,

- jejaring kampus mitra Asia Tenggara.

Tahap III – Pengukuhan Peran Regional (2035)

1. UPMI sebagai simpul jejaring Asia Tenggara

- UPMI diakui sebagai:
 - pusat rujukan regional untuk pendidikan berbasis kearifan lokal,
 - *hub* kolaborasi inovasi pendidikan dan keberlanjutan.
- Jejaring Asia Tenggara memiliki:
 - agenda rutin,
 - program bersama,
 - mekanisme koordinasi yang difasilitasi UPMI.

2. Standardisasi dan replikasi pendekatan Tri Hita Karana

- Pendekatan Tri Hita Karana dikembangkan menjadi:
 - *regional framework* pendidikan karakter dan keberlanjutan.
- Model UPMI direkomendasikan dalam:
 - forum akademik Asia Tenggara,
 - dokumen kerja sama regional,
 - kebijakan pendidikan lintas negara.

3. Keberlanjutan jejaring dan regenerasi kepemimpinan

- Penyiapan dosen muda dan peneliti UPMI sebagai:
 - *future regional leaders*,
 - penggerak jejaring Asia Tenggara.
- Penyusunan **roadmap pasca-2035** berbasis posisi UPMI sebagai aktor regional inovasi pendidikan.

5.3.3 Fokus Program Setiap Standar Horizon III: Berdaya Saing di Asia Tenggara dengan Fokus Keunggulan Inovasi Pendidikan (*Innovation-Based University*) (2031–2035)

Pada Horizon III, arah pengembangan pembelajaran UPMI tidak lagi berhenti pada pemenuhan standar atau penguatan internal, melainkan berorientasi pada diseminasi regional, replikasi lintas negara, dan pengakuan UPMI sebagai rujukan Asia Tenggara dalam bidang kependidikan dan saintek. Seluruh standar pembelajaran dikembangkan sebagai model inovasi pendidikan yang kontekstual, berkelanjutan, dan relevan dengan tantangan kawasan Asia Tenggara, dengan *Tri Hita Karana* sebagai fondasi nilai spiritual, sosial, dan ekologis.

1) Standar Kompetensi Lulusan (SKL)

Profil lulusan UPMI diposisikan sebagai model kompetensi lulusan tingkat Asia Tenggara yang mengintegrasikan keunggulan akademik, inovasi, dan karakter keberlanjutan. Profil lulusan dirumuskan secara komprehensif dan dipublikasikan dalam forum regional sebagai contoh pendidikan berbasis nilai spiritual–sosial–ekologis yang relevan dengan konteks multikultural Asia Tenggara. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) direview secara

berkala dengan mengacu pada praktik terbaik regional dan kecenderungan global, tanpa kehilangan identitas *Tri Hita Karana*. Model SKL dan CPL UPMI kemudian didiseminasikan melalui pelatihan, pendampingan, dan kerja sama kurikulum dengan perguruan tinggi di kawasan Asia Tenggara.

2) Standar Isi Pembelajaran (Kurikulum)

Kurikulum UPMI diarahkan untuk menjadi kurikulum rujukan tingkat Asia Tenggara yang menampilkan keunggulan inovasi pendidikan berbasis integrasi saintek, kebijakan Merdeka Belajar–Kampus Merdeka (MBKM), pemanfaatan teknologi dan inovasi digital, serta penguatan kearifan lokal *Tri Hita Karana*. Kurikulum ini tidak hanya berfungsi sebagai pedoman internal, tetapi juga dirancang sebagai model terbuka dan adaptif yang dapat dijadikan acuan oleh perguruan tinggi di kawasan Asia Tenggara dengan konteks sosial, budaya, dan kebutuhan pembangunan yang sejenis.

Struktur kurikulum UPMI disusun dalam bentuk model package atau curriculum framework, yang mencakup kerangka kompetensi lulusan, capaian pembelajaran, peta mata kuliah, strategi pembelajaran, serta contoh implementasi MBKM. Paket kurikulum ini memungkinkan perguruan tinggi mitra untuk mengadopsi atau mengadaptasi sebagian maupun keseluruhan komponen kurikulum sesuai dengan kebutuhan lokal dan kebijakan nasional masing-masing negara, tanpa kehilangan prinsip utama inovasi dan keberlanjutan.

Sebagai penguat diferensiasi regional, UPMI mengembangkan mata kuliah unggulan—seperti *Tri Hita Karana*, teknologi pendidikan (*edutech*), *smart tourism*, *green education*, dan budaya Bali—sebagai mata kuliah jejaring regional. Mata kuliah tersebut dirancang agar dapat diikuti oleh mahasiswa lintas perguruan tinggi dan lintas negara melalui skema pertukaran mahasiswa, pembelajaran daring kolaboratif, maupun sistem kredit bersama. Dengan demikian, kurikulum UPMI berfungsi sebagai wahana pertukaran pengetahuan, nilai, dan praktik baik pendidikan di kawasan Asia Tenggara.

Selain itu, UPMI mengambil peran aktif dalam forum, konsorsium, dan jejaring pengembangan kebijakan kurikulum regional, baik melalui asosiasi perguruan tinggi, kerja sama lintas negara, maupun forum akademik internasional. Dalam konteks ini, UPMI secara konsisten membawa perspektif kearifan lokal *Tri Hita Karana* sebagai sumber inovasi pendidikan, terutama dalam isu pendidikan karakter, keberlanjutan lingkungan, dan keseimbangan antara kemajuan teknologi dan nilai kemanusiaan. Peran strategis ini menegaskan posisi UPMI sebagai institusi yang tidak hanya adaptif terhadap dinamika regional, tetapi juga berkontribusi dalam membentuk arah pengembangan kurikulum pendidikan tinggi di Asia Tenggara.

3) Standar Proses Pembelajaran

Proses pembelajaran di UPMI pada Horizon III diarahkan untuk menjadi praktik baik (*best practices*) tingkat Asia Tenggara melalui pengembangan dan implementasi model pembelajaran inovatif yang berorientasi pada proyek, studi kasus, dan pemecahan masalah nyata yang relevan dengan konteks regional. Pembelajaran dirancang untuk menjawab tantangan bersama negara-negara Asia Tenggara, seperti pendidikan karakter, transformasi digital, keberlanjutan lingkungan, pariwisata berkelanjutan, dan penguatan komunitas lokal,

sehingga mahasiswa tidak hanya menguasai konsep akademik, tetapi juga memiliki kepekaan sosial dan kemampuan problem solving lintas budaya.

Sebagai ciri pembeda, UPMI merumuskan model pembelajaran berbasis *Tri Hita Karana* secara sistematis dan terstandar, mencakup prinsip, sintaks pembelajaran, peran dosen dan mahasiswa, strategi asesmen, serta contoh implementasi kontekstual. Model ini didokumentasikan dalam bentuk panduan, modul, dan media digital, kemudian disebarluaskan sebagai rujukan pembelajaran kontekstual dan berkelanjutan bagi perguruan tinggi di kawasan Asia Tenggara yang memiliki karakteristik multikultural dan tantangan pembangunan serupa.

UPMI juga mengembangkan pembelajaran kolaboratif lintas negara melalui berbagai skema, seperti proyek bersama mahasiswa lintas perguruan tinggi Asia Tenggara, pertukaran mahasiswa berbasis proyek (*project-based mobility*), serta pemanfaatan virtual collaborative learning yang memungkinkan kolaborasi akademik tanpa batas geografis. Pendekatan ini tidak hanya memperluas wawasan global mahasiswa, tetapi juga melatih keterampilan komunikasi lintas budaya, kerja tim internasional, dan pemanfaatan teknologi pembelajaran digital.

Untuk memperkuat diseminasi dan pengakuan regional, praktik-praktik terbaik pembelajaran UPMI dipresentasikan dan dipamerkan melalui forum akademik, expo pembelajaran inovatif, dan konferensi pendidikan tingkat Asia Tenggara, dengan UPMI berperan sebagai inisiator, tuan rumah, dan kurator konten. Melalui strategi ini, UPMI tidak hanya menunjukkan kapasitas internal dalam inovasi pembelajaran, tetapi juga berkontribusi aktif dalam membangun ekosistem pembelajaran tinggi yang kolaboratif, berkelanjutan, dan berdaya saing di kawasan Asia Tenggara.

4) Standar Penilaian Pembelajaran

Pada Horizon III, dosen UPMI diposisikan secara strategis sebagai agen inovasi, pelatih, dan narasumber regional di kawasan Asia Tenggara. UPMI secara sistematis memfasilitasi dosen untuk berperan aktif dalam pengembangan dan diseminasi inovasi pembelajaran, khususnya pada bidang OBE–MBKM, pemanfaatan edutech, pembelajaran berbasis proyek dan kasus, serta integrasi kearifan lokal sebagai sumber nilai dan konteks pembelajaran. Dosen didorong untuk terlibat sebagai fasilitator dan pakar dalam pelatihan regional, lokakarya internasional, program peningkatan kapasitas dosen lintas negara, serta forum akademik Asia Tenggara. Melalui peran tersebut, dosen UPMI tidak hanya mentransfer praktik baik, tetapi juga berkontribusi dalam pembentukan arah kebijakan dan diskursus pendidikan tinggi regional, terutama terkait pendidikan karakter dan keberlanjutan.

Sejalan dengan itu, UPMI memimpin dan mengoordinasikan komunitas praktik dosen lintas negara yang berfokus pada penguatan pendidikan karakter, keberlanjutan lingkungan, dan inovasi pembelajaran kontekstual Asia Tenggara. Pengembangan karier dosen diarahkan pada penguatan kepemimpinan akademik regional, antara lain melalui peningkatan jabatan akademik, keterlibatan dalam asosiasi profesi internasional, kepemimpinan proyek kolaboratif regional, serta peran sebagai reviewer, editor, dan pakar di forum Asia Tenggara. Di sisi lain, tenaga kependidikan diperkuat perannya sebagai pengelola sistem pembelajaran dan layanan akademik internasional, termasuk pengelolaan LMS lintas negara, dukungan mobilitas mahasiswa dan dosen, serta pengembangan repositori digital praktik baik UPMI. Sinergi antara dosen dan tenaga kependidikan ini menjadi fondasi penting bagi terbangunnya jejaring akademik Asia Tenggara yang berkelanjutan dan berdaya saing.

5) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Sarana dan prasarana UPMI pada Horizon III dikembangkan secara terintegrasi sebagai living laboratory inovasi pendidikan berbasis *Tri Hita Karana* yang memiliki daya saing di tingkat Asia Tenggara. Kampus UPMI diarahkan tidak hanya sebagai ruang belajar internal, tetapi sebagai destinasi akademik regional untuk studi banding, pertukaran gagasan, dan pembelajaran berbasis pengalaman. Pengembangan fasilitas pembelajaran menekankan prinsip keberlanjutan, keterpaduan teknologi, dan nilai kearifan lokal, sehingga kampus menjadi representasi nyata harmonisasi Parhyangan, Pawongan, dan Palemahan dalam konteks pendidikan tinggi modern. Melalui pendekatan ini, UPMI menampilkan praktik konkret pengelolaan green campus dan smart campus yang relevan dengan tantangan pendidikan dan lingkungan kawasan Asia Tenggara.

Lebih lanjut, fasilitas pembelajaran seperti *smart classroom*, laboratorium kependidikan dan saintek, ruang hijau edukatif, *microteaching laboratory*, serta studio multimedia dan digital learning dikembangkan sebagai zona demonstrasi (*demonstration zones*) yang dapat dikaji, diuji, dan direplikasi oleh perguruan tinggi lain di kawasan regional. Infrastruktur pusat studi dan pusat inovasi *Tri Hita Karana* diperkuat sebagai simpul utama diseminasi pengetahuan, pengembangan model pembelajaran, dan kolaborasi riset regional. Pusat-pusat ini berfungsi sebagai ruang temu akademik Asia Tenggara, mendukung konferensi, program pelatihan, residensi akademik, serta pengembangan produk inovasi pendidikan yang berorientasi pada keberlanjutan dan karakter lokal, sehingga memperkuat posisi UPMI sebagai rujukan regional dalam inovasi pendidikan.

6) Standar Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana UPMI pada Horizon III dikembangkan secara terencana dan terpadu sebagai living laboratory inovasi pendidikan berbasis *Tri Hita Karana* yang memiliki daya saing di tingkat Asia Tenggara. Kampus UPMI tidak hanya berfungsi sebagai ruang akademik internal, tetapi diposisikan sebagai destinasi akademik regional untuk kegiatan studi banding, benchmarking, dan pertukaran praktik baik dalam pembelajaran inovatif, pengelolaan green campus, dan penerapan smart campus. Pengembangan infrastruktur kampus mengedepankan prinsip keberlanjutan, pemanfaatan teknologi digital, serta integrasi nilai Parhyangan, Pawongan, dan Palemahan, sehingga lingkungan kampus menjadi representasi nyata harmonisasi antara manusia, alam, dan nilai spiritual dalam pendidikan tinggi modern.

Lebih lanjut, fasilitas pembelajaran, laboratorium kependidikan dan saintek, ruang hijau edukatif, serta studio digital dan multimedia dikembangkan sebagai zona demonstrasi (*demonstration zones*) yang berfungsi sebagai wahana pembelajaran kontekstual dan inovatif. Zona-zona ini dirancang untuk dapat dikaji, diuji, dan direplikasi oleh perguruan tinggi lain di kawasan Asia Tenggara sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing. Infrastruktur pusat studi dan pusat inovasi UPMI diperkuat sebagai simpul diseminasi pengetahuan dan kolaborasi regional, mendukung kegiatan riset bersama, pengembangan model pembelajaran, pelatihan akademik, serta forum ilmiah lintas negara. Dengan penguatan sarana dan prasarana tersebut, UPMI menegaskan perannya sebagai rujukan regional dalam pengembangan inovasi pendidikan yang berkelanjutan dan berakar pada kearifan lokal.

7) Standar Pengelolaan Pembelajaran

Pengelolaan pembelajaran UPMI pada Horizon III diarahkan menjadi model tata kelola akademik regional yang menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, adaptivitas, dan mutu berkelanjutan. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UPMI tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengendalian internal, tetapi dikembangkan sebagai praktik baik (best practice) pengelolaan mutu pendidikan tinggi yang terdokumentasi secara sistematis dan mudah direplikasi. Seluruh siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan) diintegrasikan dengan nilai Tri Hita Karana sehingga tata kelola akademik tidak hanya berorientasi pada kepatuhan standar, tetapi juga pada pembentukan budaya mutu yang berkarakter, inklusif, dan berkelanjutan. Model SPMI ini diposisikan sebagai rujukan yang relevan bagi perguruan tinggi di kawasan Asia Tenggara dengan konteks sosial-budaya yang beragam namun memiliki tantangan mutu yang serupa.

Sejalan dengan itu, UPMI mengembangkan sistem informasi mutu dan dashboard akademik terintegrasi sebagai contoh pengelolaan data pembelajaran, capaian CPL, kinerja dosen, serta profil lulusan secara real-time dan berbasis bukti. Sistem ini dirancang untuk mendukung pengambilan keputusan strategis, pelaporan mutu, dan peningkatan berkelanjutan, sekaligus menjadi sarana pembelajaran bagi perguruan tinggi mitra. Melalui skema pendampingan, pelatihan, dan kerja sama regional, UPMI berperan aktif membantu perguruan tinggi lain dalam membangun dan memperkuat tata kelola pembelajaran yang efektif. Dengan demikian, UPMI tidak hanya mengelola mutu pembelajaran secara internal, tetapi juga berkontribusi nyata dalam penguatan ekosistem mutu pendidikan tinggi Asia Tenggara.

8) Standar Pembiayaan Pembelajaran

Pembiayaan pembelajaran UPMI pada Horizon III diarahkan menjadi model pembiayaan berkelanjutan yang mendukung penguatan inovasi pendidikan dan peran rujukan regional di kawasan Asia Tenggara. Skema pembiayaan dirancang secara terintegrasi dengan memadukan sumber internal dan eksternal, meliputi SPP mahasiswa, hibah regional dan internasional, kerja sama strategis dengan industri dan pemerintah, serta dukungan dari mitra akademik lintas negara. Integrasi berbagai sumber pendanaan ini memungkinkan UPMI menjaga stabilitas pembiayaan pembelajaran sekaligus meningkatkan fleksibilitas dalam mengembangkan program inovatif, seperti pembelajaran berbasis proyek regional, kolaborasi riset pendidikan, dan penguatan MBKM lintas negara.

Lebih lanjut, model pembiayaan pembelajaran UPMI didokumentasikan secara sistematis sebagai praktik baik pengelolaan keuangan pendidikan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi mutu, sehingga dapat dijadikan rujukan oleh perguruan tinggi lain di Asia Tenggara. Unit usaha akademik UPMI—seperti pusat pelatihan dan sertifikasi, layanan konsultasi pendidikan, pengembangan sistem pembelajaran digital, serta produksi media dan konten pembelajaran—diperkuat sebagai penopang utama keberlanjutan finansial institusi. Melalui penguatan unit usaha ini, pembiayaan pembelajaran tidak hanya bergantung pada sumber konvensional, tetapi juga menjadi instrumen strategis untuk memperluas jejaring, meningkatkan reputasi regional, dan memastikan keberlanjutan peran UPMI sebagai pusat inovasi pendidikan berbasis kearifan lokal di Asia Tenggara.

Tabel 1. Matriks Roadmap Horizon I (2020–2025)
Fase Konsolidasi & Kepatuhan Standar Nasional untuk Berdaya
Saing Nasional Unggul

No	Standar Pendidikan	Fokus Pengembangan Horizon I	Strategi / Program Kunci	Luaran / Indikator Capaian
1	Standar Kompetensi Lulusan (SKL)	Penataan ulang CPL prodi	1) Review CPL berbasis KKNI & SN Dikti 2) Integrasi nilai Tri Hita Karana dalam ranah sikap & KU 3) Penyesuaian profil lulusan dengan kebutuhan kerja nasional	1) Dokumen CPL prodi selaras SN Dikti 2) Profil lulusan berkarakter THK 3) CPL terhubung dengan kebutuhan nasional
2	Standar Isi Pembelajaran (Kurikulum)	Re-desain kurikulum MBKM → OBE–MBKM	1) Peninjauan struktur MK & sebaran SKS 2) Transformasi bertahap MBKM ke OBE–MBKM 3) Penetapan MKWU Tri Hita Karana 4) Alokasi 20–30 SKS MBKM	1) Kurikulum OBE–MBKM 2) MKWU Tri Hita Karana 3) Skema konversi SKS MBKM
3	Standar Proses Pembelajaran	Implementasi student-centered learning	1) Penerapan diskusi, proyek, dan studi kasus 2) Target $\geq 30\%$ MK menerapkan PjBL 3) Penguatan pembelajaran daring & hybrid berbasis LMS	1) RPS berbasis SCL 2) MK dengan PjBL tematik 3) LMS aktif sebagai platform utama
4	Standar Penilaian Pembelajaran	Penataan penilaian berbasis OBE	1) Penyusunan rubrik CPL–CPMK–Sub CPMK 2) Penerapan penilaian otentik (proyek, portofolio) 3) Integrasi penilaian ke SIAKAD/LMS	1) Rubrik penilaian OBE 2) Sistem penilaian transparan 3) Data capaian belajar terdokumentasi
5	Standar Dosen & Tendik	Penguatan kapasitas SDM akademik	1) Pelatihan MBKM → OBE–MBKM 2) Integrasi Tri Hita Karana dalam RPS 3) Penguatan kompetensi TIK & media digital	1) Dosen terlatih OBE–MBKM 2) RPS terintegrasi THK 3) Peningkatan literasi digital dosen
6	Standar Sarana & Prasarana	Penguatan fasilitas dasar pembelajaran	1) Pengembangan LMS 2) Penguatan lab komputer,	1) Sarpras pembelajaran memadai

			microteaching, studio multimedia 3) Penataan ruang hijau & fasilitas ibadah	2) Lingkungan kampus berbasis THK
7	Standar Pengelolaan Pembelajaran	Tata kelola & SPMI akademik	1) Penyusunan dokumen SPMI bidang pendidikan 2) Penetapan SOP kurikulum, RPS, MBKM, penilaian 3) Pelaporan PDDikti terstandar	1) Dokumen SPMI lengkap 2) SOP akademik baku 3) Proses terdokumentasi
8	Standar Pembiayaan Pembelajaran	Perencanaan pembiayaan berbasis kebutuhan	1) Penyusunan unit cost per prodi 2) Skema pembiayaan laboratorium & MBKM dasar 3) Integrasi pembiayaan ke perencanaan mutu	1) Dokumen unit cost 2) Dukungan dana MBKM & praktikum 3) Keberlanjutan pembelajaran terjamin

Tabel 2. Matriks Roadmap Horizon II (2026–2030)
Fase Penguatan & Diferensiasi Berbasis *Tri Hita Karana* di Tingkat Nasional untu
Berdaya Saing Nasional (*Exellent Teaching University*)

No	Standar Pendidikan	Fokus Pengembangan Horizon II	Strategi / Program Kunci	Luaran / Indikator Capaian
1	Standar Kompetensi Lulusan (SKL)	Penguatan profil lulusan & diferensiasi nasional	1) Review CPL berbasis tracer study & survei pengguna 2) Penajaman profil lulusan berkarakter <i>Tri Hita Karana</i> 3) Penambahan kompetensi spesifik kependidikan, TI, dan kewirausahaan	1) CPL adaptif & berbasis data 2) Profil lulusan unggul nasional 3) Identitas lulusan berakar THK
2	Standar Isi Pembelajaran (Kurikulum)	Pendalaman OBE–MBKM & konsentrasi unggulan	1) Pengembangan peminatan <i>Edutech, Smart Tourism, Green Education</i> 2) Integrasi THK dengan isu nasional strategis 3) Optimalisasi 20–30 SKS MBKM • Pengembangan MK konversi MBKM	1) Kurikulum OBE–MBKM matang 2) Peminatan unggulan institusional 3) Implementasi MBKM bermutu
3	Standar Proses Pembelajaran	Praktik baik pembelajaran berskala nasional	1) Target $\geq 50\%$ MK inti berbasis PjBL 2) Proyek kontekstual masyarakat & mitra 3) Proyek lintas prodi & co-teaching praktisi 4) Pendalaman pembelajaran hybrid	1) Pembelajaran aplikatif & kolaboratif 2) Proyek tematik THK nasional 3) LMS sebagai ruang interaksi utama
4	Standar Penilaian Pembelajaran	Pemantapan penilaian otentik & e-portofolio	1) Penilaian berbasis proyek, produk, portofolio 2) E-portofolio sebagai syarat kelulusan 3) Analisis data capaian CPL berbasis SIAKAD/LMS	1) Sistem penilaian nasional-standar 2) E-portofolio lulusan 3) Data mutu berbasis hasil belajar
5	Standar Dosen & Tendik	Dosen sebagai rujukan nasional inovasi	1) Percepatan studi doktor & jabatan fungsional 2) Pelatihan lanjutan edutech & OBE–MBKM 3) Hibah Inovasi Pembelajaran THK 4) Tendik berbasis smart campus	1) Dosen berdaya saing nasional 2) Praktik baik pembelajaran inovatif 3) Layanan akademik digital optimal

6	Standar Sarana & Prasarana	Pematangan smart–green learning environment	1) Pengembangan <i>smart classroom</i> & lab TIK 2) Studio multimedia nasional 3) Penataan ruang hijau & area kolaborasi 4) Sistem <i>green & smart campus</i>	1) Ekosistem pembelajaran digital & hijau 2) Produksi konten nasional 3) Kampus sebagai etalase THK
7	Standar Pengelolaan Pembelajaran	Tata kelola berbasis data & benchmarking nasional	1) Pemantapan siklus PPEPP 2) Laporan mutu tahunan berbasis data 3) Dashboard mutu terintegrasi 4) Benchmarking & kolaborasi nasional	1) Budaya mutu institusional 2) Pengambilan keputusan berbasis data 3) Pengakuan praktik baik nasional
8	Standar Pembiayaan Pembelajaran	Pembiayaan inovatif & berkelanjutan	1) Anggaran khusus program unggulan & MBKM 2) Optimalisasi hibah nasional & matching fund 3) Kerja sama berbayar & unit usaha akademik	1) Pembiayaan pembelajaran kokoh 2) Peningkatan pendanaan non-SPP 3) Keberlanjutan inovasi akademik

Tabel 3. Matriks Roadmap Horizon III (2031–2035)
Berdaya Saing di Asia Tenggara dengan Fokus Keunggulan Inovasi Pendidikan
(Innovation- Based University)

No	Standar Pendidikan	Fokus Pengembangan Horizon III	Strategi / Program Kunci	Luaran / Indikator Capaian
1	Standar Kompetensi Lulusan (SKL)	Model profil lulusan rujukan Asia Tenggara	1) Perumusan profil lulusan regional berkarakter THK 2) Review CPL berbasis praktik terbaik regional & global 3) Diseminasi SKL–CPL melalui pelatihan & kerja sama kurikulum	1) Profil lulusan model Asia Tenggara 2) CPL berstandar regional 3) Adopsi/rujukan SKL oleh PT mitra
2	Standar Isi Pembelajaran (Kurikulum)	Kurikulum rujukan regional yang adaptif & terbuka	1) Pengembangan curriculum <i>framework/package</i> 2) Mata kuliah jejaring regional (THK, <i>edutech, green education</i>) 3) Skema kredit bersama & pertukaran lintas negara 4) Keterlibatan konsorsium kurikulum regional	1) Kurikulum UPMI diadopsi/diadaptasi regional 2) Mata kuliah lintas negara berjalan 3) Pengakuan UPMI dalam forum kebijakan
3	Standar Proses Pembelajaran	Best practices pembelajaran Asia Tenggara	1) Model pembelajaran berbasis proyek regional 2) Panduan pembelajaran THK terstandar 3) <i>Project-based mobility & virtual collaboration</i> 4) Expo & konferensi pembelajaran regional	1) Model pembelajaran direplikasi 2) Proyek lintas negara berjalan 3) UPMI sebagai inisiator & kurator regional
4	Standar Penilaian Pembelajaran	(terintegrasi dengan proses & lulusan regional)	1) Asesmen berbasis proyek lintas negara 2) Penilaian kontekstual multicultural 3) Standar asesmen regional berbasis CPL	1) Penilaian otentik regional 2) Kesetaraan capaian lintas negara 3) Pengakuan mutu asesmen UPMI
5	Standar Dosen & Tendik	Dosen sebagai agen inovasi & pemimpin regional	1) Dosen sebagai trainer & narasumber Asia Tenggara 2) Komunitas praktik dosen lintas negara 3) Kepemimpinan akademik regional	1) Dosen UPMI rujukan regional 2) Jejaring akademik Asia Tenggara aktif 3) Layanan akademik internasional andal

			4) Tendik pengelola sistem internasional	
6	Standar Sarana & Prasarana	Living laboratory pendidikan regional	1) <i>Smart-green campus</i> berbasis THK 2) <i>Demonstration zones</i> pembelajaran inovatif 3) Penguatan pusat studi & pusat inovasi 4) Kampus sebagai destinasi akademik	1) Kampus rujukan Asia Tenggara 2) Fasilitas direplikasi mitra 3) Pusat studi sebagai simpul regional
7	Standar Pengelolaan Pembelajaran	Model tata kelola akademik regional	1) SPMI sebagai praktik baik Asia Tenggara 2) PPEPP terintegrasi THK 3) Dashboard mutu akademik regional 4) Pendampingan PT mitra	1) Tata kelola direplikasi mitra 2) Sistem mutu berbasis data 3) UPMI sebagai pusat rujukan mutu
8	Standar Pembiayaan Pembelajaran	Model pembiayaan berkelanjutan regional	1) Integrasi SPP, hibah regional, industry 2) Dokumentasi model pembiayaan 3) Penguatan unit usaha akademik 4) Pendanaan kolaborasi lintas negara	1) Pembiayaan inovasi berkelanjutan 2) Model keuangan direplikasi 3) Reputasi regional meningkat

BAB VI

TATA KELOLA, IMPLEMENTASI, DAN MONITORING–EVALUASI

6.1 Struktur Tata Kelola Akademik

Tata kelola akademik di Universitas PGRI Mahadewa Indonesia (UPMI) dirancang untuk menjamin bahwa keseluruhan proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pendidikan berjalan secara terkoordinasi, akuntabel, dan selaras dengan visi “unggul dan kompetitif berlandaskan Tri Hita Karana”. Dalam kerangka ini, setiap unsur pimpinan dan lembaga akademik memiliki peran dan mandat yang saling melengkapi, mulai dari tingkat universitas, fakultas, hingga program studi, serta didukung oleh lembaga penjaminan mutu dan unit pengelola program Merdeka Belajar–Kampus Merdeka (MBKM).

Pada tingkat universitas, **Rektor** berperan sebagai penanggung jawab tertinggi penyelenggaraan tridharma dan tata kelola akademik. Rektor menetapkan arah kebijakan strategis pengembangan pendidikan, termasuk penguatan kurikulum OBE–MBKM, integrasi Tri Hita Karana, dan penguatan sains-teknologi dalam seluruh program studi. Rektor juga memastikan ketersediaan sumber daya, sistem penjaminan mutu, serta jejaring kerja sama yang mendukung implementasi roadmap pengembangan pendidikan 2020–2035. Dalam konteks ini, Rektor menjadi figur yang menjamin bahwa keputusan akademik senantiasa berpijak pada nilai-nilai Parhyangan, Pawongan, dan Palemahan, serta sejalan dengan regulasi nasional.

Wakil Rektor Bidang Akademik (WR Akademik) bertindak sebagai koordinator utama penyelenggaraan akademik di bawah kebijakan Rektor. WR Akademik memimpin perencanaan dan pengembangan kurikulum, pengaturan kalender dan kebijakan akademik, pembinaan proses pembelajaran, dan penguatan penjaminan mutu akademik. WR Akademik juga berperan sebagai penghubung antara Rektor, dekan, Lembaga Penjaminan Mutu (BPM), dan unit MBKM dalam menyinergikan berbagai program pengembangan pendidikan, termasuk pelaksanaan OBE–MBKM dan pemanfaatan data akademik untuk pengambilan keputusan. Pada tingkat fakultas, **Dekan** bertanggung jawab mengimplementasikan kebijakan akademik universitas dalam lingkup fakultas. Dekan memimpin perencanaan dan pelaksanaan program pendidikan, membina dosen dan tenaga kependidikan, serta mengawasi mutu pembelajaran di program studi yang berada di bawahnya. Dekan juga menjadi simpul koordinasi antara fakultas dan WR Akademik, khususnya dalam penyesuaian kurikulum, pengelolaan beban mengajar, dan pelaksanaan kegiatan MBKM serta pengabdian yang terintegrasi dengan pembelajaran. Dengan demikian, Dekan memastikan bahwa setiap keputusan akademik di tingkat fakultas tetap konsisten dengan visi dan standar mutu UPMI.

Ketua Program Studi (Kaprodi) merupakan ujung tombak tata kelola akademik di tingkat operasional. Kaprodi memimpin perencanaan dan implementasi kurikulum OBE–MBKM di program studi, menyusun dan meninjau Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), mengoordinasikan penyusunan RPS, mengatur tugas mengajar dosen, serta memantau kelancaran proses pembelajaran dan penilaian. Kaprodi juga berperan penting dalam menjalin komunikasi langsung dengan mahasiswa, alumni, dan pengguna lulusan, serta menindaklanjuti hasil monitoring–evaluasi mutu yang dilaporkan oleh BPM dan GKM/GPM. Dalam perspektif Tri Hita Karana, Kaprodi menjadi figur kunci yang memastikan nilai-nilai Parhyangan,

Pawongan, dan Palemahan benar-benar hadir dalam kurikulum dan praktik pembelajaran sehari-hari.

Lembaga Penjaminan Mutu (BPM) berfungsi sebagai motor penggerak penjaminan mutu akademik di tingkat institusi. BPM menyusun kebijakan mutu, manual mutu, standar, dan formulir SPMI yang mengatur bidang pendidikan, serta memastikan penerapan siklus PPEPP (Penetapan–Pelaksanaan–Evaluasi–Pengendalian–Peningkatan) di semua program studi. BPM melakukan monitoring dan audit mutu internal, menyajikan analisis data akademik, serta memberikan rekomendasi perbaikan kepada Rektor, WR Akademik, Dekan, dan Kaprodi. Dengan demikian, BPM memastikan bahwa seluruh proses akademik tidak hanya patuh terhadap SN Dikti dan regulasi Kementerian, tetapi juga berkembang secara berkelanjutan dan konsisten dengan karakter Tri Hita Karana.

Dalam kerangka implementasi Merdeka Belajar–Kampus Merdeka, unit MBKM yang digawangi oleh LPA memiliki peran strategis sebagai koordinator perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program MBKM lintas prodi. Unit ini mengelola kerja sama dengan mitra eksternal (sekolah, pemerintah, industri, desa adat, UMKM), menyusun pedoman teknis MBKM (alur, konversi SKS, pembimbingan, penjaminan mutu), serta memfasilitasi mahasiswa dan dosen dalam mengikuti dan menyelenggarakan aktivitas MBKM. Unit MBKM bekerja erat dengan WR Akademik, Dekan, Kaprodi, dan BPM untuk memastikan bahwa setiap aktivitas MBKM selaras dengan CPL, terintegrasi dalam kurikulum, dijamin mutunya, dan memberikan pengalaman belajar yang bermakna sesuai semangat Tri Hita Karana.

Melalui struktur tata kelola akademik yang demikian, UPMI berupaya membangun sistem pengelolaan pendidikan yang jelas, partisipatif, dan berbasis mutu, di mana setiap level kepemimpinan dan lembaga memiliki mandat spesifik namun saling terkait. Sinergi antara Rektor, WR Akademik, Dekan, Kaprodi, BPM, dan unit MBKM menjadi fondasi penting untuk mewujudkan roadmap pengembangan bidang pendidikan 2023–2035 dan mengantarkan UPMI sebagai rujukan nasional dalam kependidikan dan saintek berlandaskan Tri Hita Karana.

6.2 Mekanisme Implementasi Roadmap

Implementasi *Roadmap Pengembangan Bidang Pendidikan 2020–2035* di Universitas PGRI Mahadewa Indonesia dilaksanakan melalui mekanisme yang terencana, bertahap, dan dapat diukur. Roadmap pada dasarnya memberikan arah strategis jangka panjang (Horizon I–III), sedangkan pelaksanaannya dioperasionalkan melalui rencana operasional tahunan (Renop) di tingkat universitas, fakultas, dan program studi, yang diselaraskan dengan Rencana Strategis (Renstra) Universitas dan Rencana Bisnis. Dengan demikian, setiap program dan kegiatan akademik yang dijalankan bukan sekadar respon *ad hoc*, tetapi merupakan bagian dari skenario pengembangan jangka panjang yang jelas.

Pertama, mekanisme utama implementasi roadmap dilakukan melalui penyusunan Renop tahunan perprogram studi dan fakultas. Setiap awal periode (tahun akademik), program studi menerjemahkan sasaran dan program pada horizon yang sedang berjalan (misalnya Horizon I: 2020–2025) ke dalam bentuk kegiatan konkrit tahunan, lengkap dengan indikator kinerja, target capaian, jadwal, dan kebutuhan sumber daya. Renop prodi memuat, antara lain, rencana peninjauan CPL dan kurikulum, pelatihan dosen, pengembangan pembelajaran berbasis proyek, pelaksanaan MBKM, penguatan sarana pembelajaran, serta kegiatan monitoring–evaluasi mutu pembelajaran.

Renop fakultas disusun dengan mengkonsolidasikan Renop program studi di bawahnya, menambahkan program lintas prodi (misalnya proyek lintas disiplin berbasis Tri Hita Karana, seminar akademik, pengembangan laboratorium bersama), serta mengaitkannya dengan kebijakan akademik universitas. Proses penyusunan Renop dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan ketua program studi, dosen, tenaga kependidikan, dan bila memungkinkan masukan pemangku kepentingan eksternal. Selanjutnya, Renop yang telah disepakati diintegrasikan ke dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT) sehingga implementasi roadmap memiliki dukungan pembiayaan yang jelas.

Kedua, implementasi roadmap wajib selaras dengan Renstra Universitas dan Rencana Bisnis. Roadmap bidang pendidikan diposisikan sebagai turunan akademik dari Renstra, khususnya pada pilar pengembangan mutu pendidikan, peningkatan daya saing lulusan, dan penguatan karakter Tri Hita Karana. Oleh karena itu, setiap sasaran dan program dalam roadmap harus mengacu pada tujuan strategis yang tertuang dalam Renstra, seperti peningkatan akreditasi, penguatan reputasi nasional, pengembangan jejaring, dan penguatan tata kelola. Dalam konteks Rencana Bisnis, roadmap memberikan dasar akademik bagi perencanaan investasi sarana prasarana, pengembangan unit-unit usaha berbasis keahlian, serta pengembangan layanan pendidikan dan pelatihan yang menjadi sumber pendapatan universitas.

Proses penyelarasan ini dilakukan melalui forum perencanaan tahunan dan lima tahunan yang melibatkan pimpinan universitas (Rektor, Wakil Rektor), Dekan, BPM, Biro Perencanaan/Keuangan, serta perwakilan program studi. Dalam forum tersebut, capaian roadmap dievaluasi, sasaran tahun berikutnya ditetapkan, dan prioritas pembiayaan disesuaikan. Dengan cara ini, hubungan antara roadmap–Renstra–Rencana Bisnis tidak bersifat simbolik, tetapi benar-benar operasional: roadmap memberi arah pengembangan akademik, Renstra memberi bingkai strategis kelembagaan, sedangkan Rencana Bisnis menyediakan kerangka keberlanjutan sumber daya. Sinergi ketiganya memastikan bahwa pengembangan bidang pendidikan di UPMI berlangsung konsisten, terukur, dan berkelanjutan hingga 2035.

6.3 Sistem Monitoring dan Evaluasi

Sistem monitoring dan evaluasi (*monitoring and evaluation/monev*) merupakan komponen kunci dalam implementasi *Roadmap Pengembangan Bidang Pendidikan 2020–2035* di Universitas PGRI Mahadewa Indonesia. Tanpa monev yang terstruktur, roadmap hanya menjadi dokumen perencanaan tanpa daya kendali. Oleh karena itu, UPMI membangun sistem monev yang berbasis indikator, memiliki baseline yang jelas, target tahunan yang terukur, dan mekanisme pelaporan yang baku, serta difasilitasi melalui forum monev berkala di berbagai tingkat kelembagaan.

Pertama, monitoring dan evaluasi roadmap dilaksanakan dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan pada Bab II dan Bab V, baik berupa Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun indikator kinerja tambahan (IKT) per standar pendidikan. Untuk setiap indikator, ditetapkan:

1. Baseline – kondisi awal pada tahun pertama Horizon I (misalnya 2020/2021), berdasarkan data SIAKAD, PDDikti, *tracer study*, dan survei internal;
2. Target tahunan – capaian yang diharapkan untuk setiap tahun dalam rentang Horizon I, II, dan III, yang disusun secara bertahap (*incremental*) dan realistis;

3. Sumber dan mekanisme pengumpulan data – misalnya SIAKAD/LMS untuk data akademik, instrumen SPMI untuk mutu pembelajaran, tracer study dan survei pengguna lulusan, serta laporan kegiatan MBKM dan pengabdian.

Indikator-indikator tersebut tidak hanya menggambarkan output (misalnya jumlah prodi yang menerapkan OBE–MBKM atau persentase mahasiswa yang mengikuti MBKM), tetapi juga outcome, seperti peningkatan daya saing lulusan, penguatan karakter Tri Hita Karana, dan pengakuan nasional terhadap UPMI. Setiap akhir periode pelaporan (semester/tahun), unit terkait (prodi, fakultas, BPM, unit MBKM, UPT TIK) menyusun laporan capaian indikator yang memuat perbandingan antara baseline, target, dan capaian aktual, serta analisis penyebab keberhasilan maupun kendala.

Kedua, mekanisme pelaporan hasil monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berjenjang dan terintegrasi. Pada tingkat program studi, Kaprodi bersama Gugus Kendali Mutu/ Gugus Penjaminan Mutu menyusun Laporan Monev Akademik Prodi yang memuat capaian indikator utama: implementasi kurikulum OBE–MBKM, kualitas proses pembelajaran, penilaian, pelaksanaan MBKM, dan tingkat kepuasan mahasiswa. Laporan prodi kemudian dikompilasi di tingkat fakultas oleh Dekan menjadi Laporan Monev Akademik Fakultas, yang juga memuat analisis lintas prodi. Di tingkat universitas, BPM menyusun Laporan Mutu Pendidikan Tahunan yang merangkum capaian seluruh fakultas dan unit, serta memberikan rekomendasi perbaikan kepada Rektor dan Wakil Rektor Akademik.

Selain laporan tahunan, dapat pula disusun laporan tengah horizon (misalnya evaluasi tengah Horizon I, II, III) yang berfungsi sebagai *mid-term review* untuk menilai sejauh mana roadmap berjalan sesuai rencana, dan apakah diperlukan penyesuaian strategi. Laporan-laporan tersebut menjadi dokumen penting dalam siklus PPEPP SPMI, bahan akreditasi, dan dasar perencanaan ulang Renop serta RKAT di tahun-tahun berikutnya.

Ketiga, untuk memastikan bahwa monev tidak berhenti pada level dokumen, UPMI menyelenggarakan forum monitoring dan evaluasi berkala sebagai ruang dialog dan pengambilan keputusan. Forum ini dapat diselenggarakan:

- 1) Setiap semester dalam bentuk Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) tingkat fakultas dan universitas, yang membahas:
 - a) Capaian indikator semester berjalan (misalnya kehadiran kuliah, pemanfaatan LMS, pelaksanaan RPS, pelaksanaan MBKM);
 - b) Temuan audit mutu internal dan umpan balik mahasiswa;
 - c) Rencana tindakan korektif dan pencegahan untuk semester berikutnya.
- 2) Setiap tahun dalam bentuk Forum Evaluasi Tahunan Roadmap Pendidikan, yang melibatkan Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Kaprodi, BPM, unit MBKM, dan unit terkait lainnya. Forum ini berfungsi untuk:
 - a) Menyajikan capaian indikator tahunan (IKU dan IKT) beserta analisis gap dengan target;
 - b) Menetapkan prioritas perbaikan dan inovasi pada tahun berikutnya;
 - c) Menyelaraskan hasil monev dengan pembaruan Renop, RKAT, dan penyesuaian strategi pada masing-masing horizon roadmap.

Dalam forum-forum monev tersebut, prinsip Tri Hita Karana tetap menjadi landasan etik dan filosofis:

- 1) Parhyangan tercermin dalam komitmen kejujuran, integritas, dan tanggung jawab dalam pelaporan dan analisis data;
- 2) Pawongan tampak dalam budaya dialog, kolaborasi, dan penghargaan terhadap kontribusi semua pihak;
- 3) Palemahan hadir dalam perhatian terhadap dampak kebijakan pendidikan terhadap lingkungan dan keberlanjutan program.

Dengan demikian, sistem monitoring dan evaluasi yang berbasis indikator, memiliki baseline dan target tahunan yang jelas, serta difasilitasi melalui forum monev berkala, akan memastikan bahwa *Roadmap Pengembangan Bidang Pendidikan 2023–2035* tidak hanya menjadi panduan normatif, tetapi benar-benar menjadi alat kendali dan penggerak perubahan menuju UPMI yang unggul, kompetitif, dan menjadi rujukan nasional berlandaskan Tri Hita Karana.

6.4 Manajemen Risiko

Pelaksanaan *Roadmap Pengembangan Bidang Pendidikan 2020–2035* di Universitas PGRI Mahadewa Indonesia mengandung berbagai potensi risiko yang, jika tidak dikelola dengan baik, dapat menghambat pencapaian sasaran pada setiap horizon. Oleh karena itu, manajemen risiko menjadi bagian integral dari tata kelola akademik dan diintegrasikan dengan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) serta siklus PPEPP. Pendekatan manajemen risiko meliputi identifikasi risiko, analisis tingkat kemungkinan dan dampak, serta penetapan langkah mitigasi yang sistematis dan berkelanjutan.

6.4.1 Identifikasi Risiko

Secara umum, risiko utama yang berpotensi mempengaruhi implementasi roadmap bidang pendidikan dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Risiko Sumber Daya Manusia (SDM)
 - a) Keterbatasan jumlah dosen tetap dengan kualifikasi dan jabatan akademik yang memadai.
 - b) Beban kerja dosen yang tinggi sehingga menghambat inovasi pembelajaran, penelitian, dan pengembangan MBKM.
 - c) Kesenjangan kompetensi pedagogik dan literasi digital di antara dosen dan tenaga kependidikan.
 - d) Potensi resistensi terhadap perubahan, terutama pada penerapan kurikulum OBE–MBKM dan pembelajaran berbasis proyek.
2. Risiko Pendanaan
 - a) Keterbatasan anggaran untuk pengembangan kurikulum, pelatihan dosen, penguatan sarana pembelajaran, dan program MBKM.
 - b) Ketergantungan yang terlalu besar pada sumber dana tertentu (misalnya SPP) tanpa diversifikasi pendapatan.
 - c) Fluktuasi pendapatan yang dipengaruhi oleh dinamika jumlah mahasiswa baru atau perubahan kebijakan pendanaan eksternal.

3. Risiko Regulasi dan Kebijakan
 - a) Perubahan regulasi nasional (SN Dikti, MBKM, akreditasi) yang menuntut penyesuaian cepat pada kurikulum, struktur program, dan sistem pelaporan.
 - b) Keterlambatan atau ketidaktepatan dalam merespon kebijakan baru, sehingga menimbulkan risiko ketidakpatuhan.
4. Risiko Sarana, Prasarana, dan Teknologi
 - a) Keterbatasan kapasitas atau keandalan infrastruktur TIK (LMS, SIAKAD, jaringan internet) yang dapat mengganggu pembelajaran hybrid/daring.
 - b) Keterlambatan pengadaan atau pemeliharaan sarana seperti laboratorium komputer, microteaching, dan studio multimedia.
 - c) Risiko gangguan teknis atau keamanan data yang menghambat layanan akademik.
5. Risiko Akademik dan Mutu
 - a) Ketidaksesuaian antara desain kurikulum OBE–MBKM dengan implementasi di kelas dan lapangan.
 - b) Penurunan kualitas pembelajaran jika beban administrasi tinggi dan tidak diimbangi dengan dukungan yang memadai.
 - c) Kualitas penilaian dan dokumentasi capaian belajar yang tidak konsisten antar dosen atau prodi.
6. Risiko Kemitraan dan Sosial
 - a) Keterbatasan jumlah dan kualitas mitra MBKM (sekolah, industri, desa adat, UMKM) yang siap menampung mahasiswa.
 - b) Ketidakseimbangan antara harapan mitra dan kemampuan universitas/mahasiswa dalam pelaksanaan proyek lapangan.
 - c) Dinamika sosial dan ekonomi di Bali dan Indonesia yang dapat mempengaruhi relevansi program dan aktivitas lapangan.

6.4.2 Strategi dan Langkah Mitigasi

Untuk mengelola risiko-risiko tersebut, UPMI menerapkan sejumlah strategi mitigasi yang terintegrasi dengan perencanaan, SPMI, dan budaya Tri Hita Karana.

1. Mitigasi Risiko SDM
 - a) Menyusun peta kebutuhan dosen jangka menengah–panjang per prodi dan secara bertahap merekrut dosen dengan kualifikasi S2/S3 sesuai prioritas.
 - b) Mengembangkan program pengembangan profesional berkelanjutan (pelatihan OBE–MBKM, pembelajaran inovatif, TIK, asesmen) yang diwajibkan dan terjadwal.
 - c) Mengatur beban kerja dosen secara proporsional, termasuk pembagian tanggung jawab pembelajaran, penelitian, dan pengabdian.
 - d) Membangun budaya perubahan positif melalui komunikasi intensif, *coaching*, dan berbagi praktik baik, sehingga resistensi dapat diminimalkan.
2. Mitigasi Risiko Pendanaan
 - a) Menetapkan unit cost per mahasiswa per prodi sebagai dasar perencanaan dan advokasi kebutuhan anggaran.

- b) Mengembangkan diversifikasi sumber pendanaan melalui hibah kompetitif, kerja sama berbayar, dan unit usaha akademik (pelatihan guru, konsultasi TI, pengembangan media pembelajaran).
 - c) Mengintegrasikan program-program prioritas roadmap (kurikulum, MBKM, penguatan sarpras) ke dalam RKAT dan Rencana Bisnis universitas.
 - d) Melakukan monitoring serapan anggaran dan efisiensi pemanfaatan dana untuk menjamin keberlanjutan program.
3. Mitigasi Risiko Regulasi dan Kebijakan
- a) Membentuk tim kecil pemantau regulasi nasional di bawah koordinasi WR Akademik dan BPM untuk memantau perubahan kebijakan dan menyusun rekomendasi penyesuaian.
 - b) Menyusun prosedur respons kebijakan (SOP penyesuaian regulasi) yang jelas untuk kurikulum, pelaporan PDDikti, dan akreditasi.
 - c) Mengikutsertakan perwakilan UPMI secara aktif dalam forum nasional (asosiasi prodi, APTISI, PGRI, asosiasi informatika) untuk memperoleh informasi dini dan berkontribusi dalam perumusan kebijakan.
4. Mitigasi Risiko Sarana, Prasarana, dan Teknologi
- a) Menyusun rencana induk pengembangan TIK dan sarpras pembelajaran yang selaras dengan roadmap (LMS, smart classroom, lab, studio multimedia).
 - b) Menetapkan standar minimal layanan TIK (uptime, kapasitas, dukungan teknis) dan melakukan pemeliharaan berkala.
 - c) Memperkuat keamanan data dan sistem informasi melalui kebijakan, backup berkala, dan pelatihan pengguna.
 - d) Melakukan prioritas investasi sarpras yang langsung mendukung pencapaian capaian kurikulum OBE–MBKM dan program unggulan Tri Hita Karana.
5. Mitigasi Risiko Akademik dan Mutu
- a) Mengintegrasikan manajemen risiko ke dalam siklus PPEPP SPMI, sehingga setiap standar pendidikan memiliki indikator, monev, dan tindak lanjut yang jelas.
 - b) Memperkuat peran BPM dan GKM/GPM dalam audit mutu internal, terutama terhadap implementasi RPS, penilaian, dan pelaksanaan MBKM.
 - c) Menyelenggarakan forum refleksi akademik (misalnya *lesson learned* per semester) untuk mengidentifikasi persoalan dan solusi pada level dosen dan prodi.
 - d) Mengembangkan sistem penguatan kualitas penilaian (moderasi nilai, *peer review* RPS dan rubrik).
6. Mitigasi Risiko Kemitraan dan Sosial
- a) Mengembangkan peta mitra strategis (sekolah, desa adat, UMKM, industri pariwisata, pemerintah daerah) dan membangun kemitraan jangka panjang melalui MoU/MoA.
 - b) Menyusun panduan dan standar minimal kesiapan mitra MBKM, termasuk kejelasan tugas, tanggung jawab, dan mekanisme komunikasi.

- c) Melakukan evaluasi berkala atas kepuasan mitra dan mahasiswa dalam pelaksanaan MBKM dan proyek lapangan, serta menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut.
- d) Menyesuaikan tema dan desain program agar responsif terhadap dinamika sosial-ekonomi lokal dan nasional, dengan tetap berpijak pada nilai Tri Hita Karana.

Sebagai bagian dari implementasi manajemen risiko, UPMI dapat menyusun daftar risiko (*risk register*) bidang pendidikan yang diperbaharui secara berkala oleh BPM bersama fakultas dan program studi. Risk register ini memuat jenis risiko, tingkat kemungkinan dan dampak, pemilik risiko (*risk owner*), serta rencana mitigasi dan pemantauan. Dengan cara ini, manajemen risiko tidak berdiri terpisah, tetapi menjadi bagian fungsional dari tata kelola akademik dan budaya mutu UPMI yang berlandaskan harmoni Parhyangan, Pawongan, dan Palemahan.

BAB VII

PENUTUP

7.1 Rangkuman Arah Strategis

Secara keseluruhan, *Roadmap Pengembangan Bidang Pendidikan 2020–2035* Universitas PGRI Mahadewa Indonesia disusun sebagai panduan strategis jangka panjang untuk memastikan bahwa seluruh penyelenggaraan pendidikan secara konsisten mengarah pada terwujudnya visi: “Unggul dan kompetitif berlandaskan *Tri Hita Karana*.” Visi ini menjadi titik acuan utama bagi perumusan standar, kebijakan, program, dan kegiatan di tingkat universitas, fakultas, hingga program studi, sehingga setiap langkah pengembangan pendidikan memiliki orientasi yang jelas, terukur, dan bernilai strategis bagi institusi.

Arah strategis pengembangan pendidikan diwujudkan melalui penguatan delapan standar pendidikan (Standar Kompetensi Lulusan, Isi, Proses, Penilaian, Dosen dan Tenaga Kependidikan, Sarana Prasarana, Pengelolaan Pembelajaran, dan Pembiayaan) dengan landasan pendekatan *Outcome-Based Education* (OBE) dan kebijakan Merdeka Belajar–Kampus Merdeka (MBKM). Seluruh standar dirancang agar selaras dengan SN Dikti, KKNI, serta kebutuhan pemangku kepentingan, sekaligus mengintegrasikan nilai-nilai Parhyangan, Pawongan, dan Palemahan sebagai ciri khas lulusan dan praktik akademik UPMI. Dengan demikian, keunggulan dan daya saing tidak hanya diukur dari aspek akademik dan profesional, tetapi juga dari kekuatan karakter spiritual, sosial, dan ekologis lulusan.

Melalui pembagian horizon waktu pengembangan—Horizon I (konsolidasi dan kepatuhan standar nasional), Horizon II (penguatan dan diferensiasi berbasis *Tri Hita Karana* di tingkat nasional), dan Horizon III (fase pengakuan dan rujukan tingkat nasional)—roadmap ini menegaskan bahwa UPMI tidak sekadar ingin memenuhi standar minimal, tetapi secara bertahap membangun keunggulan dan posisi sebagai rujukan nasional dalam bidang kependidikan dan saintek berlandaskan kearifan lokal Bali. Setiap horizon memuat sasaran, program, dan indikator yang saling berkelanjutan, sehingga proses transformasi pendidikan dapat dikelola secara sistematis dan akuntabel.

Dengan arah strategis tersebut, pengembangan pendidikan di UPMI dimaknai bukan hanya sebagai upaya administratif memenuhi regulasi, melainkan sebagai proses transformasi kelembagaan yang utuh: membangun kurikulum yang relevan, pembelajaran yang bermakna, penilaian yang adil dan otentik, dosen dan tenaga kependidikan yang profesional, lingkungan belajar yang cerdas dan lestari, tata kelola yang berbasis mutu, serta pembiayaan yang berkelanjutan. Semua ini diarahkan untuk menghasilkan lulusan yang benar-benar unggul, kompetitif, dan mampu berkontribusi bagi masyarakat dan bangsa dengan menjadikan *Tri Hita Karana* sebagai fondasi nilai dalam berpikir, bersikap, dan bertindak.

7.2 Komitmen Pelaksanaan

Keberhasilan *Roadmap Pengembangan Bidang Pendidikan 2020–2035* Universitas PGRI Mahadewa Indonesia tidak semata-mata ditentukan oleh kualitas dokumen perencanaan, tetapi terutama oleh komitmen pimpinan dan seluruh sivitas akademika untuk melaksanakan setiap program dan kebijakan yang telah dirumuskan. Dalam konteks ini, roadmap bukan hanya menjadi pedoman administratif, melainkan menjadi kontrak moral dan akademik bersama yang mengikat Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Ketua Program Studi, dosen, tenaga kependidikan, dan

mahasiswa untuk bergerak dalam satu arah: mewujudkan pendidikan tinggi yang unggul dan kompetitif berlandaskan *Tri Hita Karana*.

Pimpinan universitas menegaskan komitmennya melalui penyediaan arah kebijakan yang jelas, dukungan regulasi internal, alokasi sumber daya yang memadai, serta pembinaan berkelanjutan terhadap unit-unit pelaksana. Rektor dan jajaran pimpinan berperan memastikan bahwa roadmap ini terintegrasi ke dalam Renstra, Renop, dan Rencana Bisnis universitas, serta menjadi rujukan utama dalam pengambilan keputusan strategis di bidang pendidikan. Di tingkat fakultas dan program studi, Dekan dan Ketua Prodi berkomitmen untuk menerjemahkan sasaran roadmap ke dalam program konkret tahunan, membangun budaya akademik yang sehat, serta mengawal pelaksanaan kurikulum OBE–MBKM dan integrasi *Tri Hita Karana* dalam setiap proses pembelajaran.

Di sisi lain, dosen dan tenaga kependidikan memegang peran penting sebagai penggerak langsung implementasi roadmap di lapangan. Komitmen dosen tercermin dalam kesediaan untuk terus meningkatkan kompetensi, mengembangkan pembelajaran inovatif, melaksanakan penilaian otentik, serta menjadi teladan dalam pengamalan nilai Parhyangan, Pawongan, dan Palemahan. Tenaga kependidikan mendukung melalui layanan akademik dan administrasi yang profesional, efektif, dan ramah, sehingga proses pembelajaran dan penjaminan mutu dapat berlangsung secara tertib dan efisien. Mahasiswa, sebagai pusat dari seluruh kegiatan pendidikan, diharapkan turut berkomitmen untuk aktif berpartisipasi dalam proses pembelajaran, program MBKM, kegiatan kemahasiswaan, serta menjadi duta nilai *Tri Hita Karana* di lingkungan masyarakat.

Dengan demikian, pelaksanaan roadmap ini berpijak pada kesadaran kolektif bahwa transformasi pendidikan tidak dapat dicapai hanya oleh sebagian pihak, tetapi memerlukan sinergi dan komitmen bersama seluruh sivitas akademika. Berlandaskan semangat *Tri Hita Karana*, komitmen ini diharapkan melahirkan budaya kerja yang harmonis, saling mendukung, dan berorientasi pada perbaikan berkelanjutan, sehingga Universitas PGRI Mahadewa Indonesia benar-benar mampu mewujudkan visinya sebagai perguruan tinggi yang unggul dan kompetitif berlandaskan kearifan lokal dan nilai-nilai universal kemanusiaan.

7.3 Rekomendasi Tindak Lanjut

Agar *Roadmap Pengembangan Bidang Pendidikan 2020–2035* Universitas PGRI Mahadewa Indonesia tidak berhenti pada tataran konseptual, diperlukan serangkaian tindak lanjut yang terencana dan segera dilakukan setelah dokumen ini disahkan. Tindak lanjut tersebut terutama mencakup penyusunan rencana operasional (Renop), penyesuaian regulasi internal, serta sosialisasi menyeluruh ke seluruh unit di lingkungan UPMI. Ketiga aspek ini menjadi jembatan penting dari “dokumen perencanaan” menuju “praktik implementasi” di tingkat universitas, fakultas, dan program studi.

Pertama, direkomendasikan agar setiap fakultas dan program studi segera menyusun Renop tahunan yang secara eksplisit merujuk pada sasaran dan program dalam roadmap untuk horizon waktu yang sedang berjalan. Renop tersebut perlu memuat program prioritas, indikator kinerja, target tahunan, jadwal pelaksanaan, kebutuhan sumber daya, dan penanggung jawab pada masing-masing kegiatan. Penyusunan Renop dilakukan secara sinkron dengan siklus perencanaan universitas dan diintegrasikan ke dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT), sehingga implementasi roadmap memperoleh dukungan pembiayaan yang

realistis dan terukur. Dengan demikian, setiap butir pengembangan—mulai dari penataan kurikulum OBE–MBKM, penguatan dosen, pelaksanaan MBKM, hingga pengembangan sarana prasarana—memiliki rencana pelaksanaan yang konkret di lapangan.

Kedua, perlu dilakukan penyesuaian regulasi internal agar selaras dengan arah pengembangan yang dirumuskan dalam roadmap. Hal ini mencakup pembaruan atau penyusunan kembali sejumlah peraturan dan pedoman, seperti peraturan akademik, kebijakan kurikulum, pedoman MBKM, pedoman penilaian pembelajaran, serta dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang terkait langsung dengan bidang pendidikan. Penyesuaian regulasi bertujuan untuk memberikan landasan hukum dan prosedural yang kuat bagi implementasi roadmap, sekaligus mengurangi potensi tumpang tindih atau ketidaksinkronan antara kebijakan lama dengan arah baru pengembangan akademik.

Ketiga, untuk memastikan pemahaman dan keterlibatan seluruh sivitas akademika, diperlukan sosialisasi yang sistematis dan berkelanjutan mengenai isi dan implikasi roadmap ini. Sosialisasi dapat dilakukan melalui rapat pimpinan, lokakarya fakultas dan program studi, forum dosen, pertemuan tenaga kependidikan, hingga kegiatan pengenalan bagi mahasiswa. Dalam proses ini, penting untuk tidak hanya menjelaskan isi dokumen, tetapi juga menegaskan peran dan kontribusi masing-masing pihak, serta manfaat jangka pendek dan jangka panjang yang akan diperoleh dari implementasi roadmap. Dengan demikian, roadmap tidak dipersepsikan sebagai beban administratif, melainkan sebagai peluang bersama untuk meningkatkan mutu, memperkuat identitas *Tri Hita Karana*, dan memperluas pengakuan UPMI di tingkat nasional.

Melalui penyusunan Renop yang terarah, penyesuaian regulasi internal yang mendukung, dan sosialisasi yang efektif ke seluruh unit, *Roadmap Pengembangan Bidang Pendidikan 2020–2035* diharapkan dapat diimplementasikan secara konsisten dan berkelanjutan, menjadi instrumen strategis dalam transformasi UPMI menuju perguruan tinggi yang benar-benar unggul dan kompetitif berlandaskan *Tri Hita Karana*.